

**PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023-2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022**



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN
2023-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 4 (Empat) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

22. Forum Konsultasi Publik adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2023-2026

Pasal 2

- (1) RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran RPJPD Tahun 2005-2025 serta dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- (2) RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perumusan RKPD Tahun 2023-2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (3) RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 11 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 9.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2023-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.3.1 Hubungan Antara RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	I-5
1.3.2 Hubungan Antara RPD dengan RPJMD Provinsi Bali	I-7
1.3.3 Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kabupaten Buleleng...	I-7
1.3.4 Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Buleleng.....	I-9
1.3.5 Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah.....	I-9
1.3.6 Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.2 Topografi	II-2
2.1.3 Geologi	II-3
2.1.4 Hidrologi.....	II-4
2.1.5 Klimatologi	II-8
2.1.6 Penggunaan Lahan	II-10
2.1.7 Lahan Kritis	II-11
2.1.8 Kawasan Rawan Bencana	II-12
2.1.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-18
2.1.10 Kerangka Pengembangan Wilayah	II-19

2.1.11	Demografi	II-31
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-36
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-36
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-48
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-52
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-54
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib	II-54
2.3.1.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-55
2.3.1.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-77
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-86
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-90
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-90
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-92
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-94
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-96
2.5	Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-98

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III

3.1	Kinerja Keuangan Daerah.....	III-4
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-4
3.1.1.1	Pendapatan Daerah	III-8
3.1.1.2	Belanja Daerah	III-13
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah	III-15
3.1.2	Neraca Daerah	III-16
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu.....	III-19
3.2.1	Rasio Kemandirian Daerah	III-20
3.2.2	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-21
3.2.3	Rasio Belanja Modal	III-22
3.2.4	Analisis Pembiayaan	III-23
3.3	Kerangka Pendanaan	III-25
3.3.1	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	III-25
3.3.1.1	Proyeksi Pendapatan Daerah	III-25
3.3.1.2	Proyeksi Belanja Daerah	III-29
3.3.1.3	Proyeksi Pembiayaan	III-34

3.3.2	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	III-36
3.3.2.1	Belanja Operasi	III-36
3.3.2.2	Belanja Tidak Terduga	III-36
3.3.2.3	Belanja Transfer	III-36
3.3.2.4	Pengeluaran Pembiayaan	III-37
3.3.3	Penghitungan Kapasitas Riil Keungan Daerah	III-39
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
	Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas	
4.1.1	Pembangun	IV-1
4.1.1.1	Permasalahan Aspek Fisik dan Lingkungan	IV-2
4.1.1.2	Permasalahan Aspek Sosial Kependudukan	IV-3
4.1.1.3	Permasalahan Ekonomi.....	IV-3
4.1.1.4	Permasalahan Infrastruktur	IV-4
4.1.1.5	Permasalahan Pelayanan Umum Perumusan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan	IV-5
4.1.2	Pemerintahan Daerah	IV-10
4.2	Isu-isu Strategis	IV-22
4.2.1	Isu-isu Strategis Daerah	IV-22
4.2.1.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IV-22
4.2.1.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	IV-23
	Peningkatan Aksesibilitas Antar Wilayah/Infrastruktur	
4.2.1.3	Kabupaten Buleleng	IV-23
4.2.1.4	Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	IV-24
	Pemeliharaan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Risiko	
4.2.1.5	Dampak Bencana	IV-25
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien atau Good	
4.2.1.6	Governance	IV-26
4.2.1.7	Peningkatan Produktifitas Perekonomian Daerah	IV-26
4.2.1.8	Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Serentak	IV-27
4.2.2	Isu Strategis Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-28
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V
5.1	Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005 - 2025	V-1
5.1.1	Visi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025	V-2
5.1.2	Misi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025	V-3
5.2	Tujuan dan Sasaran	V-8
5.2.1	Penyelarasan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026	V-10

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI
6.1	Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-5
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-14
4BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	VII-2
7.2	Program Perangkat Daerah Kab.Buleleng Tahun 2023-2026 ...	VII-5
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH	VIII
8.1	Indikator Kinerja Utama Daerah	VIII-1
8.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VIII-3
8.2.1	Penetapan Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VIII-4
8.2.2	Penetapan Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum	VIII-5
8.3	Penetapan Indikator Kinerja Aspek Daya Saing Daerah	VIII-16
BAB IX	PENUTUP	IX
9.1	Pedoman Transisi	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Pembagian Daerah Administrasi di Kab.Buleleng Tahun 2021	II-1
Tabel 2. 2	Luas wilayah menurut kemiringan tanah di Kabupaten Buleleng	II-2
Tabel 2. 3	Rata-Rata Keadaan Meteorologi Dan Geofisika Menurut Stasiun	II-9
Tabel 2. 4	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Buleleng Tahun 2020	II-12
Tabel 2. 5	Sebaran Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng	II-14
Tabel 2. 6	Sebaran Kerawanan Kekeringan di Kabupaten Buleleng 2020.....	II-15
Tabel 2. 7	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2021	II-16
Tabel 2. 8	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Longsor (Kawasan) di Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2021.	II-16
Tabel 2. 9	Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah	II-19
Tabel 2. 10	Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng per Kecamatan Tahun 2017-2021.....	II-32
Tabel 2. 11	Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng per Kecamatan Tahun 2021	II-33
Tabel 2. 12	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (atas Harga Konstan 2010) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-38
Tabel 2. 13	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021.....	II-42
Tabel 2. 14	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-43
Tabel 2. 15	Nilai Inflasi Kota Singaraja Tahun 2017-2021	II-47
Tabel 2. 16	Komponen IPM Tahun 2017- 2021	II-49
Tabel 2. 17	Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2017- 2021	II-51
Tabel 2. 18	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020	II-53
Tabel 2. 19	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2. 20	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) per Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2020	II-56
Tabel 2. 21	Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-57
Tabel 2. 22	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah	

	Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2. 23	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah per Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2020	II-59
Tabel 2. 24	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2. 25	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2020	II-60
Tabel 2. 26	Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2. 27	Kondisi Jembatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020.....	II-67
Tabel 2. 28	Pelayanan Air Minum di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2. 29	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2020	II-69
Tabel 2. 30	Panjang dan Kondisi Drainase di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-70
Tabel 2. 31	Data Timbulan Sampah di Kabupaten Buleleng Tahun 2019..	II-71
Tabel 2. 32	Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2. 33	Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-75
Tabel 2. 34	Indikator Urusan Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2. 35	Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-78
Tabel 2. 36	Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021 ...	II-79
Tabel 2. 37	Indikator Urusan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-80
Tabel 2. 38	Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2. 39	Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-82
Tabel 2. 40	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-82

Tabel 2. 41	Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kabupaten Buleleng 2016-2020	II-84
Tabel 2. 42	Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2. 43	Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-86
Tabel 2. 44	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017-2021	II-86
Tabel 2. 45	Jumlah DTW, Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran dan Penginapan di Kabupaten Buleleng 2017-2021	II-87
Tabel 2. 46	Indikator Urusan Pilihan Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-88
Tabel 2. 47	Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-89
Tabel 2. 48	Indikator Urusan Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-90
Tabel 2. 49	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-91
Tabel 2. 50	Jumlah Laporan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2. 51	Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Buleleng Tahun 2014-2018	II-93
Tabel 2. 52	Angka Kriminalitas Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2. 53	Jumlah Demo Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2. 54	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Buleleng menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2. 55	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-97
Tabel 2. 56	Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-100
Tabel 3. 1	Perkembangan APBD Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2017-2021	III-6
Tabel 3. 2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021	III-12

Tabel 3. 3	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017-2021 ..	III-14
Tabel 3. 4	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2021	III-16
Tabel 3. 5	Perkembangan Realisasi Neraca Daerah Tahun 2016-2020 ..	III-18
Tabel 3. 6	Tingkat Likuiditas dan Solvabilitas Keuangan Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2016-2020	III-19
Tabel 3. 7	Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017– 2021	III-20
Tabel 3. 8	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	III-21
Tabel 3. 9	Rasio Belanja Modal Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2021	III-22
Tabel 3. 10	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	III-23
Tabel 3. 11	Penutup Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	III-24
Tabel 3. 12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2021	III-24
Tabel 3. 13	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026	III-26
Tabel 3. 14	Proyeksi Belanja Daerah tahun 2023-2026	III-32
Tabel 3. 15	Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2023-2026	III-35
Tabel 3. 16	Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib Daerah Tahun 2023 – 2026	III-38
Tabel 3. 17	Penghitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2023-2026	III-40
Tabel 4. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-5
Tabel 4. 2	Isu Strategis Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-28
Tabel 5. 1	Tahapan Pencapaian Misi Pembangunan Jangka Panjang	V-5
Tabel 5. 2	Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	V-11
Tabel 6. 1	Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	VI-2
Tabel 6. 2	Rumusan Strategi Dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	VI-6
Tabel 6. 3	Tema Fokus Pembangunan Tahun 2023-2026	VI-12

Tabel 6. 4	Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Program dan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	VI-14
Tabel 6. 5	Tujuan, Sasaran Dan Indikator RPD Tahun 2023-2026	VI-27
Tabel 7. 1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kab.Buleleng Tahun 2023-2026	VII-3
Tabel 7. 2	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kab.Buleleng Tahun 2023-2026	VII-6
Tabel 8. 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Buleleng	VIII-2
Tabel 8. 2	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buleleng	VIII-4
Tabel 8. 3	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Buleleng	VIII-5
Tabel 8. 4	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Buleleng	VIII-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Buleleng	II-1
Gambar 2.2	Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Tempat	II-3
Gambar 2.3	Rata-rata curah hujan tahun 2021	II-9
Gambar 2.4	Persentase Penggunaan Lahan Budidaya dan Lahan Lindung Kabupaten Buleleng	II-10
Gambar 2.5	Persentase Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Buleleng	II-11
Gambar 2.6	Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Buleleng	II-13
Gambar 2.7	Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Buleleng 2013.....	II-14
Gambar 2.8	Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Buleleng	II-15
Gambar 2. 9	Persentase Angkatan Kerja menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki, Tahun 2019-2020	II-33
Gambar 2.10	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-35
Gambar 2.11	Persentase Penduduk Kabupaten Buleleng Usia 15th keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2020..	II-35
Gambar 2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-40
Gambar 2.13	PDRB Per Kapita Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021.....	II-45
Gambar 2.14	Perbandingan Inflasi Kota Singaraja, Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2021	II-48
Gambar 2.15	IPM Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali 2017-2021.....	II-50
Gambar 2.16	Indeks Gini Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021.....	II-52
Gambar 2.17	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Buleleng dan Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2017-2021..	II-62
Gambar 2.18	Perkembangan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020.....	II-63
Gambar 2.19	Persentase Penduduk Memperoleh Akses Jamban Sehat dan Air Minum Berkualitas Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-64
Gambar 2.20	Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Buleleng Tahun 2021	II-65
Gambar 2.21	Komposisi Timbulan Sampah di Kabupaten Buleleng	II-72

Gambar 2.22	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-91
Gambar 2.23	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2021 .	II-129
Gambar 2.24	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2021	II-129
Gambar 3.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021	III-6
Gambar 5.1	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 Dengan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026..	V-10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng akan berakhir pada tahun 2022 ini. Demikian pula periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 akan berakhir di tahun 2022. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 telah memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Buleleng Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Buleleng, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng Tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng 2023-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

- 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya telah perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

1.3.1 Hubungan Antara RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dilaksanakan dengan melakukan penyelarasan terhadap kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional dan penelaahan terhadap isu –isu strategis nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Visi-Misi Presiden yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia; dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa
 8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
- Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita Kedua dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
 2. Pembangunan Infrastruktur;
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 3. Penyederhanaan Regulasi;
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
 4. Penyederhanaan Birokrasi;
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
 5. Transformasi Ekonomi;
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan,

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

1.3.2 Hubungan Antara RPD dengan RPJMD Provinsi Bali

Penyusunan RPD Kabupaten Buleleng telah juga berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Buleleng.

Visi Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan 22 misi yang diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Penyelenggaraan pembangunan Semesta Berencana Bali harus dilakukan dengan pendekatan yang meliputi 7 (tujuh) prinsip, yaitu Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala; Pembangunan bersifat holistic; Pembangunan bersifat integrative; Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota; Pembangunan berbasis kepemimpinan bersifat kultural; Pembangunan dengan pendekatan satu kesatuan wilayah; Pembangunan yang berpihak pada kepentingan Bali.

1.3.3 Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kabupaten Buleleng

Dalam penyusunannya, RPD Tahun 2023-2026 telah menyesuaikan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 dengan visi “**Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana**”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu; 1) Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul,

kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat; 2) Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan; 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah; 4) Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya; 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Terkait 5 Misi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 sudah dijabarkan kedalam substansi RPD Kabupaten

Buleleng Tahun 2023-2026 menjadi 8 Tujuan yaitu;

1. Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur
4. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social
5. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat
6. Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dari 8 tujuan RPD tersebut lebih rinci lagi dijabarkan menjadi 9 indikator tujuan, 22 sasaran serta 35 indikator sasaran yang diajdikan sebagai prioritas daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

1.3.4 Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Buleleng

RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Selain berpedoman pada dokumen RPD, penyusunan RKPD juga mengacu pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah, dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan kepala daerah tentang RPD.

1.3.5 Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.

Renstra-PD sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

1.3.6 Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPD juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Standar Pelayanan Minimal (SPM), hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan berbagai dokumen lainnya.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033 pada Pasal 4 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah sebagai pusat pengembangan wilayah Bali Utara sekaligus penyangga pelestarian lingkungan alam Bali untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian dalam arti luas, perikanan, dan pariwisata yang berlandaskan Tri Hita Karana.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah memberikan arahan dalam perencanaan pembangunan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah:

1. Sebagai bahan penyelarasan serta keuangan dengan visi dan misi dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng;
2. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum Kabupaten Buleleng, permasalahan dan isu strategis, serta tujuan, sasaran,

- strategi dan arah kebijakan pembangunan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
3. Sebagai pedoman untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
 4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

1.5 Sistematika Penulisan

RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 ini terdiri dari Sembilan BAB yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran kondisi daerah pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat pemetaan permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Bab V Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan mengenai tujuan, dan sasaran yang telah disepakati. Pembangunan Kabupaten Buleleng dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Bab VI Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan

misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Bab ini menggambarkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bab IX Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM

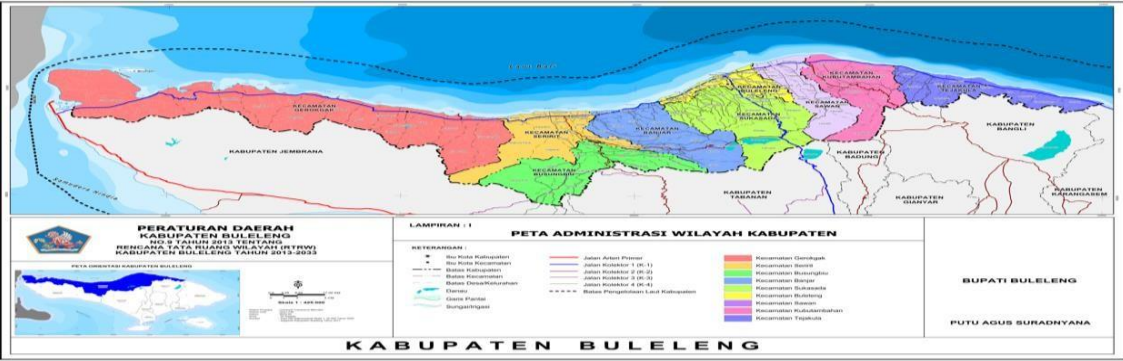
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Kabupaten Buleleng memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 km² atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana
- Sebelah Utara : Laut Bali
- Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- Sebelah Selatan: Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badungdan Bangli



Sumber; RTRW Kab.Buleleng

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Buleleng

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, 563 dusun/banjar, 63 lingkungan dan 199 Desa *Pakraman*.

Tabel 2.1
Pembagian Daerah Administrasi di Kab.Buleleng Tahun 2021

No	Kecamatan						Desa Pakraman
		Desa	Kelura han	Dusun/ banjar	Lingkung an		
1	Gerokgak	14	-	78	-		14
2	Seririt	20	1	85	5		25
3	Busungbiu	15	-	43	-		16
4	Banjar	17	-	74	-		17
5	Sukasada	14	1	64	5		21
6	Buleleng	12	17	41	53		21
7	Sawan	14	-	69	-		18
8	Kubutambahan	13	-	49	-		22
9	Tejakula	10	-	60	-		45
Jumlah		129	19	563	63		199

Sumber: Buleleng Membangun, 2021

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 8o03’40” - 8o23’00” LS dan 114o25’55”- 115o27’28”BT; berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai Nyegara Gunung, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu (ulun) dan hilir (teben).

2.1.2. Topografi

1) Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Buleleng tersebar pada berbagai kelas lereng, mulai dari 0% s.d. 40% . Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Buleleng terdiri dari lahan yang datar hingga berlereng agak curam. Distribusi kemiringan lereng sepertitersaji pada Tabel.2.2.

Tabel 2.2
Luas wilayah menurut kemiringan tanah di Kabupaten Buleleng

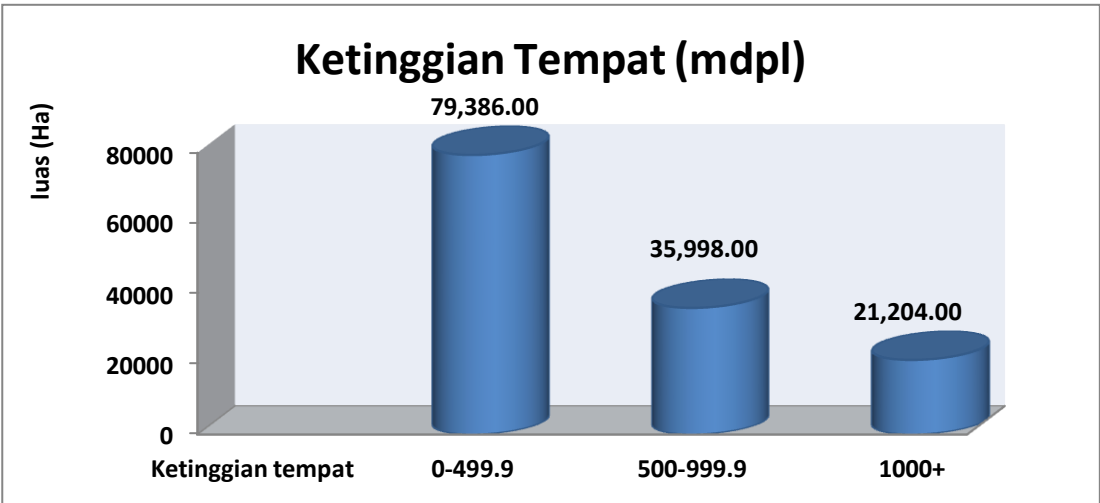
No	Kecamatan	Landai 0-25%	Miring 25-40%	Jumlah
1	Gerokgak	18.350,00	3.843,00	22.193,00
2	Seririt	8.478,00	900,00	9.378,00
3	Busungbiu	2.448,00	7.080,00	9.528,00
4	Banjar	1.628,75	1.062,00	2.690,75
5	Sukasada	13.630,00	1.170,00	14.800,00
6	Buleleng	4.694,00	-	4.694,00
7	Sawan	8.689,00	5.862,50	14.551,50
8	Kubutambahan	10.673,00	1.151,00	11.824,00
9	Tejakula	4.902,25	2.894,75	7.797,00
	Jumlah	73.493,00	23.963,25	97.456,25

Sumber: Buleleng Membangun 2021

Data pada Tabel 2.2 menunjukkan bahwa secara kuantitatif, luas wilayah yang berada pada kemiringan tanah 25-40% mendominasi kondisi lahan di Buleleng, yaitu 24,58% dari total luas lahan. Sebagian besar wilayah merupakan lahan berlereng karena posisi wilayah Kabupaten Buleleng yang berupa perbukitan di bagian Selatan dan agak landai sampai ke pantai di bagian Utara (*Nyegara Gunung*).

2) **Ketinggian Tempat**

Ditinjau dari ketinggian tempat, wilayah Kabupaten Buleleng sebagian besar berada pada ketinggian 0-499,9 mdpl yaitu 58,12%. Daerah yang berada pada ketinggian di atas 500-1.000 m dpl yaitu 26,35% hanya sekitar 15,52% berada pdiata ketinggian 1.000 mdpl, sebagaimana dapat disimak pada Gambar 2.2.



Sumber: Kab. Buleleng dalam Angka, 2021 (diolah)

Gambar 2.2
Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Tempat

2.1.3. **Geologi**

1) Struktur dan Karakteristik Geologi

Struktur geologi wilayah Kabupaten Buleleng tersusun oleh: (a) lapisan aluvial yang tersebar di bagian Utara, (b) batuan gunung berapi tersebar di bagian Selatan, dan (c) formasi Asah, formasi Palasari, dan formasi Prapat Agung tersebar di bagian Barat.

2) Potensi Geologi

Kabupaten Buleleng mempunyai potensi mineral bukan logam dan batuan yang terbatas, yaitu sekitar 2.773,72 Ha (Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033). Jenis batuan yang ada antara lain: batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belum optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

2.1.4. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Buleleng difokuskan pada DAS prioritas I dan II. DAS prioritas I adalah DAS yang prioritas pengelolaannya paling tinggi karena menunjukkan kondisi dan permasalahan biofisik dan sosek DAS paling kritis atau tidak sehat. Sedangkan prioritas II adalah DAS-DAS yang prioritas pengelolaannya sedang.

Dari 12 Sub Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang ada di Provinsi Bali, 9 SWP DAS diantaranya melingkupi wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu Unda (prioritas 1), Blingkang Anyar (prioritas 1), Teluk Terima Pancoran (prioritas 2), Pangiayung (prioritas 2), Saba Daya (prioritas 2), Biluk Poh Gumbrih (prioritas 2), Klatakan Lubang (prioritas 2), Leh Balian (prioritas 2), dan Oten Sungai (prioritas 2).

2) Sungai

a) Kuantitas Sungai

Secara kuantitatif, ada 88 sungai di Kabupaten Buleleng; 65 sungai (73,86%) diantaranya merupakan sungai tadah hujan, yaitu sungai yang hanya mengalirkan air pada musim hujan, sisanya

23 sungai atau 26,14% merupakan sungai mengalir sepanjang tahun. Panjang sungai antara 2,3 - 23,2 km. Tukad Saba merupakan sungai terpanjang yaitu 23,2 km. Sedangkan yang terpendek adalah Tukad Sema hanya 2,3 km. Debit maksimal sungai bervariasi antara 112.000-62.119.000 m³/tahun. Sungai yang memiliki debit air tahunan terbesar adalah Tukad Saba mencapai 62.119.000 m³/tahun, sedangkan yang terkecil adalah Tukad Pekecor hanya 112.000 m³/tahun.

b) Kualitas Air Sungai

Belum semua sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Buleleng terpantau kualitasnya. Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan pemantauan rutin setiap tahun terhadap 3 (tiga) sungai utama, yaitu Sungai/ Tukad Banyumala, Sungai/ Tukad Saba dan Sungai/ Tukad Buleleng. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas air sungai pada bagian hulu dan tengah masih tergolong baik, namun pada bagian hilir sudah tercemar dan tidak layak sebagai air baku air minum karena nilai *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Fosfat* sebagai P, Besi, Nitrit sebagai N, *Fecal Coliform* dan *Total Coliform* melampaui baku mutu air minum Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016.

c) Air Danau/Waduk/Bendung/Embung

Terdapat 2 buah danau, 2 buah waduk, 24 bendung, dan 1 buah embung di Kabupaten Buleleng dengan total volume air sekitar 134.203.500 m³. Volume air yang tertampung di danau Buyan sekitar 92.800.000 m³. Sedangkan, di danau Tamblingan sekitar 27.050.000 m³. Danau Buyan dan danau Tamblingan merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dan merupakan penyangga tata air di

daerah hilir dan sekitarnya. Dalam fungsinya sebagai penyedia air baku, fungsi Danau Buyan semakin menurun karena adanya sedimentasi yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Pada tahun 2015, volume sedimentasi mencapai 2.216,799 m³. Akibat dari sedimentasi tersebut menyebabkan penurunan kedalaman air selama 3 tahun terakhir sebesar 20 m serta volume air menurun dari 116,25 juta m³ menjadi 49,6 juta m³ (BWS Bali Penida, 2016). Proses sedimentasi dan pendangkalan danau ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan pertanian di pinggir danau yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air. Beban erosi yang tinggi bercampur dengan pupuk dari lahan pertanian menyebabkan kondisi danau mengalami pengayaan nutrien yang memacu pertumbuhan tumbuhan air, khususnya eceng gondok dan kapung kili di danau.

Selain danau, juga terdapat waduk dan embung, yaitu waduk Gerokgak di Kecamatan Gerokgak, waduk Titab di Kecamatan Busungbiu, dan Embung Tembok di Desa Tembok Kecamatan Tejakula. Secara potensial, volume air Waduk Gerokgak rata-rata 3.750.000 m³ dan kondisinya berfluktuasi menurut musim. Secara teknis, waduk Titab memiliki luas genangan 68,83 Ha dengan volume tampungan efektif 10,60 juta m³ yang dimanfaatkan untuk irigasi dan juga akan dimanfaatkan untuk air minum dan pembangkit listrik.

Pemanfaatan sebagai irigasi mencakup daerah irigasi Saba dan Puluran seluas 1.915 Ha, daerah irigasi Lebah Semawa seluas 28 Ha, dan daerah irigasi Rawa seluas 23 Ha. Pemanfaatan sebagai air minum sebesar 350 liter per detik akan dikelola

sebagai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang mencakup wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Desa-desa yang akan dilayani oleh SPAM Burana (Buleleng Jembrana) adalah: Kecamatan Seririt (Unggahan, Munduk Bestala, Bestala, Mayong, Rangdu, Ularan, Ringdikit, Joanyar, Kalianget, Tangguwisia, Sulanyah, Bubunan, Seririt, Pengastulan, Patemon, Lokapaksa, Umeanyar, Banjarasem, Kalisada dan Pangkung Paruk).

- Kecamatan Banjar (Tampekan, Banjar Tegeha, Banjar, Dencarik, Temukus, dan Kaliasem).
- Kecamatan Busungbiu (Telaga, Titab, Kekeran, dan Busungbiu).
- Kecamatan Gerokgak (semua desa).

3) Mata Air

Mata air bagi masyarakat Buleleng memiliki nilai yang sangat strategis. Selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai sumber air baku dan air irigasi, juga punya fungsi religi, yaitu sebagai sarana pelaksanaan ritual/upacara adat/agama. Ke depan, kelestarian sumber mata air perlu terus ditingkatkan. Terdapat 243 buah sumber mata air di Kabupaten Buleleng dengan potensi air lebih dari 1.125 liter per detik atau 79,528 juta m³/tahun. Dari 243 sumber mata air yang ada di kabupaten Buleleng, sekitar 81 sumber mata air digunakan untuk penyediaan air minum, sisanya untuk irigasi dan lain-lain.

4) Produktivitas Akuifer dan Air Tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Bali, di Kabupaten Buleleng terdapat beragam karakteristik akuifer dan air tanah, meliputi aliran melalui ruang antar butir, melalui celah dan ruang antar butir. Adapun karakteristik produktivitas akuifer dan air tanah dimaksud sebagai berikut:

1. Aliran melalui celah antar butir

Lokasi wilayah cakupan adalah Desa Tejakula, dengan produktivitas akuifer sekitar 90,40% dan debit sumur $\pm 52,67$ liter/detik.

2. Aliran melalui celah dan ruang antar butir

Lokasi wilayah cakupan meliputi Desa Pacung, Julah, Bondalem, dan Tejakula, dengan produktivitas akuifer cukup bervariasi antara 76,50% (Desa Bondalem) hingga 92,50% (Desa Tejakula). Debit sumur rata-rata cukup tinggi pada kisaran 23,34–52,67 liter/detik.

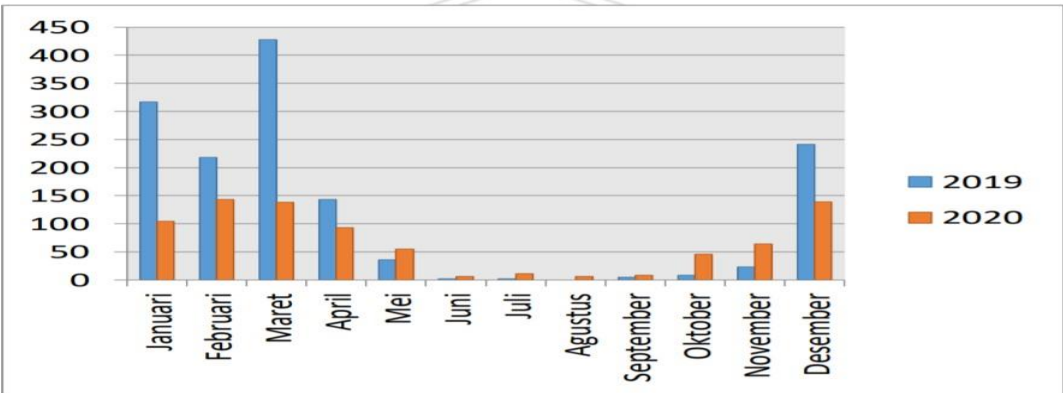
Ada 2 (dua) cekungan air tanah (CAT) yang terdapat di wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu CAT Singaraja dan CAT Tejakula. CAT Singaraja memiliki sifat berupa aluvium pantai dan sungai, umumnya pasir dengan kelulusan sedang. Batuan gunung api kelompok Lesong-Pohen-Sangayang, serta batuan gunung api kelompok Buyan-Beratan dan Batur, terdiri dari breksi vulkanik, tuf pasiran, dan endapan laharik, setempat lava, dengan kelulusan sedang sampai tinggi dan luas wilayah CAT sekitar 505 km².

CAT Tejakula memiliki berupa aluvium endapan sungai, terdiri atas pasir, kerikil, dan kerakal sedang- tinggi. Batuan gunung api Batur dan batuan gunung api Agung, terutama aglomerat, lava, tuf, dan endapan laharik dengan kelulusan sedang sampai tinggi. Batuan gunung api Seraya dan kelompok Buyan-Bratan purba, terdiri atas breksi gunung api dan lava, setempat tuf, dengan kelulusan rendah-sedang. Luas wilayah sekitar 750 km².

2.1.5. **Klimatologi**

Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Buleleng hanya dikenal 2 musim yaitu musim

kemarau dan musim hujan. Pada tahun 2020, hujan hampir turun di setiap bulan dengan intensitas yang berbeda. Rata-rata curah hujan pada tahun 2020 di Kabupaten Buleleng bervariasi tiap bulannya, hanya saja pada bulan Juni-September rata-rata curah hujan cukup kecil. Sedangkan curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September. Tipe iklim wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan klasifikasi *Schmidth* dan *Ferguson* bervariasi mulai dari tipe iklim C (nilai $Q = 50,68$) di Wanagiri Kecamatan Sukasada dan sekitarnya, sampai tipe F (nilai $Q = 170,73-244,33$) di Pemuteran Kecamatan Gerokgak dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata berkisar $26,9^{\circ}\text{C}-30,4^{\circ}\text{C}$; kelembaban udara rata-rata mencapai 78%-84%, curah hujan antara 1.913,6-2.812,6 mm/tahun, dan penyinaran matahari mencapai 66-77%,



Sumber; Buleleng Membangun, 2021

Gambar 2.3.
Rata-rata curah hujan tahun 2021

Tabel 2.3
Rata-Rata Keadaan Meteorologi Dan Geofisika Menurut Stasiun

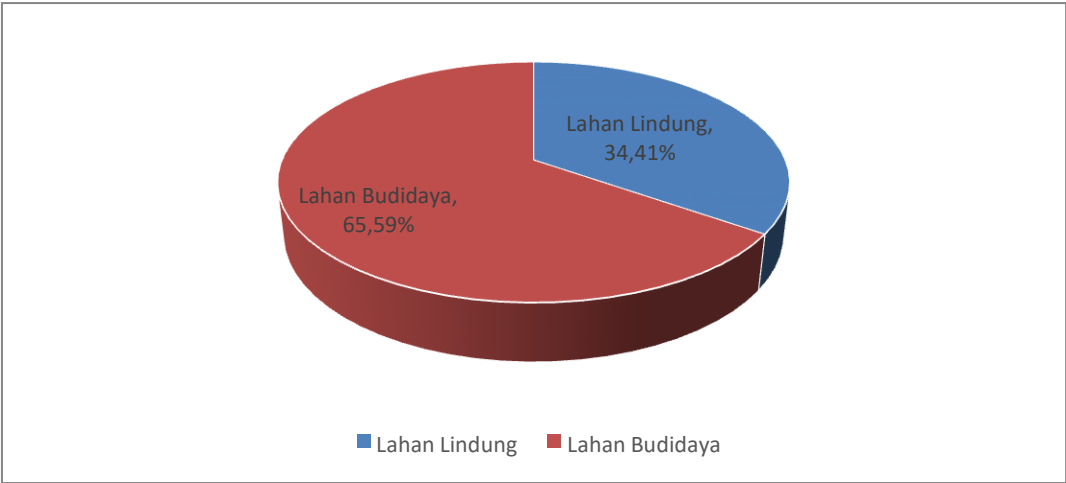
No	Unsur Iklim	Stasiun Pengamatan			
		Meteorologi Ngurah Rai	Geofisika Denpasar	Geofisika Karangasem	Klimatologi Negara
1.	Suhu (°C)				
	Maksimum	22,50	23,20	21,20	21,40
	Minimum	27,87	29,93	27,21	28,32
	Rata-rata	33,30	35,00	32,00	34,00
2.	Kelembaban Udara (%)				
	Maksimum	61,00	51,00	63,0	60,00
	Minimum	80,53	75,48	82,57	80,56

No	Unsur Iklim	Stasiun Pengamatan			
		Meteorologi Ngurah Rai	Geofisika Denpasar	Geofisika Karangasem	Klimatologi Negara
	Rata-rata	98,00	100,00	98,0	98,00
3.	Tekanan Udara (mb)	1.010,80	1.009,80	994,10	1.011,50
4.	Kecepatan Angin (knot)	12,86	7,72	5,14	9,77
5.	Curah Hujan (mm)	337,10	346,90	397,10	189,90
6.	Penyinaran Matahari (%)	63,95	48,88	32,11	52,78

Sumber : Buleleng Membangun, 2021

2.1.6. Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Buleleng menurut penggunaannya dibagi dalam penggunaan lahan budidaya dan penggunaan lahan lindung. Penggunaan lahan budidaya seluas 89.593,67 Ha atau 65,59% dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas lahan budidaya pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, permukiman dan budidaya lainnya, sedangkan penggunaan lahan lindung seluas 46.994,33 Ha atau 34,41% diperuntukkan untuk kehutanan dan lindung lainnya. Proporsi penggunaan lahan Kabupaten Buleleng tersaji dalam Gambar berikut.

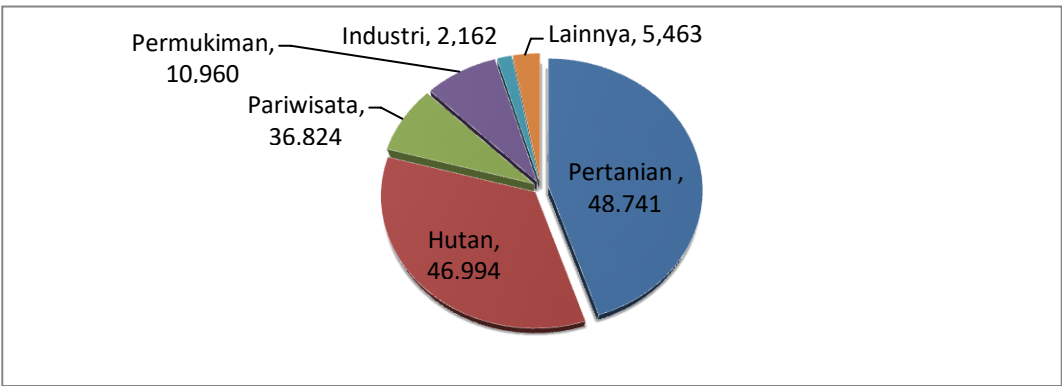


Gambar 2.4
 Persentase Penggunaan Lahan Budidaya dan Lahan LindungKabupaten Buleleng

Persentase penggunaan lahan utama budidaya dan lahan lindung yaitu; peruntukkan lahan lindung terdiri dari hutan negara dan lindung lainnya, Hutannegara di Kabupaten Buleleng tercatat seluas 44.681 Ha atau 33,22% dari

total luas wilayah kabupaten dan lahan lindung lainnya seluas 2.313 ha. Luas hutan tersebut sudah memenuhi luasan ideal untuk optimalisasi manfaat fungsi lingkungan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 18 ayat (2), yaitu minimal 30% dari luas pulau atau luas wilayah. Secara umum, kondisi biofisik hutan masih baik, namun masih terdapat adanya gangguan hutan yang perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan hutan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan dan penebangan liar.

Lahan peruntukan budidaya yang terdiri dari peruntukan pertanian seluas 48.741 ha atau 35,68%, peruntukan pariwisata 36.824 Ha atau 26,95%, peruntukan industri seluas 2.162 ha atau 2,41%, peruntukan permukiman seluas 10.960 ha atau 12,23% peruntukan lainnya seluas kurang lebih 5.463 ha atau 4%.



Gambar 2.5
Persentase Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Buleleng

2.1.7. Lahan Kritis

Luas lahan kritis kategori sangat kritis dan kritis di Kabupaten Buleleng berdasarkan data tahun 2020 berjumlah 12.379,23 Ha tersebar dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Lahan kritis dalam kawasan hutan terdapat di hutan lindung/konservasi dan hutan produksi. Sedangkan lahan kritis di luar kawasan hutanterdapat di lahan budidaya.

Tabel 2.4
Luas Lahan Kritis di Kabupaten
BulelengTahun 2020

Kecamatan		Luas Areal (Ha)				
		Tidak Kritis	Potensi	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gerokgak	3,783.76	15,472.27	16,329.70	71.72	0.00
2	Seririt	2,001.40	2,773.77	5,701.48	701.35	0.00
3	Busungbiu	1,001.40	2,490.96	15,361.39	44.48	0.00
4	Banjar	3,660.85	892.75	9,956.47	2,764.30	0.00
5	Sukasada	5,660.85	1,541.63	541.56	4,672.95	0.00
6	Buleleng	4,142.08	203.24	348.24	0.00	0.00
7	Sawan	3,347.33	632.36	4,276.12	996.18	0.00
8	Kubutambahan	754.68	139.14	1,081,85	1,081.85	0.00
9	Tejakula	327.67	60.79	7,333.16	2,046.40	0.00
Jumlah		24,680.02	24,209.91	59,848.12	12,379.23	0.00

Sumber: Buleleng Membangun, 2021

Jika dibandingkan dengan luas lahan kritis tahun 2019 yang mencapai 23.231,16 Ha, maka luas lahan kritis tahun 2020 tampak menurun signifikan, yaitu 10.851,93 Ha atau sekitar 46,71%. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan kriteria daya dukung lahan menunjukkan luas lahan kritis di Kabupaten Buleleng sudah cukup banyak yang terpulihkan. Hal ini menunjukkan upaya- upaya penanganan rehabilitasi lahan kritis, baik melalui pendekatan vegetatif (penghijauan dan reboisasi) maupun pendekatan sipil teknis (pembuatan sumur resapan, lubang biopori, pembuatan embung, cubang, dam pengendali banjir, dan terassering), cukup efektif dalam memulihkan daya dukung lahan. Upaya ini akan terus dilanjutkan agar lebih banyak lagi lahan kritis yang dapat ditangani.

2.1.8. Kawasan Rawan Bencana

Dalam sejarahnya, wilayah Kabupaten Buleleng memiliki potensi bencana tanah longsor dan pernah pula terkena musibah gempa bumi. Secara alamiah,

wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan potensi gempa tinggi karena dalam sejarahnya pernah terjadi beberapa kali gempa dahsyat yang menimbulkan kehancuran fisik dan banyak korban jiwa. Pulau Bali, termasuk Kabupaten Buleleng merupakan kawasan yang terletak pada daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu Eurasia, Samudra Pasifik dan India-Australia yang masing-masing bergerak ke Barat dan ke Utara relatif terhadap Eurasia. Posisi ini menyebabkan Kabupaten Buleleng rawan gempa tektonik. Selain itu, di Bali terdapat beberapa gunung merapi aktif, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur yang berpotensi menyebabkan gempa vulkanik. Buleleng tergolong daerah rawan bencana tanah longsor karena topografi daerahnya yang berbukit, sebagian berlereng curam, disertai curah hujan yang tinggi, dan kondisi tanah yang tergolong labil.

Selain rawan bencana tanah longsor dan gempa bumi, wilayah Kabupaten Buleleng juga rawan terjadi banjir bandang, kekeringan, badai ombak, angin puting beliung, dan kebakaran hutan. Data sebaran kerawanan bencana banjir dan kekeringan .



Sumber: RTRW Kabupaten Buleleng

Gambar 2.6

Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013

Tabel 2.5
Sebaran Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Kecamatan		Kerawanan (Ha)		Jumlah (Ha)
		Rendah	Sedang	
1	Buleleng	3.654	-	3.654
2	Sukasada	2.477	-	2.477
3	Seririt	2.957	-	2.957
4	Busungbiu	732	-	732
5	Tejakula	2.439	-	2.439
6	Banjar	1.980	-	1.980
7	Kubutam bahan	2.721	-	2.721
8	Gerokgak	13.141	-	13.141
9	Sawan	3.341	-	3.341
Jumlah (Ha)		33.442		33.442

Sumber:Kajian Resiko Bencana Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel di atas, terlihat secara keseluruhan bencana banjir memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Buleleng adalah 33.442 Ha yang berada pada kelas rendah. Kelas bahaya rendah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana.



Gambar 2.7
Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Buleleng Tahun 2013

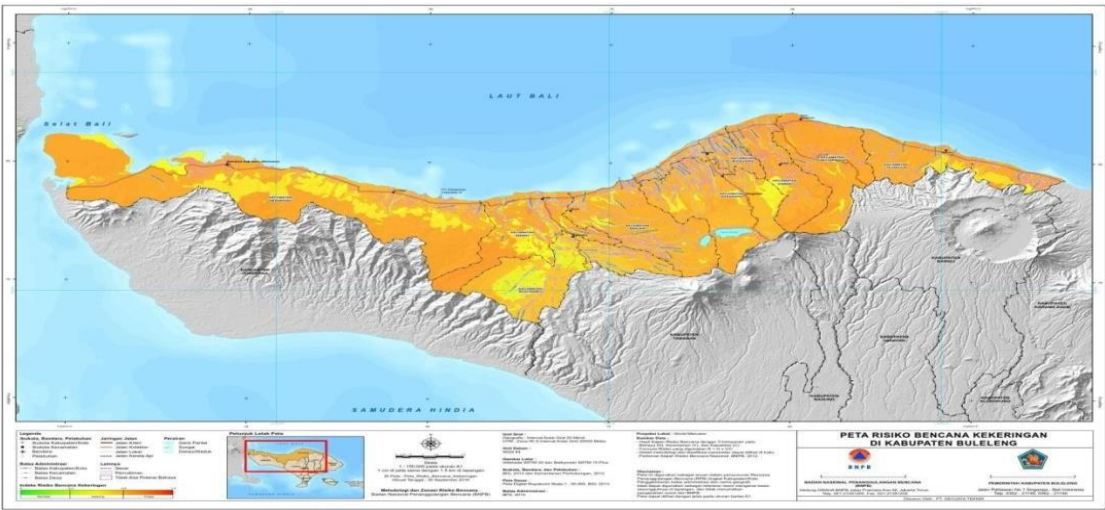
selain bahaya banjir di musim hujan, di musim kemarau wilayah Buleleng juga memiliki potensi bencana kekeringan. Berdasarkan Tabel 2.6,

terlihat secara keseluruhan bencana kekeringan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Buleleng adalah 135.741 Ha yang berada pada kelas sedang. Kelas bahaya sedang Kabupaten Buleleng berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana. Hal ini dapat digambarkan melalui sebaran bahaya kekeringan menurut kecamatan pada gambar 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.6
Sebaran Kerawanan Kekeringan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Kecamatan		Potensi (Ha)		Jumlah (ha)
		Rendah	Sedang	
(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Buleleng	-	4.653	4.653
2	Sukasada	-	16.809	16.809
3	Seririt	-	11.082	11.082
4	Busungbiu	-	19.650	19.650
5	Tejakula	-	9.769	9.769
6	Banjar	-	17.104	17.104
7	Kubutambahan	-	11.807	11.807
8	Gerokgak	-	35.634	35.634
9	Sawan	-	9.232	9.232
Jumlah (Ha)		-	135.741	135.741

Sumber:Dokumen Kajian Resiko Bencana KabupatenBuleleng



Gambar 2.8
Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Buleleng Tahun 2013

Tabel 2.7
 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam
 di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2021

Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banjir	10	13	35	16	1	4
Gempa Bumi	0	2	45	26	0	0
Tanah Longsor	30	24	11	42	14	27

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Selain bahaya tersebut diatas wilayah Buleleng juga memiliki potensi bencana alam gempa bumi dan tanah longsor. Berdasarkan Tabel 2.7, terlihat secara keseluruhan desa/kelurahan yang mengalami bencana alam rentang waktu tahun 2016-2021 yaitu bencana banjir ditahun 2016 sejumlah 10 desa/kelurahan, sebanyak 13 desa/kelurahan ditahun 2017, terbanyak terjadi di 2018 terjadi di 35 desa/kelurahan, menyusul sejumlah 16 desa/kelurahan ditahun 2019, ditahun 2020 bencana banjir menurun drastis hanya 1 desa/kelurahan yang terkena dampak banjir serta 4 desa/kelurahan yang terdampak ditahun 2021. Gempa bumi tahun 2017 sebanyak 2 desa/kelurahan yang terdampak, terbanyak terjadi di tahun 2018 terhitung sebanyak 45 desa/kelurahan, menurun menjadi 26 desa/kelurahan ditahun 2019.

Bencana alam lainnya juga pernah terjadi diwilayah Kabupaten Buleleng yaitu tanah lonsor berturut-turut dari tahun 2016-2021 yaitu 30 desa/kelurahan, 24 desa/kelurahan, 11 desa kelurahan, 42 desa/kelurahan, 14 desa/kelurahan dan 27 desa/kelurahan.

Tabel 2.8
 Jumlah Kawasan Rawan Bencana Longsor (Kawasan)
 di Kabupaten BulelengTahun 2017 – 2021

Kecamatan		Jumlah Kawasan rawan Bencana (Kawasan)				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gerokgak	2	-	-	-	8
2	Seririt	9	4	2	1	4
3	Busungbiu	13	7	7	1	11
4	Banjar	14	6	6	4	8

Kecamatan		Jumlah Kawasan rawan Bencana (Kawasan)				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Sukasada	15	4	-	1	5
6	Buleleng	7	4	-	-	-
7	Sawan	12	2	2	3	4
8	Kubutambahan	10	3	-	2	5
9	Tejakula	7	2	-	-	4
JUMLAH		89	32	17	12	49

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Sebaran kawasan yang rawan mengalami tanah longsor menurut sebaran kecamatan terjadi disemua kecamatan paling banyak terjadi di tahun 2017 sebanyak 89 kawasan, dimana kecamatan paling rawan yaitu kecamatan Sukasada sejumlah 15 kawasan yang memang secara topografi memiliki banyak lahan kemiringan yang berpotensi terjadinya tanah longsor, disusul kecamatan Banjar 14 kawasan, kecamatan Busungbiu 13 kawasan, kecamatan Sawan 12 kawasan, kecamatan Kubutambahan 10 kawasan, kecamatan Serrirt 9 kawasan, Kecamatan Tejakula dan Buleleng masing-masing 7 kawasan serta paling sedikit di kecamatan Gerokgak yang hanya 2 kawasan. Sedangkan tahun2018 sebanyak 32 kawasan, disusul tahun 2019 17 kawasan, tahun 2020 hanya 12 kawasan sedangkan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 49 kawasan yang terpetakan kedalam kawasan rawan longsor.

Dengan melihat kondisi sebaran kawasan yang mengalami kerawanan bencana longsor dari tahun 2017-2021 dapat diintepretasikan bahwasanya kecamatan paling rawan bencana tanah longsor kecamatan Busungbiu mencapai 39 kawasan, kecamatan Banjar 38 kawasan, kecamatan Sukasada 23 kawasan, kecamatan Seririt dan Kubutambahan masing masing 20 kawasan, kecamatan Tejakula 13 kawasan, kecamatan Buleleng 11 kawasan dan terakhir kecamatan

Gerokgak 10 kawasan.

2.1.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memberikan informasi kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu daerah. Kerangka IKLH menggunakan kualitas air, kualitas udara yang dipantau dari tutupan hutan/lahan sebagai indikator wilayah di Kabupaten Buleleng. Indikator kualitas air yang dipantau, yaitu parameter TSS (*Total Suspended Solid*), DO (*Dissolved Oxygen*), BOD (*Biochemical Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*), *Total Fosfat*, *Fecal Coliform*, dan *Total Coliform*. Untuk indikator udara yang dipantau, yaitu parameter SO₂ (*Sulfur dioksida*) dan NO₂ (*Nitrogen dioksida*), sedangkan tutupan lahan dipantau melalui citra satelit.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten berada pada angka (63,18). Hal tersebut karena nilai indeks tutupan hutan/lahan, yaitu 52,58 masih berada di bawah target yang ditetapkan dari nilai indeks 59,5. Kualitas lingkungan ini ditopang oleh beberapa pendukung lingkungan termasuk kualitas sungai. Secara umum kualitas air sungai (Sungai/Tukad Banyumala, Sungai/Tukad Saba dan Sungai/Tukad Buleleng) di bagian hulu dan dan tengah masih tergolong baik, namun pada bagian hilir sudah tercemar dan tidak layak sebagai air baku air minum karena nilai BOD, COD, *Total Fosfat* sebagai P, Besi, Nitrit sebagai N, *Fecal Coliform* dan *Total Coliform* melampaui baku mutu air minum (Dinas Lingkungan Hidup 2016).

Kondisi capaian IKLH Kabupaten Buleleng tahun 2017 mencapai 62,26, ditahun 2018 mencapai 63,67, pada tahun 2019 mencapai 64,95 dan diakhir tahun 2020 berada pada angka 71,46

melihat kondisi ini IKLH mengalami perkembangan yang baik.

2.1.10. Kerangka Pengembangan Wilayah

Pemahaman atas kondisi geografis dan aspek fisik wilayah lainnya memberikan pengetahuan dalam merumuskan pemikiran potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Buleleng. Berikut disampaikan kerangka pemikiran mengenai potensi pengembangan Kabupaten Buleleng berdasarkan aspek-aspek fisik wilayah.

Tabel 2.9
Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah

No	Aspek Fisik Wilayah		Kerangka Pengembangan Wilayah
1	Geografi	<ul style="list-style-type: none">Menjadi akses pintu masuk ke daerah Jawa dan LombokDilalui jaringan transportasi primerMulai diminati investor	<ul style="list-style-type: none">Memanfaatkan lokasi wilayah yang strategisMemperluas kawasan lindung untuk melindungi badan air dan kawasan Rawan bencana longsorMelindungi kawasan pertanianMengembangkan kegiatan dan kawasan perkotaan yang ramah lingkunganMengembangkan infrastruktur dasar penunjang pelayanan publik
2	Topografi	Didominasi lahan dengan kemiringan terjal dan elevasi sama atau lebih dari 500 m dpl	
3	Hidrologi	<ul style="list-style-type: none">Memiliki dan dilalui banyak sungai, danau, wadukTerdapat potensi banjir, tanah longsor dan sekaligus kekeringan	
4	Iklim	Didominasi wilayah dengan curah hujan sedang dan tinggi	
5	Penggunaan Lahan	Didominasi dengan kawasan budidaya pertanian (terbangun). Kawasan budidaya pertanian lebih kecil, dan beberapa wilayah merupakan kawasan lindung	
6	Kawasan Rawan Bencana	Rawan longsor, dan terdapat potensi kekeringan dan banjir lokal	

Pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Buleleng Tahun 2013-2033 sebagai berikut:

1) Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- a. Pusat-pusat kegiatan;
 - PKW terdiri atas Kawasan Perkotaan Singaraja.
 - PKL terdiri atas Kawasan Perkotaan Seririt.
 - PPK terdiri atas :
 - a. Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak;
 - b. Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak;
 - c. Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu;
 - d. Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar;
 - e. Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng;
 - f. Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada;
 - g. Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan;
 - h. Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan; dan
 - i. Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula.
 - PPL terdiri atas :
 - a. PPL Pejarakan di Kecamatan Gerokgak;
 - b. PPL Banjarasem di Kecamatan Seririt;
 - c. PPL Sepang di Kecamatan Busungbiu;
 - d. PPL Kaliasem di Kecamatan Banjar;
 - e. PPL Banyuatis dan Tigawasa di Kecamatan Banjar;
 - f. PPL Anturan di Kecamatan Buleleng;
 - g. PPL Bungkulan di Kecamatan Sawan;
 - j. PPL Bukti dan PPL Tamblang di Kecamatan Kubutambahan;
 - j. PPL Sambirenteng dan PPL Sembiran di Kecamatan Tejakula.
- b. Sistem jaringan prasarana utama mencakup :
 - 1. Sistem jaringan transportasi darat meliputi
 - Jaringan jalan;
 - Jaringan prasarana lalu lintas;

- Jaringan layanan lalu lintas; dan
 - Jaringan perkeretaapian
2. Sistem jaringan transportasi laut meliputi :
- Tataunan kepelabuhanan meliputi :
 - a. jaringan pelabuhan laut utama, meliputi Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak yang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang dan barang dan pariwisata;
 - b. Jaringan pelabuhan laut pengumpul, meliputi:
 - 1. Pelabuhan untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan barang dan perikanan;
 - 2. Pelabuhan Pegamatan untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan barang; dan
 - 3. Rencana pembangunan Pelabuhan laut Penuktukan untuk pelayanan angkutan barang dan penumpang, setelah melalui kajian teknis.
 - c. Jaringan pelabuhan laut pengumpan, meliputi Pelabuhan Labuhan Lalang, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang.
 - d. Jaringan pelabuhan laut khusus, meliputi pelabuhan pelayanan kegiatan operasi pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan energi lainnya.
 - Alur pelayaran meliputi :
 - 1. alur pelayaran nasional, terdiri atas :
 - a. alur pelayaran dari Pelabuhan Celukan Bawang melalui laut Bali menuju pelabuhan-pelabuhan diluar Provinsi Bali;
 - b. alur pelayaran dari Pelabuhan Sangsit melalui Laut Bali menuju pelabuhan-pelabuhan diluar Provinsi Bali;

- c. alur pelayaran dari Pelabuhan Pegametan melalui Laut Bali; dan
 - d. alur pelayaran khusus kapal untuk kepentingan PLTGU Pemaron, PLTU Celukan Bawang dan jaringan energi lainnya;
- 2. alur pelayaran lokal, meliputi alur pelayaran untuk melayani kegiatan wisata tirta dan peribadatan.
- 3. Sistem jaringan transportasi udara meliputi :
 - a. Tataan kebandarudaraan;
 - 1. Rencana peningkatan status Bandar udara Letkol Wisnu menjadi Bandar Udara umum; dan
 - 2. Rencana pembangunan bandar udara umum.
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.meliputi :
 - 1. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - 2. ruang udara di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
 - 3. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :
 - 1. Sistem jaringan energi; meliputi pembangkit tenaga listrik dan jaringan prasarana energi.
 - 2. Sistem jaringan telekomunikasi; meliputi sistem jaringan kabel, sistem jaringan nirkabel dan sistem jaringan satelit
 - 3. Sistem jaringan sumberdaya air; aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air meliputi :

- a. wilayah sungai (WS);
 - b. cekungan air tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air minum;
 - e. sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor; dan
 - f. sistem pengamanan pantai.
4. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan; meliputi sistem jaringan persampahan, sistem jaringan air limbah, sistem jaringan air minum, sistem jaringan drainase dan jaringan evakuasi bencana.

2) Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten, meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya

a. Kawasan lindung

- kawasan hutan lindung seluas 31.936,32 ha atau 23,38% dari luas kabupaten
- Kawasan lindung seluas 46.994,33 Ha (empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga hektar) atau 34,41% (tiga puluh empat koma empat puluh satu persen) dari luas wilayah kabupaten.
- kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi kawasan resapan air;
- kawasan perlindungan setempat meliputi ;
 - o kawasan suci;
 - o kawasan tempat suci;
 - o kawasan sempadan pantai;
 - o kawasan sempadan sungai;
 - o kawasan sempadan jurang;
 - o kawasan sempadan danau atau waduk; dan
 - o kawasan sekitar mata air.
- kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi:
 - o kawasan suaka alam;
 - o kawasan pantai berhutan bakau;
 - o kawasan taman nasional dan taman nasional

- laut;
- kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
- kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- kawasan rawan bencana alam meliputi ;
 - Kawasan rawan angin kencang;
 - kawasan rawan tanah longsor;
 - kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - kawasan rawan banjir
- kawasan lindung geologi meliputi :
 - kawasan cagar alam geologi;
 - kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap airtanah.
- kawasan lindung lainnya meliputi ;
 - kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - terumbu karang; dan
 - kawasan koridor atau alur migrasi bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya seluas 89.593,67 Ha (delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh hektar atau 65,59% (enam puluh lima koma lima puluh sembilan persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas :

- Kawasan peruntukan hutan produksi Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 4.731,95 Ha; meliputi hutan produksi terbatas seluas 3.207 Ha dan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 1.524 Ha;
- Kawasan hutan rakyat Kawasan hutan rakyat, terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40%, pada kawasan berbatasan dengan hutan lindung, pada kawasan di dalam radius kawasan tempat suci, serta kawasan lainnya. Namun, sampai dengan tahun 2016, luasan kawasan hutan rakyat

belum dapat dipetakan dengan tegas karena berada pada kawasan-kawasan di sekitar kawasan lindung atau bercampur dengan kawasan budidaya lainnya dalam luasan relatif kecil;

- kawasan peruntukan pertanian Kawasan peruntukan pertanian dirancang seluas 48.741,51 Ha atau 35,68% dari luas wilayah Kabupaten Buleleng, terdiri atas;
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas sekitar 10.992 Ha;
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura seluas 5.391 Ha;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan kurang lebih luasnya 20.274 Ha;
 - d. Kawasan peruntukan peternakan;
- kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Buleleng memiliki pantai sepanjang $\pm 157,05$ km yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari Desa Sumberkelampok di Kecamatan Gerokgak sampai Desa Tembok di Kecamatan Tejakula meliputi :
 - a. Perikanan Tangkap;
 - b. Perikanan Budidaya;
 - c. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- kawasan peruntukan pariwisata seluas 36.824 Ha (tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat hektar) atau 26,95% (dua puluh enam koma sembilan puluh lima persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi :
 - a. Kawasan Pariwisata meliputi :
 - 1. Kawasan Pariwisata Kalibukbuk meliputi :
 - a. Desa Kalibukbuk, Desa Pemaron, Desa Tukad Mungga, dan Desa Anturan di Kecamatan Buleleng;

- b. Desa Kaliasem, Desa Temukus, dan Desa Tigawasadi Kecamatan Banjar; dan
 - c. Desa Kayu Putih Melaka di Kecamatan Sukasada, dipromosikan menjadi bagian dari Kawasan Pariwisata Kalibukbuk
2. Kawasan Pariwisata Batu Ampar meliputi: Desa Penyabangan, Desa Banyupoh, Desa Pemuteran, Desa Sumberkima dan Desa Pejarakan di Kecamatan Gerokgak; dan
 3. Kawasan Pariwisata Air Sanih meliputi : Desa Tembok, Desa Sambirenteng, Desa Penuktukan, Desa Les, Desa Bondalem, Desa Tejakula, Desa Julah, Desa Sembiran, dan Desa Pacung di Kecamatan Tejakula; dan Desa Bukti di Kecamatan Kubutambahan;
- b. KDTWK terdiri atas KDTWK Pancasari yang merupakan bagian dari KDTWK Bedugul-Pancasari sebagai Kawasan Strategis Provinsi Bali yang berada di wilayah kabupaten meliputi:
- Desa Pancasari dan Desa Wanagiri di Kecamatan Sukasada
 - Desa Munduk, Desa Gesing, dan Desa Gobleg di Kecamatan Banjar; dan
 - Desa Umejero di Kecamatan Busungbiu; dan
- c. DTW terdiri atas :
1. Wisata alam meliputi: Monkey Forest, Air Terjun Gitgit, Air Terjun Bertingkat Gitgit, Air Terjun Sambangan, Wisata Alam Ambengan-Sambangan, Ricefield Terraces Ambengan, Air Terjun Carat di Kecamatan Kubutambahan, Air Terjun Melanting, Munduk, Air Panas Banyuwedang, Yeh Panes Nirmala Banjar, Air Terjun Singsing di Kecamatan Banjar, Air Terjun Les, Air Terjun Yeh Mampeh di Kecamatan Tejakula, Pantai Penimbangan, Pantai

Kerobokan, Wisata alam Sudaji di Kecamatan Sawan;

2. Wisata budaya/sejarah meliputi : Makam Jayaprana dan Lingkungan Pura Pulaki di Kecamatan Gerokgak, Brahma Wihara Asrama, Desa Tua Sidatapa, Desa Tua Pedawa, Desa Tua Cempaga, Desa Tua Banyuseri, dan Desa Tua Tigawasa di Kecamatan Banjar, Tugu Bhuana Kerta di Kecamatan Sukasada, Lingkungan Pura Beji, Lingkungan Pura Dalem Sangsit, Lingkungan Pura Dalem Jagaraga di Kecamatan Sawan, Lingkungan Pura Meduwe Karang di Kecamatan Kubutambahan, Eks Pelabuhan Buleleng, Tugu Singa Ambara Raja, Gedong Kertya, Museum Buleleng, di Kecamatan Buleleng, Lingkungan Ponjok Batu, pemandian kuda, Desa Tua Sembiran, Pacung, Madenan dan Desa Tua Julah di Kecamatan Tejakula; dan
3. Wisata buatan meliputi: Bendung Renon di Kecamatan Gerokgak, rencana Bendungan Titab di Kecamatan Seririt dan Kecamatan Busungbiu, Perkebunan Rakyat komoditas Anggur di Desa Dencarik Kecamatan Banjar, Tugu Tri Yuda Sakti di Kecamatan Sukasada.;

- kawasan peruntukan pertambangan merupakan pertambangan skala kecil meliputi :
 - a. lokasi kawasan pertambangan batuan tersebar di wilayah kecamatan sesuai dengan potensi masing- masing meliputi: pertambangan batu kapur, batu andesit dan batu mulia di Kecamatan gerokgak, batu apung, batu merah dan batu lahar, batu andesit di Kecamatan Kubutambahan, batu pilah dan batu andesit di Kecamatan Tejakula, tanah liat dan batu andesit di Kecamatan Buleleng dan Seririt, dan ditegaskan lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang

Kawasan;

- b. Lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya mengacu pada ketentuan penatagunaan air; dan
- c. kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai di perairan Laut Bali sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.;
- kawasan peruntukan industry meliputi :
 - kawasan peruntukan aneka industry kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang; dan
 - sentra-sentra industri kecil. sentra-sentra industri kecil kreatif dan kerajinan rumah tangga, makanan olahan dan unggulan lainnya lokasinya tersebar pada kawasan permukiman; dan pengembangan agroindustri di Kawasan Agropolitan Depeha, Tista, Banjar dan Pancasari;
- kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan seluas 10.960,72 ha (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua hektar) atau 8,03% (delapan koma nol tiga persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi :
 - a. Kawasan permukiman perkotaan kawasan perkotaan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, beserta penyediaan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan, terdiri atas:

- kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKW di Perkotaan Singaraja;
- Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKL di Perkotaan Seririt; dan
- kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPK meliputi kawasan perkotaan Gerokgak, Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Kalibukbuk, Pancasari, Kubutambahan, Sawan, Tejakula.; dan
- b. kawasan permukiman perdesaan bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL, kawasan agropolitan maupun kawasan perdesaan murni, yang sebarannya mencakup seluruh pemusatan permukiman pada desa- desa yang berfungsi PPL, agropolitan dan kawasan perdesaan lainnya;
- kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan meliputi :
 - a. fasilitas perdagangan dan jasa;
 - b. fasilitas perkantoran pemerintahan;
 - c. fasilitas pendidikan;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. fasilitas peribadatan; dan
 - f. fasilitas rekreasi dan olah raga.
- kawasan peruntukan lainnya terdiri atas :
 - kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
 - Kodim 1609/Singaraja di Kecamatan Buleleng.
 - Koramil yang terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Buleleng.

- Yonif 900/Raider di Kecamatan Buleleng
- Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di kawasan Pulaki Kecamatan Gerokgak
- Secata, Rindam IX/Udayana di Kecamatan Buleleng.
- Kompi Bantuan di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan;
- kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang luasnya minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yang berfungsi PKW, 40% dari luas kawasan perkotaan yang berfungsi PKL dan 50% dari luas kawasan perkotaan yang berfungsi PPK.
- kawasan minapolitan terdiri atas :
 - a. kawasan minapolitan di Kecamatan Gerokgak;
 - b. kawasan minapolitandi KecamatanSawan danKubutambahan; dan
 - c. kawasan minapolitan di Kecamatan Tejakula;
- kawasan agropolitan terdiri atas :
 - a. kawasan agropolitan Tista di Kecamatan Busungbiu;
 - b. kawasan agropolitan Banjar di Kecamatan Banjar;
 - c. kawasan agropolitan Depeha di Kecamatan Sawan, Kubutambahan dan Tejakula; dan
 - d. kawasan agropolitan Pancasari di Kecamatan Sukasada.
- kawasan andalan merupakan penegasan dari kawasan andalan nasional meliputi kawasan andalan Singaraja dan sekitarnya, dengan sektor unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata.

2.1.11. Demografi

a. Jumlah, Sebaran dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan dan dinamika penduduk yang terjadi di suatu wilayah akan memberi dampak dan pengaruh pada perkembangan di wilayah tersebut. Perubahan sosial kependudukan akan mempengaruhi strategi dan kebijakan yang digunakan dalam pengembangan satu wilayah, termasuk mengenai jumlah penduduk dan kemudian tingkat kepadatan penduduk.

Jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng cenderung meningkat setiap tahunnya. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng dari per tahun 2020 (September)-2021 (Juni) adalah 2.1%. (data versi BPS Kabupaten.Buleleng) Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Buleleng, diikuti Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt. Ketiga kecamatan secara umum sudah berkembang menjadi kawasan perkotaan, terutama di Buleleng dan sebagian Seririt dan Gerokgak. Jika dilihat dari pola perkembangan perumahan di Kabupaten Buleleng, terdapat indikasi perkembangan perumahan mengarah ke kecamatan-kecamatan perbatasan Kabupaten Buleleng.

Adapun kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Busungbiu, diikuti oleh Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sawan dan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan data kepadatan penduduk di bawah ini, terlihat bahwa persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng cenderung berkelompok antara daerah Barat, Timur Selatan dan Utara. Selain variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, kepadatan penduduk yang berkelompok juga mengindikasikan adanya keterpusatan aktivitas di wilayah tersebut. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi *threat* bagi Kabupaten Buleleng terkait indikasi ketimpangan wilayah

yang ada. Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menyiapkan diri terkait meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya di kecamatan dengan karakteristik perkotaan, tetapi juga di beberapa kecamatan yang diprediksi akan menjadi kecamatan dengan karakteristik perkotaan sebagai akibat dari adanya amanat perencanaan pembangunan secara agregat. Seperti perencanaan pembangunan Bandara Baru Bali Utara di wilayah Barat, pembangunan sarana pendidikan tinggi di Kecamatan Buleleng, dan lain-lain. Berikut ini adalah data jumlah penduduk per kecamatan dari tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng per
Kecamatan Tahun 2017-2021

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Gerokgak	83.890	84.510	85.140	97.550	99.130
2	Seririt	72.570	72.900	73.230	93.410	95.668
3	Busungbiu	40.820	40.950	41.110	52.691	53.900
4	Banjar	72.260	72.680	73.060	86.210	87.680
5	Sukasada	77.090	77.700	78.280	89.771	91.280
6	Buleleng	136.790	137.780	138.640	150.210	151.748
7	Sawan	60.480	60.700	60.930	80.170	82.260
8	Kubutambahan	55.560	55.770	55.980	68.780	70.110
9	Tejakula	54.150	54.210	54.230	73.021	74.869
Jumlah		653.600	657.200	660.600	791.813	806.645

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka,2021

Selanjutnya sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan berkisar 53.900-151.748 ribu jiwa, terbanyak di Kecamatan Buleleng, yaitu 151.748 ribu jiwa atau 18,81% dan terendah di Kecamatan Busungbiu (53.900 ribu jiwa atau 6,68%). Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 591 jiwa/km².Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng disajikan pada Tabel 2.11

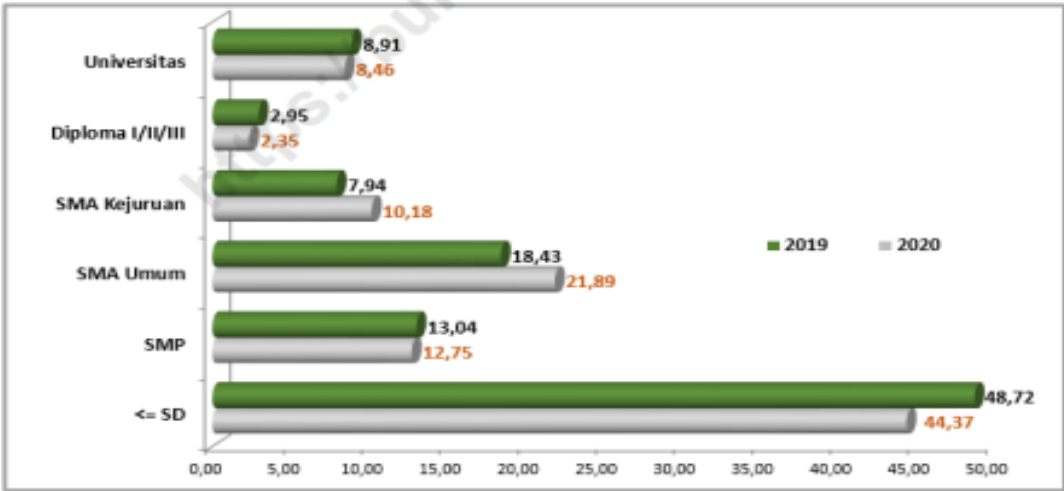
Tabel 2.11
 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulelengper Kecamatan
 Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Gerokgak	99.130	356.57	278
2	Seririt	95.668	111.78	856
3	Busungbiu	53.900	196.62	274
4	Banjar	87.680	172.60	508
5	Sukasada	91.280	172.93	528
6	Buleleng	151.748	46.94	3.233
7	Sawan	82.260	92.52	889
8	Kubutambahan	70.110	118.24	593
9	Tejakula	74.869	97.68	766
	Total	806.645	1.365,88	591

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2021

Selanjutnya, untuk melihat karakteristik masyarakat di Kabupaten Buleleng, perlu diketahui persentase pendidikan akhir penduduk di atas 15 tahun. Identifikasi tingkat pendidikan ini dilakukan karena tingkat pendidikan masyarakat dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pola pikir, cara pandang dan juga sebagai indikasi proses peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah data pendidikan akhir tersebut:

Gambar 2.9
 Persentase Angkatan Kerja menurut Ijazah tertinggi yang dimiliki, tahun 2019-2020

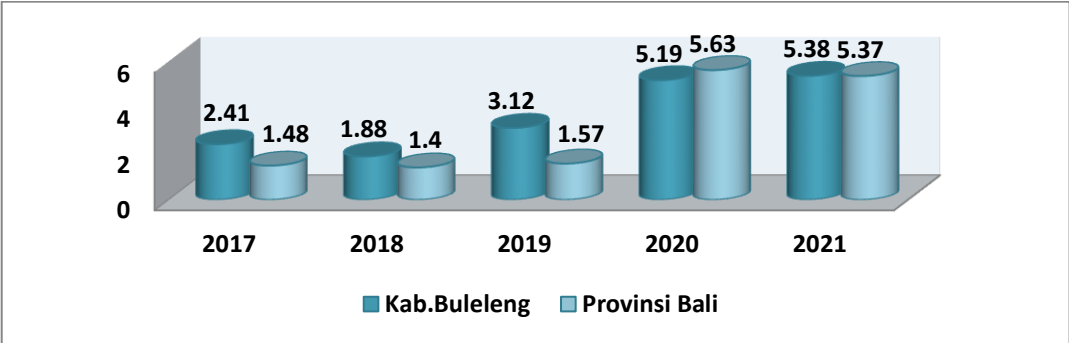


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2019-2020

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, data Sakernas 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Buleleng berlatar belakang pendidikan SD kebawah yakni sebesar 44,37 persen. Proporsi terbanyak selanjutnya adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan SMA Umum Sederajat, yakni sebanyak 21,89 persen dan diikuti dengan angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan SMP sederajat sebanyak 12,75 persen.

Distribusi penduduk angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang telah ditamatkan pada tahun <https://bulelengkab.bps.go.id> Penduduk Usia Kerja 45 2020 mengalami perubahan yang cukup signifikan pada beberapa kategori jenjang pendidikan, jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019. Pada tahun 2020, proporsi angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan SMA/MA Umum dan SMA Kejuruan mengalami peningkatan sedangkan persentase angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan SD kebawah mengalami penurunan. Jika ditelaah lebih lanjut, data tersebut mengindikasikan bahwa warga Kabupaten Buleleng yang kembali ke kampung halaman akibat terpukulnya sektor pariwisata oleh pandemi COVID-19 sebagian besar adalah angkatan kerja yang berlatar pendidikan SMA Umum atau SMA Kejuruan. Warga Kabupaten Buleleng yang merantau di wilayah Bali bagian selatan pada umumnya bekerja pada sektor pariwisata dimana para pekerjanya banyak yang berasal dari lulusan SMK atau kursus kepariwisataan.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buleleng meningkat sebesar 2,07%, dari 3.12% pada tahun 2019 menjadi 5.19% pada tahun 2020, ditahun 2021 meningkat 0,19% dari 5,19% tahun 2020 menjadi 5,38%. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buleleng tersebut masih tinggi dan di atas angka tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali (5.37%) (BPS Kabupaten Buleleng, 2021)



Sumber : BPS Kab.Buleleng, 2021

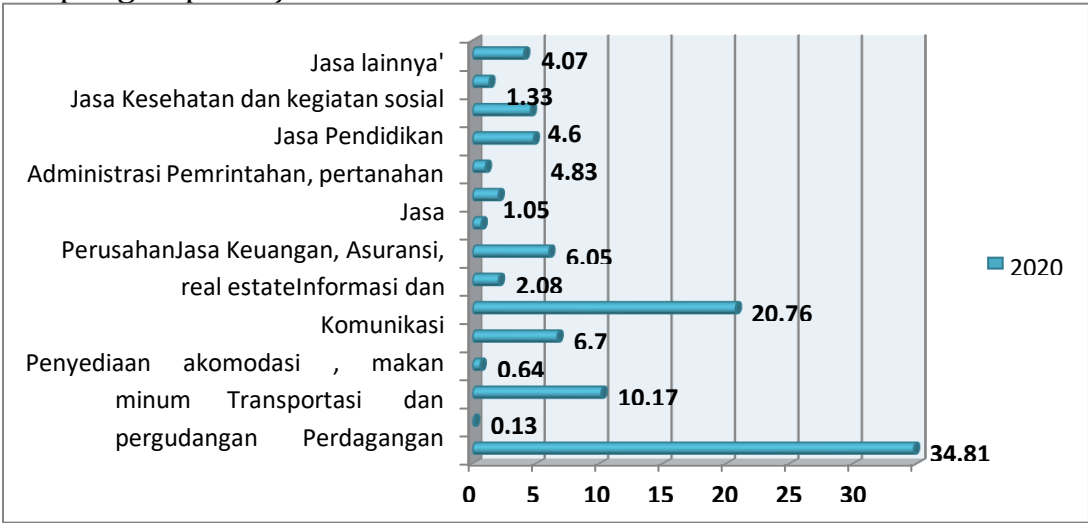
Gambar 2.10

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

Terlihat dari tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buleleng yang masih tinggi dan masih diatas rata-rata Provinsi Bali. Diperlukan berbagai pendekatan dengan mengkolaborasikan peluang dan kelemahan ini, salah satunya adalah melalui pendekatan ekonomi, yaitu penciptaan wirausaha- wirausaha baru.

Selanjutnya karakteristik masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan yang ada, maka dilakukan identifikasi penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan yang dilakukan. Tujuannya, agar diketahui keterhubungan antara karakteristik masyarakat dengan pola pekerjaan yang selama ini dilakukan.

Berikut ini adalah grafik jumlah penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan:



Gambar 2.11

Persentase Penduduk Kabupaten Buleleng Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2020

Menurut data IPM 2021, dari 355.940 penduduk yang bekerja, diketahui persentase penduduk di Kabupaten Buleleng terbanyak berada di sektor pertanian dalam arti luas, yaitu sebesar 34.81%. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB berada diatas sektor tersier yaitu jasa dan sektor sekunder yaitu industri. Sehingga, jika dilihat berdasarkan data di atas sector pertanian arti luas masih menyerap tenaga kerja yang paling tinggi di Kabupaten Buleleng.

Sebaliknya, penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sebesar 10.17%, sementara proporsi industri pada PDRB merupakan proporsi terbesar ketiga setelah sector pertanian dan perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Buleleng. Penduduk yang bekerja di sektor selain pertanian, industry dan perdagangan menempati urutan berikutnya yaitu dengan persentase sebesar antara 0,13-6,70%.

Sehingga, jika melihat dari data demografis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi masyarakat masih belum sepenuhnya mampu masuk ke sektor sekunder dan tersier yang saat ini justru mulai tumbuh cepat di Kabupaten Buleleng. Tingkat pendidikan yang relatif masih rendah memberikan imbas kepada masyarakat untuk memilih aktivitas dan/atau mata pencahariannya.

Sehingga dengan komposisi demografi di Kabupaten Buleleng, maka kebijakan pembangunan ke depan perlu menghubungkan antara kondisi spasial, struktur ekonomi, kondisi demografis (tingkat pendidikan, bonus demografi) dengan aktivitas masyarakat yang akan dibentuk. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kekuatan daerah dan tidak melemahkan fungsi lainnya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu

daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah.

PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.12
 Perkembangan Produk Domestik Regional
 Bruto (atas Harga Konstan 2010) Kabupaten
 Buleleng Tahun2017-2021

No			Tahun					Rata-rata Pertumb uhan 2021 (%)
			2017 (juta)	2018 (juta)	2019 (juta)	2020 (juta)	2021 (juta)	
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.292,34	4.430,69	4.681,44	4.607,12	4.576,84	-0,66
2	B	Pertambang an & penggalian	231,75	218,82	207,35	194,32	189,21	-2,63
3	C	Industri pengolahan	1.197,57	1.266,06	1.326,44	1.239,99	1.258,79	1,52
4	D	Pengadaan listrik dan gas	28,53	30,13	32,31	29,89	29,24	-2,18
5	E	Pengadaa nAir, Pengelola a n Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32,76	33,41	34,32	33,94	29,88	-11,96
6	F	Konstruksi	1.793	1.931,94	2.093,71	2.018,17	2.019,70	0,08
7	G	Perdagang a n Besar danEceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.467,12	2.687,64	2.885,64	2.691,35	2.673,93	-0,65
8	H	Trasportasi dan Pergudangan	270,30	286,66	303,77	264,49	249,99	-5,48
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Maka n Minum	3.415,27	3.684,24	3.866,43	2.974,92	2.660,28	-10,58
10	J	Informasi dan Komunikasi	1.459,96	1.560,86	1.647,76	1.748,24	1.796,24	2,75
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	904,91	922,97	991,53	941,02	896,38	-4,74
12	L	Real Estat	1.094,04	1.137,33	1.183,97	1.190,61	1.204,83	1,19
13	M N	Jasa Perusahaa n	142,58	150,89	159,16	151,26	146,33	-3,26

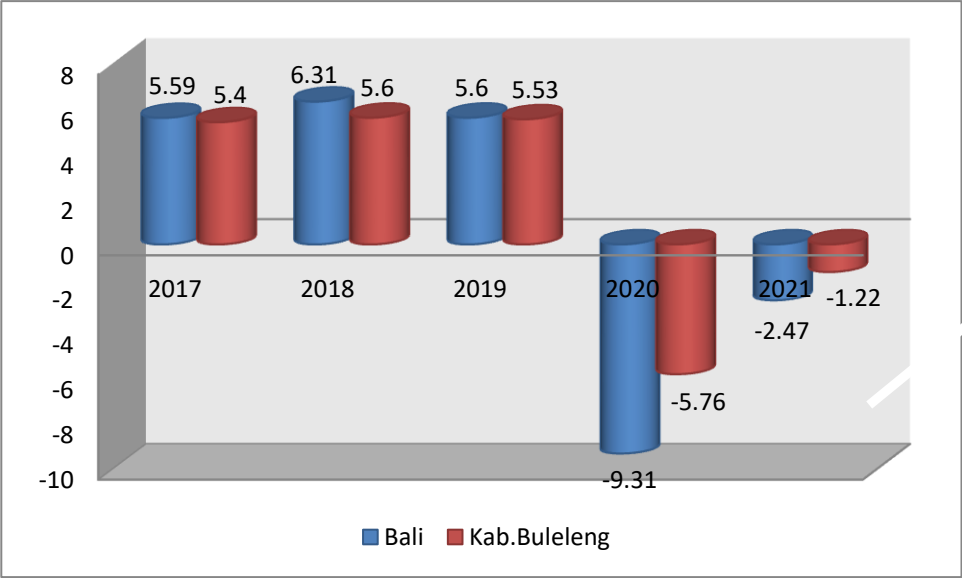
No	Sektor		Tahun					Rata-rata Pertumbuhan 2021 (%)
			2017 (juta)	2018 (juta)	2019 (juta)	2020 (juta)	2021 (juta)	
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.206,70	1.242,76	1.284,22	1.285,14	1.310,58	1,98
15	P	Jasa Pendidikan	1.616,90	1.713,92	1.765,88	1.749,83	1.780,36	1,74
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	473,94	499,47	535,59	546,53	578,32	5,82
17	R S T U	Jasa Lainnya	386,92	403,68	425,80	399,35	396,84	-0,63
		PDRB	21.023,60	22.201,45	23.425,32	22.066,16	21.797,73	-1,22

Sumber: Buleleng Membangun, 2021

Secara fundamental sampai dengan tahun 2019, perekonomian Kabupaten Buleleng mampu melepaskan dari tekanan ekonomi global (krisis finansial) dengan penerapan strategi *Pro Growth*. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mencapai 5,73% rata-rata per tahun. Prestasi ini cukup membanggakan karena berada di atas pencapaian rata-rata Provinsi Bali dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh pertumbuhan masing-masing sector yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: (i) sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tinggi, (ii) sektor ekonomiyang mengalami pertumbuhan sedang, dan (iii) sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang rendah. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang tinggi, meliputi antara lain: sektor Konstruksi (8,37%), jasa Keuangan dan

asuransi (7,43%), Perdagangan besar dan eceran (7,37%), Pengadaan listrik dan gas (7,24%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,23%).

Sementara sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan sedang adalah sektor penyediaan akomodasi (4,95%), transportasi dan pergudangan (5,97%), informasi dan komunikasi (5,57%), jasa perusahaan (5,48%), industri pengolahan (4,77%), pertanian, kehutanan dan perikanan (5,66%), real estate (4,10%) dan jasa lainnya (5,48). Sektor tersebut disusul oleh sektor lainnya; pertambangan dan pengolahan (-5,24%), dan administrasi pemerintahan (3,,34%), jasa pendidikan (3,03%) dan pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang (2,71%). Namun kondisi berbeda terjadi diawal tahun 2020 dan masih berlanjut di tahun 2021, sejalan dengan merebaknya Pandemic Covid-19 yang melanda di tanah air, termasuk Kabupaten Buleleng berakibat kepada pertumbuhan ekonomi berkontraksi. mengalami perlambatan diangka -1,22% di tahun 2021.

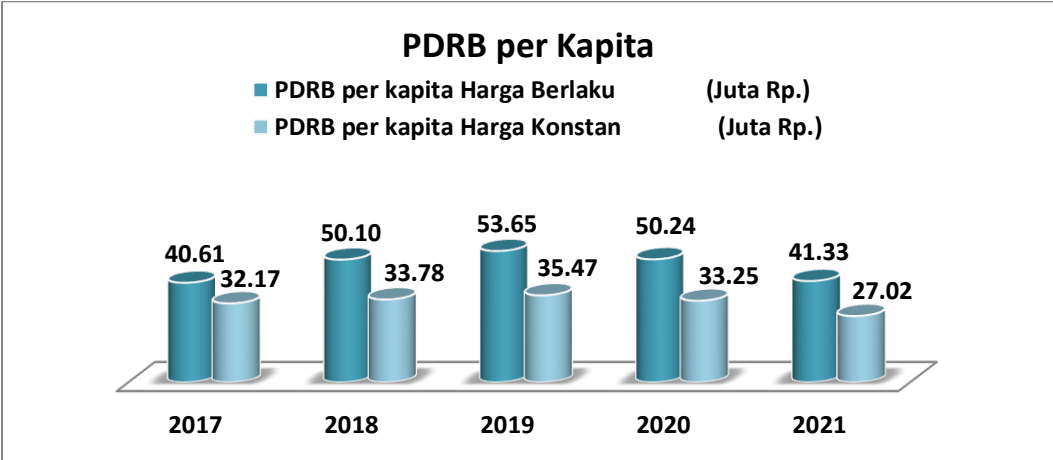


Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

b. PDRB per Kapita

Pada tahun 2017, PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp.40,6 juta meningkat menjadi sekitar Rp 41,33 juta pada tahun 2021. Sedangkan, PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng atas dasar harga konstan pada tahun 2017 mencapai sekitar Rp.32,17 juta menurun menjadi sekitar Rp 27,02 juta pada tahun 2021. Dimana PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng masih berada di bawah rata-rata provinsi, akan tetapi mengalami penurunan yang tajam ditahun 2021.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng; Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2022

Gambar 2.13
PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2021

c. Struktur Ekonomi Daerah

Berbeda dengan daerah lainnya di Provinsi Bali, struktur ekonomi Kabupaten Buleleng masih bertumpu pada peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam pembentukan PDRB, di mana pada tahun 2021, sektor ini telah memberi kontribusi sebesar 22,57%, walaupun kontribusinya relatif dinamis. Dalam waktu sama, beberapa sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB antara lain; penyediaan akomodasi dan makanan minuman (13,20%), perdagangan besar dan eceran (11,89%), dan konstruksi (9,60%).

Sementara itu, sektor lain yang memberi sumbangan yang sedang antara lain; sektor jasa pendidikan (8,14%),

industri pengolahan (6,09%), infomasi dan Komunikasi (6,36%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (5,78%), Real Estate (4,86%), Jasa Keuangan dan Asuransi (4,16%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (2,56%), Jasa Lainnya (1,87%), dan transportasi dan pergudangan (1,06%). Sedangkan sektor yang memberi kontribusi kecil di bawah 1,00%, meliputi: Pertambangan & penggalian, pengadaan listrik dan gas, dan pengadaan air pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, dan jasa perusahaan.

Kondisi ini memberi indikasi bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi pergesaran struktur ekonomi yang mengarah pada struktur ekonomi modern yang ditopang oleh pertanian yang tangguh.

Tabel 2.13
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
(Harga Berlaku) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

No	Sektor		2017 (Milyard Rp)	2018 (Milyard Rp)	2019 (Milyard Rp)	2020 (Milyard Rp)	2021 (Milyard Rp)	Kontribusi %
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.587,61	7.000,73	7.452,53	7.410,76	7.523,88	22,57
2	B	Pertambangan & penggalian	334,93	338,32	322,78	305,00	301,18	0,90
3	C	Industri pengolahan	1.776,03	1.942,16	2.068,86	1.964,03	2.030,75	6,09
4	D	Pengadaan listrik dan gas	50,91	56,05	61,23	56,71	55,48	0,17
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41,61	42,50	43,73	43,52	38,75	0,12
6	F	Konstruksi	2.536,54	2.850,61	3.172,30	3.107,41	3.199,94	9,60
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.465,57	3.844,16	4.197,50	3.949,04	3.963,93	11,89
8	H	Transportasi dan Pergudangan	358,82	388,52	419,63	370,39	353,10	1,06

No	Sektor		2017 (Milyard Rp)	2018 (Milyard Rp)	2019 (Milyard Rp)	2020 (Milyard Rp)	2021 (Milyard Rp)	Kontribusi %
9	I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	5.625,86	6.176,36	6.609,02	4.936,39	4.398,86	13,20
10	J	Informasi dan Komunikasi	1.642,45	1.792,50	1.918,29	2.041,97	2.119,35	6,36
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.287,27	1.353,84	1.486,06	1.368,96	1.387,82	4,16
12	L	Real Estat	1.373,67	1.452,81	1.535,73	1.575,25	1.619,75	4,86
13	M · N	Jasa Perusahaan	203,74	220,71	236,80	228,65	227,30	0,68
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.588,57	1.719,66	1.812,45	1.873,81	1.928,30	5,78
15	P	Jasa Pendidikan	2.237,08	2.442,53	2.614,36	2.653,89	2.713,61	8,14
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	647,03	707,67	767,03	802,13	852,36	2,56
17	R · S · T · U	Jasa Lainnya	561,06	597,48	644,01	618,27	622,93	1,87
	PDRB		30.318,76	32.926,63	35.362,32	33.306,17	33.337,29	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng;
Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2022

Tabel 2.14
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional
Bruto (Harga Berlaku) Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2021

No	Sektor		2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %
1	A	Pertanian. Kehutanan, dan Perikanan	21,73	21,26	21,07	22,25	22,57
2	B	Pertambangan & penggalian	1,10	1,03	0,91	0,92	0,90
3	C	Industri pengolahan	5,86	5,90	5,85	5,90	6,09
4	D	Pengadaan listrik dan gas	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

No		Sektor	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %
5	E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,12	0,13	0,12
6	F	Konstruksi	8,37	8,66	8,97	9,33	9,60
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,43	11,67	11,87	11,86	11,89
8	H	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,18	1,19	1,11	1,06
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,56	18,76	18,69	14,82	13,20
10	J	Informasi dan Komunikasi	5,42	5,44	5,42	6,13	6,36
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,25	4,11	4,20	4,11	4,16
12	L	Real Estate	4,53	4,41	4,34	4,73	4,86
13	M N	Jasa Perusahaan	0,67	0,67	0,67	0,69	0,68
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5,22	5,13	5,63	5,78
15	P	Jasa Pendidikan	7,38	7,42	7,39	7,97	8,14
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,13	2,15	2,17	2,41	2,56
17	R S T U	Jasa Lainnya	1,85	1,81	1,82	1,86	1,87
		PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng;
Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2022

Data pada Tabel 2.15 menunjukkan kecenderungan hanya mengalami kontraksi pada sector yang berkontribusi terhadap PDRB dan tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi pada perekonomian Kabupaten Buleleng pada kurun

waktu tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, struktur perekonomian Kabupaten Buleleng didominasi oleh sector pertanian, kehutanan dan perikanan (22,57%), Penyediaan akomodasi makan minum (13,20%), Perdagangan besar dan eceran (11,89%), Konstruksi (9,60%) dan jasa pendidikan (8,14%). Sementara pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Buleleng dibentuk oleh kontribusi oleh sector pertanian, kehutanan dan perikanan (22,25%), Penyediaan akomodasi makan minum (14,82%), Perdagangan besar dan eceran (11,86%), Konstruksi (9,33%) dan jasa pendidikan (7,97%) Kontribusi kategori tersebut selama periode tahun 2017-2021 hanya sedikit mengalami kontraksi pergeseran dari setiap sektor tersebut.

d. Potensi Ekonomi Daerah

Dengan melihat pertumbuhan (*growth*) dan kontribusi (*share*) masing-masing sektor dalam perekonomian dapat diidentifikasi sektor potensial yang dapat diandalkan untuk menopang kehidupan dan penghidupan masyarakat Buleleng pada masa-masa yang datang. Dengan pendekatan ini, peran sektor dapat diklasifikasikan ke dalam:

- Sektor Sangat Potensial, yaitu sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB. Adapun sektor tersebut adalah; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, pengadaan listrik dan gas, konstruksi dan jasa keuangan dan asuransi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
- Sektor Cukup Potensial, yaitu: sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan tinggi, akan tetapi memiliki kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB. Adapun sektor tersebut

adalah sektor informasi dan komunikasi, Transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta jasa lainnya.

- Sektor Potensial, yaitu: sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan rendah akan tetapi memiliki kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB. Adapun sektor tersebut adalah sektor Jasa Pendidikan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.
- Sektor Kurang Potensial, yaitu: sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan rendah dan kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB. Adapun sektor tersebut adalah sektor pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Sejalan dengan itu, dengan menggunakan pendekatan *location quotient* (LQ) dapat teridentifikasi sektor unggulan daerah. Apabila nilai LQ suatu sektor lebih besar dari 1 (satu), maka sektor tersebut dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan. Dengan demikian, sektor unggulan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2020 adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Jasa Lainnya.

e. Laju Inflasi

Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi sering didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi besarnya inflasi, hanya

menggambarkan besarnya perubahan harga. Bisa saja harga sebenarnya masih tergolong rendah akan tetapi jika meningkat dari periode sebelumnya dikatakan inflasi, atau sebaliknya harga yang relatif tinggi dan hanya mengalami sedikit penurunan disebut sebagai deflasi. Tingkat harga dalam definisi inflasi, secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, dalam hal ini indeks harga konsumen (IHK).

Inflasi Kota Singaraja tidak terlepas dari faktor supply dan demand yang terus dijaga kestabilannya, terutama pada kelompok pengeluaran kebutuhan paling pokok dari masyarakat yaitu bahan makanan. Inflasi yang cenderung terkendali dapat berdampak secara tidak langsung pada semakin terkendalinya permasalahan-permasalahan ekonomi makro seperti pengangguran dan kemiskinan.

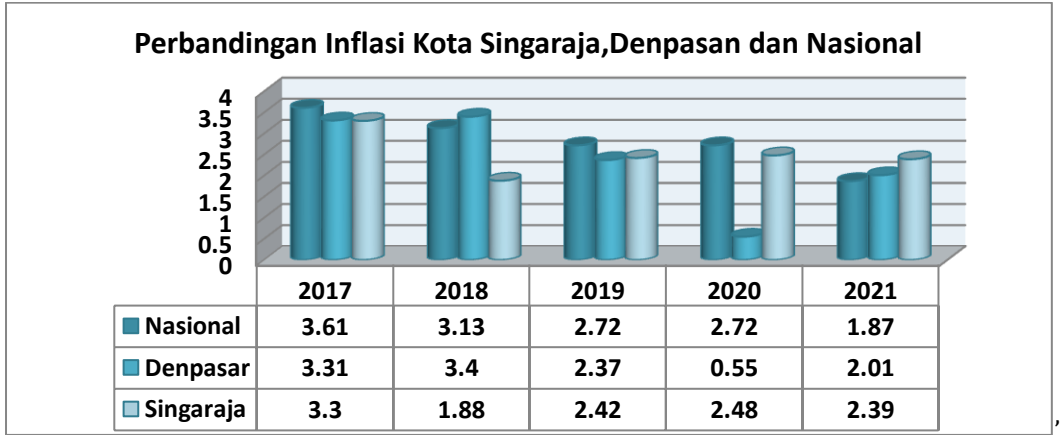
Tabel 2.15
Nilai Inflasi Kota Singaraja Tahun 2017-2021

Kelompok Inflasi	Nilai Inflasi (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	3.61	3.13	2.72	1.68	1,87
Denpasar	3.31	3.40	2.37	0.55	2,01
Singaraja	3.30	1.88	2.42	2.48	2,39

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng;
Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Singaraja pernah mencapai nilai inflasi tinggi yaitu 3.30%, yaitu pada tahun 2017, selanjutnya mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2018 (1,88%) dan meningkat lagi pada tahun 2019 mencapai 2,42%, kemudian peningkatan kembali pada tahun 2020 mencapai 2,48% dan tahun 2021

mengalami penurunan kembali mencapai 2,39%. perlu diwaspadai atau diperlukan terobosan-terobosan ekonomi yang kreatif dalam pembangunan Buleleng, agar inflasi dapat dipertahankan dalam ambang batas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng, guna mendukung kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.14
Perbandingan Inflasi Kota Singaraja, Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menjadi salah satu agenda penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan manusia yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan manusia didalamnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Adanya kemajuan di bidang pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dari tahun ke tahun kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Buleleng menunjukan kecenderungan membaik. Ini tercermin dari kembali naiknya Indeks Pembangunan Manusia 2021 sebesar

0,01 poin ke level 72,56 dari tahun sebelumnya. Peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah, maupun hidup layak semakin panjang.

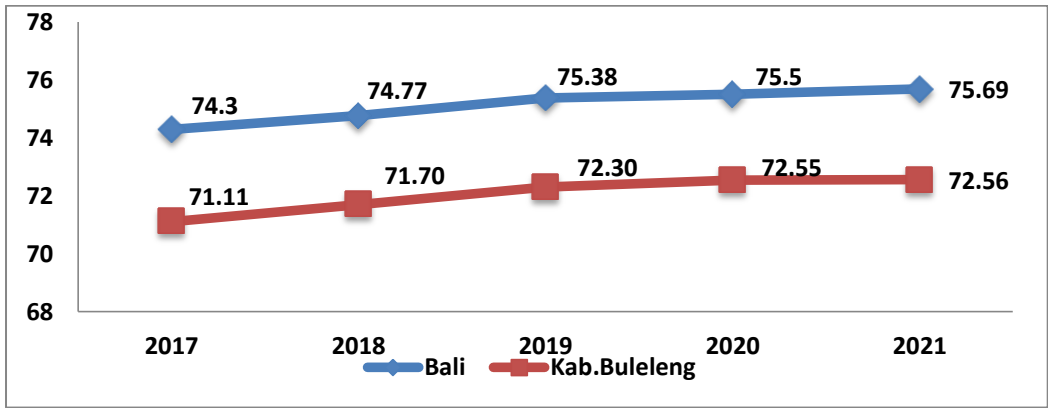
Apabila ditinjau berdasarkan indikator pembentuknya, IPM Kabupaten Buleleng terbentuk dari nilai angka harapan hidup yang mencapai 71,95 tahun sebagai indikator dimensi kesehatan. Dimensi pengetahuan dibagi dalam indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Pada tahun 2021, anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,08 tahun atau sampai jenjang diploma I. Harapan lama sekolah menjadi sinyal positif semakin banyak penduduk yang bersekolah. Rata-rata penduduk Buleleng usia 25 tahun ke atas juga telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP Kelas 1. Sebagai indikator standar hidup layak, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Buleleng mencapai angka 13,362 juta rupiah per tahun. Pengeluaran perkapita mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga, hal tersebut perlu menjadi perhatian dalam dokumen RPD ini. Mengingat, ujung dari perencanaan pembangunan daerah adalah kesejahteraan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dimana salah satu alat pengukurannya adalah IPM.

Tabel 2.16
Komponen IPM Tahun 2017-2021

No	Tahun	Umur Harapan Hidup	Harapan lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per kapita pertahun (dlm juta Rp)
1	2017	71,14	12,62	7,03	12.995
2	2018	71,36	12,89	7,04	13.235
3	2019	71,68	12,91	7,08	13.780
4	2020	71,83	13,07	7,24	13.463
5	2021	71,95	13,08	7,25	13,362

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng; Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2022

Sementara itu untuk perkembangan IPM Kabupaten Buleleng dan komparasinya dengan Provinsi Bali dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng;
Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2022

Gambar 2.15
IPM Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali 2017-2021

Walaupun IPM Kabupaten Buleleng jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali masih berada di bawahnya, akan tetapi setiap tahunnya IPM Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan dan tidak ada yang menurun. Artinya terdapat peningkatan dan/atau pertumbuhan kualitas hidup masyarakat. Kemudian jika melihat kelompok, kategori atau klasifikasi IPM, Kabupaten Buleleng masuk ke dalam kelompok tinggi dengan nilai IPM antara 70-80. pada tahun 2017- 2021.

b. Kemiskinan dan Ketimpangan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Buleleng terus meningkat sebanding dengan semakin tingginya standar pengeluaran penduduk. Namun demikian dengan garis kemiskinan yang semakin tinggi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng kecenderungannya semakin rendah. Kecenderungan ini tentu saja merupakan hal yang baik karena secara

kualitatif dan kuantitatif kondisi masyarakat setempat bertambah baik.

Dengan melihat pada indikator garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, maka dapat dikatakan bahwa standar kehidupan di Kabupaten Buleleng semakin tinggi dan sekaligus jumlah dan persentase penduduk miskinnya perlahan mulai menurun kecuali ditahun 2020 dengan adanya pandemic Covid-19 yang melanda menyebabkan keterpurukan pada berbagai sektor ekonomi, tingkat pengangguran mengalami lonjakan dan juga meningkatnya angka kemiskinan daerah.

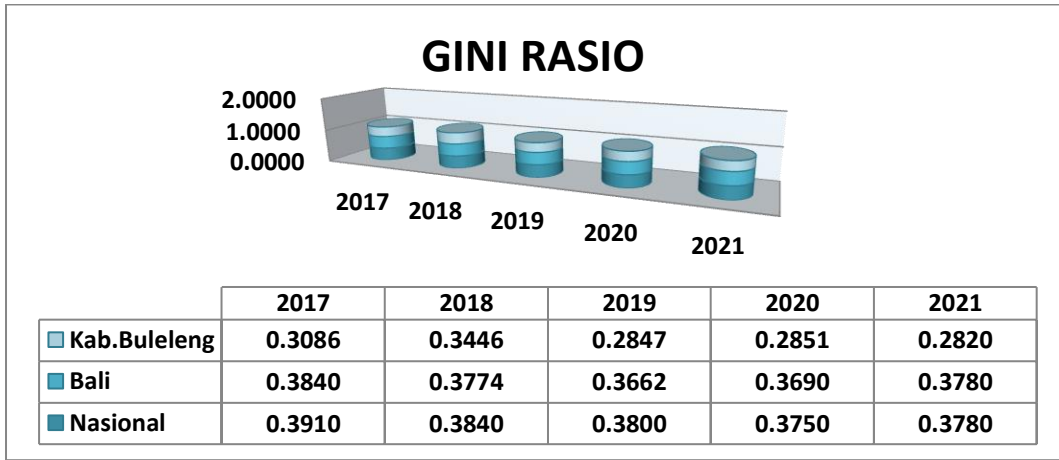
Tabel 2.17
Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2017- 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2017	372.399	37.480	5.74
2018	395.678	35.200	5.36
2019	401.377	34.260	5.19
2020	424.602	35.250	5.32
2021	461.018	40.920	6,12

Sumber : Buleleng Membangun,2021

Kesejahteraan di Kabupaten Buleleng akan lebih baik jika tren peningkatan kualitas hidup dan penurunan kemiskinan disertai dengan adanya pemerataan kesejahteraan tersebut. Ketimpangan dalam suatu wilayah dapat dilihat dari koefisien gini, yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan). Selama tahun 2017-2021 angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,

meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Pada tahun 2021, angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng sebesar 0,2820 menurun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,2851, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Buleleng semakin menurun atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin merata. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka Nasional sebesar 0,3780 dan angka Provinsi Bali sebesar 0,3780 Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng;
Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2022
Gambar 2.16
Indeks Gini Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kegiatan kesenian di Kabupaten Buleleng relatif berkembang namun belum optimal, baik dari jumlah kegiatan maupun skala atau kualitas keseniannya. Pada dasarnya kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Buleleng merupakan kekuatan dalam pengembangan pariwisata daerah untuk mendukung kekayaan sumber daya alam yang ada.

Kuantitas sarana kesenian dan kebudayaan juga masih belum tersedia dalam kuantitas, sebaran dan kualitas yang baik. Gedung kesenian yang representatif hanya terdapat di sekitar kawasan perkotaan. Sementara itu kegiatan olah raga sudah berkembang cukup baik. Sarana olah raga di Kabupaten Buleleng

relatif sudah tersedia cukup baik, sebagai hasil dari pembangunan sarana untuk Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) sebelumnya.

Perkembangan budaya di Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari perkembangan dan peradaban budaya Hindu, di mana hal ini disebabkan bahwa mayoritas penduduk beragama Hindu yaitu 89,37% dari jumlah penduduk atau sekitar 650.100 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk tahun 2016. Dengan demikian, porsi pelaksanaan adat istiadat di masyarakat Buleleng, terutama yang beragama Hindu berpengaruh pada beberapa isu strategis di Buleleng, yaitu Seni Budaya. Di bidang kesenian, dari 9 (sembilan) kecamatan terdapat 51 jenis kesenian dan jumlah kelompok kesenian mencapai 2.457 kelompok, yang tersebar di Kabupaten Buleleng (Disbudpar, Buleleng Dalam Angka, 2017), memerlukan pembinaan secara kontinu dan harus disediakan anggaran yang memadai baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat pelaku kesenian. Dalam mendukung pengembangan dan pemertahanan budaya Kabupaten Buleleng juga memiliki 169 Desa Adat (*Pakraman*), yang dapat secara konsisten mempertahankan seni dan Kebudayaan di Kabupaten Buleleng. Perkembangan seni, budaya dan olah raga dari 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Gerokgak	298	8	22	10
2	Seririt	314	21	20	8
3	Busungbiu	214	16	14	8
4	Banjar	262	17	19	8
5	Sukasada	296	19	18	6

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
6	Buleleng	297	24	53	24
7	Sawan	341	10	18	9
8	Kubutambahan	271	13	16	9
9	Tejakula	196	10	18	7
	Jumlah	2.489	138	198	89

Sumber: Buleleng Membangun 2021

Dilihat persebaran di wilayah kecamatan, tentang perkembangan seni, budaya dan olah raga pada data tahun 2016, kepemilikan atas seni, budaya dan olah raga ini sangat bervariasi, dan tidak tersebar secara merata. Pada jumlah group kesenian per 1000 penduduk Kecamatan Sawan memiliki paling banyak (341 group) dan paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Tejakula yaitu 169 group kesenian. Sedangkan klub olah raga yang paling banyak ada di Kecamatan Buleleng mencapai 53 klub dan paling sedikit Kecamatan Busungbiu yaitu 14 klub. Keberadaan gedung dan sarana kesenian dan olah raga juga sangat berpengaruh pada perkembangan seni dan kegiatan olah raga penduduk. Gedung kesenian paling banyak berada di Kecamatan Buleleng, paling sedikit di Kecamatan Gerokgak. Sedangkan, gedung olah raga paling banyak ada di Kecamatan Seririt, dan dua kecamatan tidak memiliki gedung olah raga, yaitu Kecamatan Gerokgak dan Busungbiu.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Kondisi pelayanan umum di Kabupaten Buleleng difokuskan pada gambaran kondisi untuk berbagai aspek pelayanan dalam urusan wajib dan urusan pilihan sebagai berikut.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Gambaran kondisi pelayanan umum dalam urusan

wajib ini terutama mencakup pendidikan, kesehatan dan bidang atau urusan lainnya.

2.3.1.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan pendidikan di Kabupaten Buleleng adalah tingkat partisipasi pendidikan diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Buleleng tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	68.698	68.485	68.392	68.392	67.909
1.2.	Jumlah penduduk ke-lompok usia 7-12 thn	68.932	71.272	68.392	68.392	67.936
1.3.	APS SD/MI	99,66%	96,09%	97,95%	97,95%	99.96%
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun	33.586	33.806	32.186	32.186	32.161
2.2.	Jumlah penduduk ke-lompok usia 13-15 thn	35.391	35.781	33.749	33.749	35.400
2.3.	APS SMP/MTs	94,90%	94,48%	95,64%	95,64%	90.85%

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buleleng,2021

Berdasarkan tabel di atas, pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Buleleng, persentase pencapaian APS SD/MI menunjukkan mengalami peningkatan, dimana tahun 2016 sebesar 99,66% dan pada tahun 2020 mencapai 99,96%. Demikian juga untuk kelompok umur 13-15 tahun mengalami pluktuatif dimana persentase pencapaian APS SMP/MTs tahun 2016 sebesar 94,90% dan pada tahun 2020 mencapai 90,85%.

Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah

(APS) baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Buleleng tahun 2016-2020 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) per Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah murid usia 7-12 th	Jumlah penduduk kelompok umur usia7-12 th	APS SD/MI (%)	Jumlah murid usia 13-15 th	Jumlah penduduk kelompok umur usia13-15 th	APS SMP/MTs (%)
1	Gerokgak	7.601	7.691	98.83	3.222	4.965	64.69
2	Seririt	7.063	7.146	98.84	2.861	3.781	75.67
3	Busungbiu	4.270	4.321	98.82	1.866	1.812	102.98
4	Banjar	7.260	7.346	98.83	3.300	3.512	98.94
5	Sukasada	7.947	8.040	98.84	2.486	4.417	56.28
6	Buleleng	14.778	14.178	104.23	10.446	7.741	134.94
7	Sawan	6.684	6.763	98.83	2.832	3.263	86.79
8	Kubutambahan	6.375	6.450	98.84	2.756	2.998	91.93
9	Tejakula	5.931	6.001	98.83	2.392	2.910	82.20
	Jumlah	67.909	67.936	99.96	32.161	35.400	90.85

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buleleng,2021(diolah)

Jika dilihat Angka Partisipasi Sekolah (APS) per kecamatan di Kabupaten Buleleng, maka dapat disampaikan bahwa angka partisipasi sekolah untuk tingkat SD/MI, Kecamatan Busungbiu mencapai APS yang paling rendah yaitu 98,82%, sedangkan yang paling tinggi dicapai oleh Kecamatan Buleleng dengan APS mencapai 104,23%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs APS yang paling rendah adalah Kecamatan Sukasada, yaitu 56,28% dan APS tertinggi dicapai oleh Kecamatan Buleleng, yaitu mencapai 134,94%.

b. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar bagi anak sejak 3 (tiga) hingga usia 6 (enam) tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasamani dan rohani agar anak

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur forml, non formal dan informal.

Perkembangan pendidikan anak usia dini diKabupaten Buleleng dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan sejak dini menjelang masuk ke jenjang pendidikan dasar. Walaupun dari sisi jumlah sekolah PAUD swasta datanya fluktuatif sedangkan PAUD Negeri menunjukkan tren meningkat. Perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

No.	Uraian					
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Sekolah	210	358	358	265	223
	PAUD (buah)					
	- Swasta	193	333	333	240	193
	- Negeri	17	25	25	25	30

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab.Buleleng, 2021(diolah)

Berdasarkan data Tabel 2.22, bahwa Jumlah PAUD Tahun 2016 sejumlah 210 buah, meningkat pada Tahun 2020 menjadi 223 buah. Kondisi tersebut menggambarkan, bahwa pembangunan Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Buleleng telah berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Bunda PAUD Kabupaten Buleleng yang dengan gencar melakukan program-program inovatif untuk perkembangan PAUD di Kabupaten Buleleng diantaranya, merancang program satu desa satu PAUD, mengubah status TK swasta menjadi TK Negeri, serta penyelenggaraan lomba-lomba

kreativitas anak TK. Namun Upaya dimaksud perlu lebih ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya PAUD, pemenuhan sarana prasarana serta peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD.

c. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar/MI atau SMP/MTs per 10.000 jumlah penduduk usia dasar (7-12 tahun) dan Umur 13-15 Tahun (SMP/MTs) yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Buleleng. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan bersangkutan. Tabel rasio ketersediaan sekolah disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.22
 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
 Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	481	480	483	483	484
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	70.410	75.331	69.683	69.683	67.936
1.3.	Rasio (%)	71,44	66,77	69,31	69,31	71.24
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Gedung Sekolah	73	73	76	76	74
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	37.190	34.717	33.749	33.749	35.400
2.3.	Rasio (%)	22,86	24,20	22,52	22,52	20.90

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buleleng,2021(diolah)

Dari data yang ada untuk tingkat umur 7-12 tahun daya tampung sekolah terhadap murid sudah memadai dengan rasio 71.24% sampai dengan 71,44%, dan berada di atas rasio ideal (52) per 10.000 penduduk usia 7-12. Sedangkan untuk tingkat umur 13-15 tahun mengalami perubahan secara fluktuatif berkisar rasio 22,86% sampai dengan 20,90% dan masih berada di

bawah rasio ideal 52 atau tersedia 52 SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15, artinya ketersediaan gedung sekolah belum memadai. Sementara itu, distribusi ketersediaan sekolah dan penduduk usia menurut kecamatan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
per Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk kelompok umur usia 7-12 tahun	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk kelompok umur usia 13-15 tahun	Rasio
1	Gerokgak	45	7.691	58.51	8	4.965	16.11
2	Seririt	50	7.146	69.97	7	3.781	18.51
3	Busungbiu	46	4.321	106.46	5	1.812	27.59
4	Banjar	59	7.346	80.32	7	3.512	19.93
5	Sukasada	59	8.040	73.38	10	4.417	22.64
6	Buleleng	83	14.178	58.54	17	7.741	21.96
7	Sawan	48	6.763	70.91	6	3.263	18.39
8	Kubutambahan	47	6.450	72.87	8	2.998	26.68
9	Tejakula	47	6.001	78.32	6	2.910	20.62
	Jumlah	484	67.936	71.24	74	35.400	20.90

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab.Buleleng,2021(diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk sekolah untuk kelompok usia 71,24, rasio paling rendah dicapai oleh Kecamatan Gerokgak yaitu 58,51 dan rasio tertinggi dicapai oleh Kecamatan Busungbiu, yaitu 106,46. Sedangkan untuk tingkat usia 13-15 tahun rasio berkisar 16,11-27,59

d. Rasio Guru/Murid

Rasio guru dan murid dapat berpengaruh pada kualitas pelaksanaan belajar menga jar yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas hasil pendidikan sekolah. Jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.24						
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020						
No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	4.406	4.428	4.446	4.446	3.766
1.2.	Jumlah Murid	68.698	68.485	68.292	68.292	68.381
1.3.	Rasio	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1:18
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.948	2.371	1.935	1.935	1.817
2.2.	Jumlah Murid	33.586	33.806	33.484	33.484	32.741
2.3.	Rasio	1 : 17	1 : 14	1 : 17	1 : 17	1:18

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng,2021(diolah)

Data menunjukkan rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2016 hingga 2020 tampak berfluktuasi pada kisaran 1:15 sampai dengan 1:18. Sementara itu, data menunjukkan rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tampak lebih tinggi, yaitu antara 1:14 sampai 1:18. Hal ini menunjukkan rasio guru dan murid di Kabupaten Buleleng sudah memenuhi harapan, yaitu 1:18 untuk jenjang pendidikan SD/MI dan 1:18 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Sementara itu, jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar per kecamatan di Kabupaten Buleleng tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.25

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar MenurutKecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Guru SD/MI	Jumlah Murid SD/MI	Rasio	Jumlah Guru SMP/MTs	Jumlah Murid SMP/MTs	Rasio
1	Gerokgak	32	7.601	1:24	180	3.222	1 : 20
2	Seririt	38	7.063	1:19	172	2.861	1 : 18
3	Busungbiu	30	4.270	1:13	110	1.866	1 : 18
4	Banjar	44	7.260	1:17	211	3.300	1 : 18
5	Sukasada	48	7.947	1:17	162	2.486	1 : 18
6	Buleleng	78	14.778	1:18	486	10.446	1 : 17
7	Sawan	37	6.684	1:18	180	2.832	1 : 17
8	Kubutambah	36	6.375	1:18	175	2.756	1 : 17
9	Tejakula	30	5.931	1:21	141	2.392	1 : 21
	Jumlah	3.766	67.90	1:18	1.817	32.161	1 : 18

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Buleleng,2021(diolah)

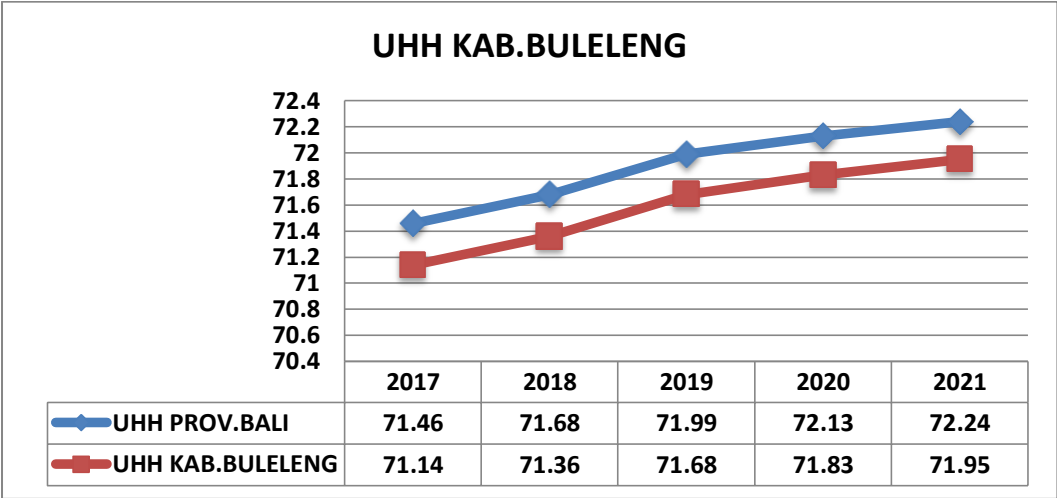
Dilihat dari distribusi di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, masih merata jika dibandingkan dengan jumlah rasio minimal ideal adalah 1:20, rata-rata rasio perbandingan guru dan murid masih di bawah rasio ideal, artinya jumlah guru sudah memadai namun masih perlu didistribusikan secara merata.

2) Kesehatan

Di bidang kesehatan juga merupakan indikator penting dalam mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih baik. Pembentuknya yaitu:

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Peningkatan pelayanan kesehatan, utamanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Kabupaten Buleleng ada beberapa indikator yang dapat dilihat, antara lain Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian IBU (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), sanitasi kesehatan, pelayanan air bersih dan Perilaku yang Berperilaku Hidup Sehat (PHBS). UHH mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kemudahan akses dibidang pelayanan kesehatan. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Buleleng terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 mencapai 71,95 namun masih berada di bawah UHH Provinsi Bali yaitu 72,24.



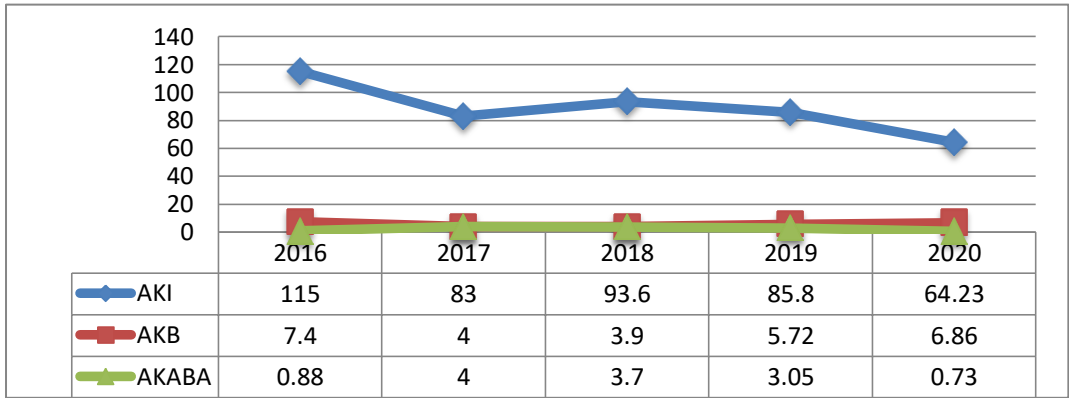
Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Buleleng Membangun, 2021

Gambar 2.17
Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten
Buleleng dan Umur Harapan Hidup Provinsi Bali
Tahun 2017-2021

b. Angka Kematian Ibu, Anak dan Balita

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator kesehatan yang cukup penting, dengan ini dapat diketahui dari jumlah kematian karena kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. AKI merefleksikan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan, yang dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk pelayanan prenatal dan obstetric. Dilihat dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, AKI di Kabupaten Buleleng berkembang secara bervariasi dan cenderung menurun dari tahun 2016-2020, artinya keselamatan dan kesehatan Ibu melahirkan makin baik. Angka kematian ibu pada tahun 2020, adalah 64.23/100.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng).

Demikian juga angka kematian bayi selalu diupayakan agar dapat diturunkan, dimana Angka Kematian Bayi menjadi 6,86 per 1000 KH. Sedangkan Angka Kematian Balita (AKABA), merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, yang dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup diangka 0,73, jika dibandingkan dengan standar SDGs, maka kematian balita di Kabupaten Buleleng dalam kategori rendah (≤ 20), dengan demikian perlu dipertahankan bahkan agar bisa tetap pada kategori rendah (≤ 20). Berikut grafik tentang AKI dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Buleleng.

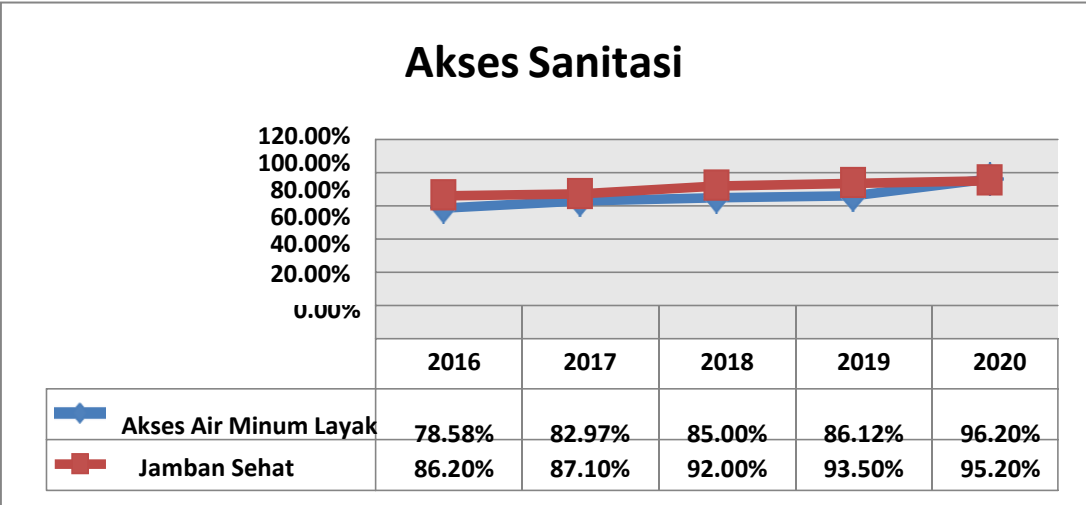


Sumber: Buleleng Membangun, 2021 (diolah)

Gambar 2.18
Perkembangan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kab. Buleleng Tahun 2016-2020

c. **Sanitasi, Air Bersih dan PHBS**

Salah satu Indikator kesehatan adalah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak). Kedua kriteria ini dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR, 2020

Gambar 2.19
Persentase Penduduk Memperoleh Akses Jamban Sehat dan Air Minum Berkualitas Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

Indikator kesehatan berikutnya adalah Penduduk yang Berperilaku Hidup Sehat (PHBS). Rumah tangga dikatakan berPHBS adalah RT yang memiliki beberapa kriteria PHBS, meliputi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menggunakan air bersih, jamban sehat, melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan lain-lain.

d. Perkembangan prevalensi stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan sehingga anak yang stunting cenderung lebih pendek dari anak seusianya. Sesuai surat menteri PPN/Bappenas No. B.198/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019, tgl. 5 April 2019 kabupaten buleleng ditetapkan sebagai salah satu dari 160 Kabupaten/Kota sasaran prioritas intervensi penurunan stunting terintegrasi TH. 2019 . adapun perkembangan revalensi stunting kabupaten buleleng 3 tahun terakhir mengalami penurunan, sesuai dengan data Riskesdas tahun 2018 prevalensi stunting kabupaten buleleng sebesar 20,05%, 2019 turun menjadi 18,84% (sumber data EPPGBM dinas kesehatan) dan 2020 menjadi 7,20 (sumber data EPPGBM dinas kesehatan)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa program

dan kegiatan yang dilakukan dikabupaten buleleng dalam intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive cukup optimal dalam menurunkan kasus stunting.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021
Gambar 2.20
Perkembangan prevalensi stunting Kabupaten Buleleng Tahun 2021

3) **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a) **Kondisi Jalan**

Prasarana infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng terbagi menjadi empat sesuai dengan status kewenangannya, yaitu jalan nasional/jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan non status. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah jalan kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/997/HK/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten adalah sepanjang 1.136,600 km pada tahun 2020. Panjang ini relative tetap dari panjang jalan pada tahun 2019 sepanjang 1.136,600 km sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 620/845/HK/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten. Persentase kondisi jalan kabupaten sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 70,10% atau sepanjang 796,402 km mantap Persentase ini menurun dibandingkan persentase kondisi jalan mantap pada Tahun 2019 sebesar 71,72% atau sepanjang 815,217 km. Namun jumlah ini berkurang dari persentase tahun 2017

sebesar 76,61% atau sepanjang 766,088 km. Penurunan persentase kondisi jalan mantap sebagai akibat dari usia ketahanan struktur jalan yang sudah menurun dan juga bertambahnya jumlah panjang jalan kabupaten pada tahun 2020 dimana kondisi pada jalan yang bertambah tersebut belum mantap. Panjang jalan dan kondisi jalan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.26
Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jalan Kabupaten	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi baik (km)	644,965	644,965	655,940	671,827	669.782
	Persentase (%)	64,50	64,50	58,57	59,110	58,93
2	Kondisi sedang (km)	121,123	121,123	141,32	143,390	126.620
	Persentase (%)	12,11	12,11	12,62	12,62	11,14
3	Kondisi Rusak Ringan	172,876	172,876	195,17	162,460	138.445
	Persentase (%)	17,29	17,29	17,43	14,290	12,18
4	Kondisi Rusak Berat	60,986	60,986	127,51	158,923	201.753
	Persentase (%)	6,10	6,10	11,39	13,98	17,75
5	Kondisi mantap (km)	766,088	766,088	797,260	815,217	796.402
	Persentase (%)	76,61	76,61	71,19	71,72	70,10
Total Panjang Jalan (km)		999,950	999,950	1.119,940	1.136.600	1.136.600

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, Tahun 2021

b) **Kondisi Jembatan**

Prasarana infrastruktur jembatan di Kabupaten Buleleng terbagi menjadi tiga yaitu jembatan nasional, jembatan provinsi, dan jembatan kabupaten. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah jembatan kabupaten dengan total panjang jembatan sebesar 1.224,85 m pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017, panjang jembatan bertambah sepanjang 7m dari panjang jembatan yang sebelumnya sebagai akibat dari penggantian jembatan Tukad Mendaum di Kecamatan Banjar dari 27 mmenjadi 34 m sehingga panjang jembatan pada tahun 2017 menjadi 1.231,85 m. Pada tahun 2018, panjang jembatan menjadi 1.232,85 m, jumlah ini bertambah sepanjang 1 meter dimana terdapat penggantian jembatan Tukad Batupulu di Kecamatan Sukasada.

Kondisi jembatan Kabupaten Buleleng sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 77,21% atau sepanjang 951,85m dalam kondisi mantap. Persentase ini meningkat dari kondisi jembatan mantap pada tahun 2018 sebesar 76,35% atau sepanjang 941,25m. Lebih jelasnya kondisi jembatan pada dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.27
Kondisi Jembatan di Kabupaten Buleleng
Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jembatan Kabupaten	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi baik (m)	454,80	516,40	497,40	508	508
	Persentase (%)	37,13	41,92	40,35	41,21	41,21
2	Kondisi sedang (m)	449,85	449,85	443,85	443,85	443,85
	Persentase (%)	36,73	36,52	36,00	36,00	36,00
3	Kondisi Rusak Ringan	320,20	265,60	291,60	281,00	281,00
	Persentase (%)	26,14	21,56	23,65	22,79	22,79
4	Kondisi Rusak Berat	-	-	-	-	-
	Persentase (%)	-	-	-	-	-
5	Kondisi mantap (m)	904,65	966,25	941,25	951,85	951,85
	Persentase (%)	73,86	78,44	76,35	77,21	77,21
Total Panjang Jembatan (m)		1.224,85	1.231,85	1.232,85	1.232,85	1.232,85

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, Tahun 2021

c) **Kondisi Air Minum**

Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Buleleng ditangani oleh Sistem PDAM dan Sistem Swakelola Masyarakat dalam bentuk lembaga Unit Pengelola Sarana atau Kelompok Pengelola Sarana (UPS/KPS) di tingkat desa/kelompok. Dari jumlah 148 desa/kelurahan, 67 desa/kelurahan sudah mendapat pelayanan air bersih PDAM dan sisanya 81 desa melalui UPS/KPS di tingkat desa/kelompok. Dari 81 desa yang dilayani melalui UPS/KPS terdapat sekitar 25 Kelurahan/Desa, di samping dilayani oleh PDAM juga dilayani melalui UPS/KPS.

Layanan air minum di Kabupaten Buleleng yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Buleleng adalah PDAM Cabang Celukan Bawang, Cabang Seririt, Unit Sambirenteng, Cabang Air Sanih, Cabang Busungbiu, dan Cabang Pancasari. Rendahnya cakupan pelayanan PDAM Buleleng diakibatkan karena faktor topografi wilayah yang

berbukit dan permukiman penduduk yang menyebar membuat PDAM Buleleng belum mampu menjangkau seluruh desa di Kabupaten Buleleng.

Pelayanan air minum perpipaan tahun 2020 di Kabupaten Buleleng sebesar 86,12% meningkat dari pelayanan air minum perpipaan 4 tahun sebelumnya dengan pelayanan PDAM sebesar 33,53% dan pelayanan PAM Desa sebesar 52,59%. Persentase pelayanan air minum non perpipaan untuk tahun 2020 realitif sama dengan tahun sebelumnya sebesar 13,88%. Pelayanan air minum perpipaan tahun 2018 di Kabupaten Buleleng sebesar 85,00% meningkat dari pelayanan air minum perpipaan 4 tahun sebelumnya dengan pelayanan PDAM sebesar 33,46% dan pelayanan PAM Desa sebesar 51,54%. Persentase pelayanan air minum non perpipaan untuk tahun 2018 menurun menjadi sebesar 15,00%, hal ini karena adanya peningkatan jumlah pelanggan air minum PDAM dan PAM Desa di Kabupaten Buleleng. Pelayanan air minum perpipaan tahun 2017 di Kabupaten Buleleng meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 82,97%, dengan pelayanan PDAM sebesar 32,06% dan PAM Desa sebesar 50,91%. Persentase pelayanan air minum non perpipaan untuk tahun 2017 menurun menjadi sebesar 17,03%, hal ini karena pelayanan air minum dari PAM Desa mengalami peningkatan kinerja dan pelanggan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.28

Pelayanan Air Minum di Kab.Buleleng Tahun 2016-2020

No Pelayanan Air		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perpipaan (jiwa)	504.49	542.64	695.56	709.11	711,23
	Persentase (%)	78,58	82,97	85,00	86,12	86,12
	a. PDAM	209.24	209.68	273.82	276.09	276,89
	Persentase (%)	32,61	32,06	33,46	33,53	33,53
	b. PAM Desa	295.24	332.96	421.73	433.02	434,33
	Persentase (%)	45,97	50,91	51,54	52,59	52,59
2	Non Perpipaan	137.55	111.38	122.72	114.31	114,63
	Persentase (%)	21,42	17,03	15,00	13,88	13,88

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, 2021

d) **Irigasi**

Jaringan irigasi yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng melayani 132 buah Daerah Irigasi (DI) dengan berbagai kondisi. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 78,24%. Untuk tahun 2020 Kondisi jaringan rusak ringan adalah sebesar 17,78% dan kondisi jaringan rusak berat sebesar 5,71%. Kondisi jaringan irigasi baik pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 74,78%. Kondisi irigasi rusak ringan adalah sebesar 19,34% dan kondisi rusak berat sebesar 5,79%. Sedangkan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah sebesar 71,62%, kondisi irigasi rusak ringan adalah sebesar 21,39% dan kondisi rusak berat sebesar 6,99%. Lebih jelasnya untuk kondisi irigasi di Kabupaten Buleleng tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng Tahun 201-2021

Kondisi Jaringan Irigasi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kondisi Baik (%)	71,20	71,62	74,78	76,50	78,24
Kondisi Rusak Ringan	21,59	21,39	19,43	17,78	-
Kondisi Rusak Berat (%)	7,21	6,99	5,79	5,71	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng, 2021

e) **Drainase**

Saluran drainase di Kabupaten Buleleng berada pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) jalan nasional, RUMIJA jalan provinsi dan RUMIJA jalan kabupaten dengan total panjang drainase pada Tahun 2020 adalah 1.228.973 m dengan kewenangan penanganan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) sekitar 311.500 m, kewenangan Pemerintah Provinsi sebesar 224.762 m dan kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah 691.711 m. Persentase kondisi baik untuk saluran drainase kewenangan kabupaten adalah sebesar 20,62%, kondisi

sedang sebesar 27,61%, dan kondisi buruk sebesar 51,76%. Sedangkan persentase kondisi keseluruhan saluran drainase yang ada di Kabupaten Buleleng sebesar 21,02% dalam kondisi baik, kondisi sedang sebesar 27,36%, dan kondisi buruk sebesar 51,62%. Kondisi tersebut sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018. Lebih jelasnya data panjang dan kondisi saluran drainase di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.30
Panjang dan Kondisi Drainase di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

No	Kondisi	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		panjang (m)	%	panjang (m)	%	panjang (m)	%	panjang (m)	%	panjang (m)	%
A	Saluran Drainase (total terbuka dan tertutup)										
1	Baik	237.616	19,62%	240.790	19,83%	242.655	19,96%	245.323	20,18%	258.323	21.02%
2	Sedang	336.299	27,77%	336.299	27,70%	336.299	27,66%	336.299	27,66%	336.299	27.36%
3	Buruk	637.017	52,61%	637.017	52,47%	637.017	52,39%	634.349	52,17%	634.349	51.62%
	Total	1.210.932	100%	1.214.106	100%	1.215.971	100%	1.215.971	100,00%	1.228.973	100.00
B	Saluran Drainase Kewenangan Kabupaten										
1	Baik	134.952	19,62%	137.126	19,88%	138.992	20,09%	141.660	20,48%	142.660	20.62%
2	Sedang	190.990	27,77%	190.990	27,69%	190.990	27,61%	190.990	27,61%	190.990	27.61%
3	Buruk	361.730	52,60%	361.730	52,44%	361.730	52,29%	359.062	51,91%	358.062	51.76%
	Total	687.672	100,	689.846	100	691.712	100	691.711	100,00	691.711	100.00

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, 2021

f) **Pengelolaan TPA Bengkala**

Penduduk Kabupaten Buleleng juga terbanyak di Provinsi Bali, berdasarkan Buleleng Membangun Tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sebanyak 816.654 jiwa. Kondisi penduduk yang demikian banyak tersebut, tidak dapat dipungkiri berdampak pada kualitas lingkungan, khususnya terhadap timbulnya limbah padat seperti sampah, dengan asumsi setiap individu menghasilkan sampah 0,5 kg/orang per hari (SNI no. 39831995) dan 20% sampah dari fasilitas umum dari timbulan sampah, maka timbulan sampah di Kabupaten Buleleng diperkirakan berjumlah 489,992 ton/hari

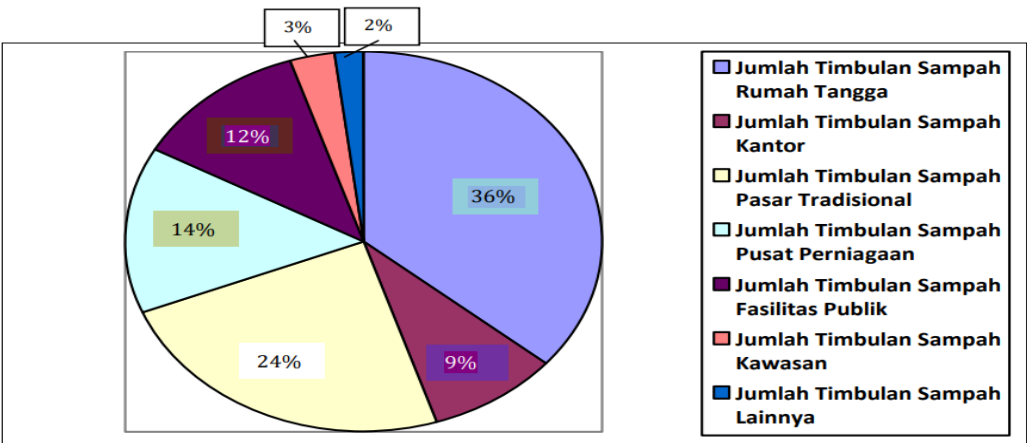
Tabel 2.31

Data timbulan sampah di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah	
			Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
1	Buleleng	46,88	154.217	400,98
2	Banjar	172,60	88.159	212,97
3	Seririt	111,78	95.010	214,32
4	Busungbiu	196,62	54.976	121,35
5	Sawan	92,52	86.371	176,37
6	Sukasada	172,53	87.496	225,48
7	Gerokgak	356,57	99.024	245,79
8	Tejakula	97,68	80.316	162,06
9	Kubutambahan	118,24	71.085	164,55
Jumlah		1.365,88	816.654	1.923,87

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, 2021

Permasalahan sampah menjadi isu daerah sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan gaya hidup (life style), juga mengakibatkan adanya tendensi peningkatan sampah plastik sebesar 16-20%. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah dan jenis timbulan sampah yang semakin beragam di Kabupaten Buleleng. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan potensi pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tahun 2019 seperti terlihat pada di Gambar 1 menunjukkan bahwa sumber sampah terbanyak berasal dari rumah tangga sebesar 36% apabila dibandingkan dengan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sementara komposisi timbulan sampah di Kabupaten Buleleng sebesar 57% didominasi oleh sampah organik yang terdiri dari sampah sisa makanan, kayu, ranting dan daun. Komposisi sampah terbesar kedua berasal dari sampah plastik dengan persentase sebesar 16%, kemudian diikuti dengan sampah kertas 10%, dan sampah lainnya. Dari komposisi sampah tersebut, baru 14% sampah yang dimanfaatkan atau dikelola, sedangkan sebagian besar sampah (66,39%) ditimbun ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bengkala.



Gambar 2.21.
Komposisi Timbulan Sampah di Kabupaten Buleleng

4) **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan Cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga pada tahun 2020 sebesar 97,12%, angka ini bertambah pada tahun 2021 menjadi 97,38%. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Tabel 2. 32
Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan ketersediaanrumah layak huni (%)	93.71	94.45	95,88	97.12	97.38
2	Cakupan layanan rumahlayak huni yang terjangkau (%)	83.53	85,47	89.22	88.48	89.16
3	Persentase kawasan kumuh(%)	0,069	0,068	0,027	0,031	0.018
4	Persentase penanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	14,29	29,31	60,66	61.33	78.57
5	Persentase pengelolaan RTH Public dikawasan perkotaan (%)	76,72	85,20	85,38	84.09	96.54

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danPertanahan, 2021

Cakupan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2021 tercatat 89,16% meningkat dari tahun 2020 sebesar 88,487%. Berfluktuasinya angka tersebut dapat juga disebabkan oleh kondisi status kepemilikan rumah yang umumnya berupa sewa. Di wilayah Kabupaten

Buleleng, keberadaan kawasan kumuh tidak terlalu mendominasi, namun sampai dengan tahun 2021 persentase kawasan kumuh mencapai 0,018%. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai di beberapa titik lokasi. Adapun luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani pada tahun 2021 mencapai 78,57% meningkat dari tahun sebelumnya 2020 yang mencapai 61,33%. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan. Sedangkan persentase pengelolaan RTH public di kawasan perkotaan pada tahun 2021 adalah 96,54% meningkat dari 84,09% pada tahun 2020.

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kabupaten Buleleng juga koordinasi dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).

Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia juga untuk Kabupaten Buleleng dimana masyarakatnya merupakan masyarakat multikultur dengan perguruan tinggi yang cukup banyak berlokasi di wilayah Kabupaten Buleleng. Konflik berbaur SARA, bahkan aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik. Deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan.

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap

LSM, Ormas dan Organisasi Kepemudaan. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelegen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat. Sampai tahun 2021, cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Buleleng tercatat sebesar 85%, meningkat dari tahun sebelumnya 2020 sebesar 80%, yang bertugas untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lokal/lingkungan. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 95% di tahun 2021 dapat diselesaikan secara efektif. Sedangkan untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah 100% pada tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya. Cakupan pelayanan ini terkait dengan area perkotaan yang terpusat di Kawasan Perkotaan Singaraja, sedangkan Kawasan perkotaan lainnya yang merupakan ibukota kecamatan tersebar di wilayah perdesaan Kabupaten Buleleng. Meskipun demikian, kondisi ini telah diimbangi dengan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2021 sebesar 100%. Angka ini relative sama dengan tahun 2020 sebesar 100%. Kondisi jalan dan traffic yang padat, serta beberapa ruas jalan utama ditutup, dapat menghambat laju/kecepatan mobil damkar, dan memperlambat waktu tempuh menuju lokasi kebakaran.

Di sisi lain, faktor kondisi jalan dan traffic merupakan faktor di luar kendali pemadam kebakaran. Pada beberapa lokasi kebakaran, akses jalan cukup sempit, sementara mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng berukuran/berkapasitas besar, sehingga tidak bisa mendekat ke lokasi kebakaran. Faktor lainnya adalah kemampuan personil Damkar yang terbatas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya peningkatan kapasitas personil Damkar terkait pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya untuk personil yang berstatus sebagai tenaga Non PNS.

Tabel 2. 33

Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	65	70	75	80	85
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	70	75	85	90	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100	100	100	100	100
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase Penegakan PERDA	65	70	75	80	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

Upaya lainnya adalah melalui instrumen Peraturan Daerah, upaya penegakan Perda telah mencapai 100% sejak tahun 2015 sampai saat ini dari seluruh laporan pengaduan yang masuk. Sejalan dengan upaya menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif di masyarakat, karena itu perlu terus dikembangkan program peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

6) **Urusan Sosial**

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

Kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2020 adalah sebesar 0,07%. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar, namun seringkali kurang bersifat produktif. Karena itu, besaran sebagian bantuan dialihkan pada kegiatan lain seperti kegiatan padat karya yang hasil akhirnya dapat meningkatkan kemampuan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Sedangkan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial pada tahun 2020 adalah 100%. Perkembangan indikator sosial ini dapat digunakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan sosial Kabupaten Buleleng. Pembangunan bidang sosial ini cukup penting dimana manusia sebagai subjek pembangunan perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Dengan adanya pandemi covid-19 mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan pada 2021, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Buleleng akan memenuhi standar pelayanan minimal urusan sosial. Perkembangan indikator urusan sosial secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 34
Indikator Urusan Sosial Kabupaten Buleleng Tahun
2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	0,49	0,05	0,08	0,06	0,07
2	Persentase panti sosial yang Menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0,49	0,05	0,08	0,06	0,07
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social (%)	100	100	0,54	0,54	0,54
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social (%)	100	0,79	0,79	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2021

2.3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya- upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebesar

42,04% pada tahun 2020, menurun dari tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 97,75%. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2017-2021 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 35
Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	9.88	19.11	18.50	0.43	5.50
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama /PB (%)	78.00	80.86	86.69	85.71	75.00
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	60%	58.87%	97.75%	42.04%	n/a
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	38.6%	100%	100%	84,64%	n/a
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	32.00	2.36	63.13	50.00	93.75
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	54.00	1.55	80.00	n/a	n/a

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

2) **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki- laki lebih tinggi daripada perempuan.

Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2020, predikat Kabupaten Layak Anak pada predikat pratama, sehingga pada tahun 2021 berupaya untuk naik peringkat ke predikat nindya.

Terkait dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga, terdapat pengaduan atas kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terus mengalir, hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan KDRT dan telah adanya jejaring dalam penanganan KDRT. Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, saat ini Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengoptimalkan kinerja UPT P2TPA dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. capaian indikator tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 36
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

o	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0.60	0,60	0.60	0.52	0.60
2	Total Fertility Rate (TFR)	2.20	2.20	2.20	2.36	2.36
3	Rasio akseptor KB	85.38	85.97	86.60	86.27	50.78
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	74.33	72,99	89.10	86.35	75.
5	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1/148	1/148	1/148	1/148	1/148
6	Cakupan peserta KB aktif (%)	85.38	85.95	84.26	86.55	83.07

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

3) Urusan Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi danimbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Pada tahun 2021, ketersediaan pangan tersedia sebesar 110 ton, menurun dibanding tahun 2020 sebesar 113 ton, sebagai implikasi dari terjadinya stagnasi produktivitas hasil pertanian. Ketersediaan

pangan yang berfluktuasi dapat disebabkan oleh pergeseran musim dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Upaya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman terus dilakukan dan dilaksanakan secara partisipatif. Beberapa wilayah pertanian melalui fasilitasi dari pemerintah daerah telah mengadopsi teknik penanggulangan organisme pengganggu tanaman yang telah berhasil dikembangkan di daerah lain secara partisipatif. Upaya pengendalian lain melalui perizinan pertanahan juga secara intensif terus dilakukan sehingga alih fungsi lahan pertanian secara illegal sebagai salah satu faktor penurunan produksi pertanian dapat ditekan. Perkembangan kondisi pangan Kabupaten Buleleng secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 37
Indikator Urusan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan pangan utama beras (kg/kapita/tahun	114	124	124	113	110

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, dan Perikanan, 2021

4) **Urusan Pertanahan**

Proses perencanaan urusan pertanahan diawali dengan pemetaan permasalahan pertanahan termasuk pemeringkatan prioritas yang harus segera diatasi antara lain berupa pengendalian konversi lahan dan pensertifikatan tanah kas desa. Dari pemeringkatan tersebut disusun program dan kegiatan untuk mengatasi masalah serta mengangkat potensi yang ada.

Pelaksanaan urusan pertanahan di Kabupaten Buleleng dalam upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui pendataan, pengukuran,

dan pensertifikatan. Inventarisasi penataan, penguasaan, pemilikan, dilakukan proses sertifikasi untuk bidang tanah, dan penerbitan sertifikat kepemilikan. secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 38
Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase luas lahan Pemkab bersertifikat	65.30	66.67	72.67	77.00	90.53

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, 2021

4) **Urusan Penanaman Modal**

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Penanaman modal di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah nilai investasinya. Perkembangannya sangat dinamis dan berfluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Buleleng cenderung kondusif.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebelum masa pandemic covid-19, secara absolut perkembangan investasi di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 total investasi terealisasi mencapai

sekitar Rp.5,373 triliun meningkat menjadi Rp.5,790 triliun pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan lagi menjadi Rp. 6,034 Triliun pada tahun 2019, adanya pandemic covid-19 investasi mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp..5.096 triliun, dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi Rp. 5,411 triliun.

Tabel 2.39
Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Investasi
2017	5.373.470.000.000,00
2018	5.790.910.000.000,00
2019	6.034.420.000.000,00
2020	5.096.180.000.000,00
2021	5.411.170.000.000,00

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Buleleng, 2021

5) **Urusan Lingkungan Hidup**

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	50,00	51,82	54,44	n/a	64,17
2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara	90,64	90,31	91,97	88,42	88,52
3	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	62,26	63,67	64,95	63,92	71,46
4	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (buah/1000	57	60	67	72	84
5	Indeks Kualitas tutupan lahan	43,47	45,10	52,58	52,58	52,44
6	Persentase penanganan sampah (%)	75	5,18	10.67	42.55	70

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Indeks kualitas air di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 adalah 64,17% meningkat dari 54,44% di tahun 2019. sementara kualitas udara menunjukkan pada tahun 2021 tercatat 88,52% menurun dari tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 88,42%. Demikian juga data indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Buleleng sebesar 52,54 di tahun 2021. Jumlah TPS yang ada sampai tahun 2021 sebanyak 84 unit yang tersebar di 9 kecamatan. Persentase penanganan sampah mencapai 70 % di tahun 2021.

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak asasi penduduk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka. Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kematian.

Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun 2016 ke tahun 2020 relatif stabil, khususnya untuk pelayanan Kartu Keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan pelayanan KK sebesar 50.810 di tahun 2020 turun dari tahun 2019 yang sebesar 55.589. Rasio Penduduk ber-KTP sebesar 99,96 % di tahun 2020. Cakupan penerbitan KTP elektronik pada tahun 2020 sebesar 62.162 meningkat dari 32.844 di tahun 2019. Capaian ini belum mencapai target 100%, yang berarti masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Hal ini dikarenakan oleh ada sebagian penduduk Kabupaten Buleleng yang berdomisili tinggal di luar Kabupaten Buleleng dan adanya penduduk dengan keterbatasan fisik yang perlu difasilitasi dengan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik.

Pada indikator lain, cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan pada tahun 2020 tercatat masing-masing sebesar 5.054, menurun dari tahun 2019 yang sebesar 6.534.

Secara umum cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan mengalami kenaikan, antara lain disebabkan adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan semua dokumen kependudukan yang dipergunakan dalam pelayanan publik. Selain itu upaya pemerintah Kabupaten Buleleng telah memberikan pelayanan aktif langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan keliling administrasi kependudukan dengan jemput bola langsung ke penduduk, serta inovasi-inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Perkembangan indikator pelayanan administrasi kependudukan tahun 2016-2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.36.

Tabel 2. 41
Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan
Kabupaten Buleleng 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP (%)	88,34	89,48	91,30	98,62	99,96
2	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	62.936	53.283	57.812	55.589	50.810
3	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	45.770	62.662	106.887	32.844	62.162
4	Cakupan Penerbitan Akta nikah	13.914	8.371	7.184	6.534	5.054

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

7) **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat trend yang meningkat atas keberadaan koperasi di Kabupaten Buleleng. Jumlah koperasi pada tahun 2021 tercatat sebanyak 404 unit, meningkat dari tahun 2020 sebanyak 398 unit. Jumlah koperasi aktif sebanyak 323 Unit di tahun 2021. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 79.95% menurun dari

83.41% di tahun 2020.

Sebagaimana koperasi, usaha mikro dan usaha kecil juga mempunyai peran dalam perekonomian daerah baik dalam produksi dan distribusi barang dan jasa maupun dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan penduduk. Jumlah usaha mikro pada tahun 2021 tercatat sebesar 47.311, meningkat dari 44.670 di tahun 2020. Adapun jumlah usaha mikro kecil menengah pada tahun 2021 bertambah dibandingkan tahun 2020, dari 54.480 unit usaha menjadi 57.216 unit usaha. Sementara untuk persentase usaha mikro dan kecil juga mengalami peningkatan dari 81,99% menjadi 82,68%. Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Buleleng tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42
Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

No	Koperasi, Usaha Kecildan Menengah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Aktif(unit)	245	291	319	332	323
2	Jumlah Koperasi (unit)	330	357	386	398	404
3	Persentase Koperasi Aktif	74,24	81,51	82,64	83.41	79.95
4	Usaha Mikro (unit)	24.243	25.202	26.048	44.670	47,311
5	Jumlah UMKM (unit)	32.907	34.552	35.555	54.480	57.216
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	73,67	72,94	73,26	81,99	82.68

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian , Koperasi dan UKM, 2021

8) **Urusan Kebudayaan**

Seberapa penting arti dan peran kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut

Tabel 2. 43
 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival senidan budaya (kegiatan)	2	2	2	nihil	1
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	150	150	150	23	10
3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	150	150	150	23	10
4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	150	95	15	2
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (unit)	1	1	1	2	1

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pelayanan umum lainnya yang digambarkan adalah kondisi pelayanan pariwisata, pertanian, perdagangan dan urusan lainnya sebagai berikut.

1) Urusan Pariwisata

Perkembangan kunjungan wisatawan sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebanyak 1.084.68 orang pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar 224.209 orang. Penurunan jumlah wisatawan ini sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda.

Tabel 2. 44
 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kunjungan Wisata	873.000	1.003.810	1.084.168	141.413	224.209
Kontribusi thd PDRB Hb (%)	18,42	16,59	16,50	13,47	13,47

Sumber: BPS 2020, Dinas Pariwisata 2021

Tabel 2. 45
 Jumlah DTW, Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran dan Penginapan di
 Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah DTW	1	0	1	0	0
Jenis, kelas dan jumlah restoran	195	65	65	249	1.347
Jenis, kelas dan jumlah penginapan	436	224	224	725	496

Sumber: BPS 2020, Dinas Pariwisata 2021

Dari data tabel diatas menunjukkan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Buleleng perlu terus dikembangkan melalui pemulihan citra pariwisata pasca pandemi Covid-19, revitalisasi maupun pengembangan DTW yang perkembangannya menunjukkan sangat bberfluktuatif dan sangat dinamis serta penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung wisata perkembangan restoran tahun 2021 sebanyak 1.347 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 249, begitu juga halnya dengan penginapan sebanyak 496 ditahun 2021 menurun jumlahnya dari tahun 2020 yang berjumlah 725 unit, ada kecenderungan berkurangnya jumlah penginapan yang beroperasi karena beban pandemic Covid-19. Hal ini perlu segera untuk bisa dipulihkan sehingga tidak berdampak lebih luas tingkat hukunjunan dan hunia penginapan yang ada. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan *length of stay* wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat.

2) **Urusan Pertanian**

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera,

dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, peternakan guna meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.

Tabel 2. 46
Indikator Urusan Pilihan Pertanian Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas lahan pertanian yang menerap-kan sistem organik	465	511	570	652	684
2	Produktivitas padi (ton/hektar)	5.65	62.56	58.94	58.32	56.10
3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	22.40	21.26	21.2	22.28	22,57
4	Cakupan bina kelompok petani (%)	50	55	64	66	71

Sumber: Dinas Pertanian,2021

3) Urusan Perdagangan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kabupaten Buleleng cukup berfluktuatif. Meskipun angka relatif kecil, namun pembinaan ini sangat penting sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan perekonomian terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, keberadaan sektor informal diharapkan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum lainnya seperti berjualan yang menutup akses masyarakat terhadap fasilitas trotoar serta terawasi dalam hal pelayanan yang baik terhadap konsumen.

4) **Urusan Perindustrian**

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Sampai tahun 2021, sektor industri di Kabupaten Buleleng berkontribusi sebesar 6,09% terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 5,92%. Ini terjadi karena nilai produksi pada sektor industri yang yang mulai tumbuh dan berkembang.

Pendampingan dan pemberdayaan industri kecil merupakan prioritas pembangunan di tahun 2021 dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal. Diharapkan dengan adanya pembinaan, pemberdayaan dan penguatan modal pada pelaku industri kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat menurunkan indeks gini yang semakin tinggi di Kabupaten Buleleng. Adapun data perkembangan indikator perindustrian tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 47
Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi Sektor Industri PDRB HB (%)	5,90	5,86	6,00	5.92	6,09
2	Jumlah Usaha Industri	977	1.000	1.067	1.130	1.185
3	Pertumbuhan Industri (%)	2,35	2,30	6,28	5,58	4,64

Sumber: BPS 2020, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2021

5) **Urusan Perikanan**

Jumlah produksi ikan pada tahun 2021 mencapai 20.402 ton meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2019 mencapai 14.919 ton, sedangkan pada tahun 2021 kebutuhan produksi perikanan sebanyak 15.272 ton menurun dari tahun tahun 2019 sebanyak 15.700 ton.

Tabel 2. 48
Indikator Urusan Perikanan Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Ikan (ton)	19,494	20,837	21,196	14,919	20,402
2	Kebutuhan Produksi Ikan(ton)	14.952	15.032	15.115	15.700	15.272
3	Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	36,38	36,93	37.99	38.05	38.68
44	Cakupan Bina Kelompok Perikanan (%)	54.34	64,28	73.60	77.30	85.10

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021

Sedangkan pada tahun 2021, tingkat konsumsi ikan sebesar 38,68 kg/kapita/tahun meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 38,905 kg/kapita/tahun. Cakupan bina kelompok menunjukan tren peningkatan yang positif selama 5 (lima) tahun terakhir dimana sebesar 85,10 % ditahun 2021 meningkat dari 77,30% ditahun 2020.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita)

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Data menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk mengalami perubahan cenderung meningkat dari Rp. 810.532/bulan,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 969.964,/bulan pada tahun 2020 dan ditahun 2021 mengalai penurunan sebagai akibat dari dampk pandemic mencapai diaangka 961.202/bulan. Dengan demikian, upaya

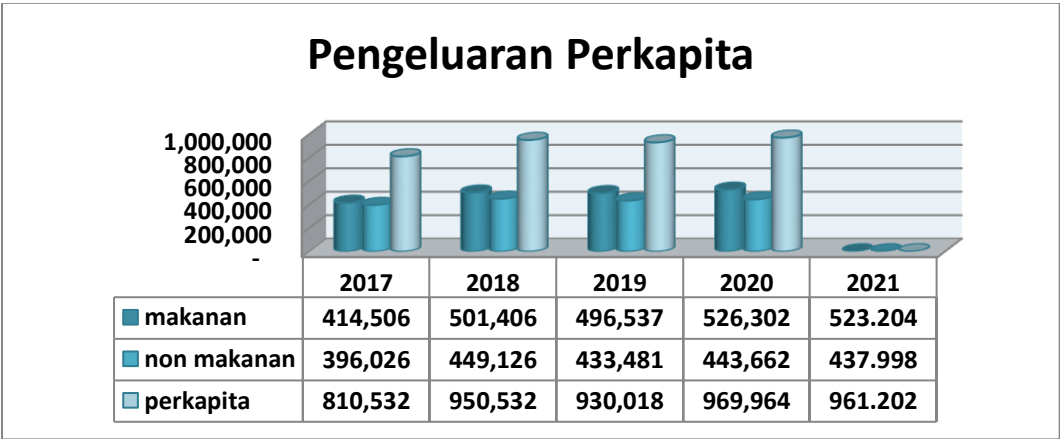
untuk pencapaian hidup layak akan terus diupayakan untuk terus meningkat setiap tahun, seperti digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Penduduk
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rata-Rata Konsumsi Perkapita Sebulan (Makanan)	414.506	501.406	496.537	526.302	523.204
2.	Rata-Rata Konsumsi Perkapita Sebulan (NonMakanan)	396.026	449.126	433.481	443.662	437.998
3	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (1+2)	810.532	950.532	930.018	969.964	961.202

Sumber: Badan Statistik Kab.Buleleng, 2021 (diolah)

Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Buleleng untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik maka pendapatan rata-rata perkapita penduduk harus meningkat, hal ini akan mempengaruhi pengeluaran perkapita yang dapat meningkat setiap tahunnya. Grafik perkembangan pengeluaran perkapita dari tahun 2017-2021 digambarkan seperti di bawah ini.



Sumber: Badan Statistik Kab.Buleleng, 2021 (diolah)

Gambar 2.22
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Sebulan
Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya

tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relative semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah masih mengalami kendala, dimana data menunjukkan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2020, pelanggaran tata ruang menurun dari tahun 2019 sebanyak 110 kasus menjadi 79 Kasus, sedangkan tahun 2018 pelanggaran mencapai 111 kasus, tahun 2017 sebesar 112 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 14,28% dari tahun 2016. Secara rinci dapat ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.50
Jumlah Laporan Pelanggaran Pemanfaatan Ruangdi
Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Laporan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	98	112	111	110	79

Sumber: Dinas PUPR Kab. Buleleng, 2021

b. Luas RTH Kawasan Perkotaan Singaraja

Sesuai amanat Undang-Undang maka luas RTH perkotaan diharapkan minimal 30% dari total luas wilayah yang meliputi RTH Publik minimal seluas 20% dan RTH privat minimal seluas 10%.

Pada tahun 2020, luas RTH Perkotaan Singaraja (tanpa termasuk lahan sawah) belum memenuhi ketentuan baru karena baru mencapai 359,832 Ha atau sebesar 8,64% dari luas wilayah Perkotaan Singaraja yang mencapai 4.163,88 Ha. Luas RTH publik saat ini baru mencapai 245,613 Ha atau 5,90%, sedangkan luas RTH private adalah seluas 114,220 Ha atau sebesar 2,74% dari luas Perkotaan Singaraja.

c. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif lahan pertanian di Kabupaten Buleleng terus berkurang setiap tahun akibat adanya alih fungsi tanah, maupun faktor lain seperti menjadi lahan kritis, dan akibat bencana. Data menjelaskan bahwa rata-rata lahan sawah (sawah irigasi dan non irigasi) mengalami penurunan mencapai 0,01% periode 2014-2018 dari luas 10.789 ha tahun 2014 menjadi 9.497 ha pada tahun 2018, sedangkan untuk ditanami padi pada areal sawah produktif juga mengalami penurunan setiap tahun dengan rata-rata 0,91%. Sedangkan lahan pertanian non sawah kurun waktu 2014-2018 mengalami rata-rata kenaikan 0,08% dari luas 70.465 Ha tahun 2014 menjadi 71.324 Ha tahun 2018. Dan selanjutnya, lahan non pertanian yang digunakan Pemukiman, Perkantoran, Jalan dan lain-lain mengalami kenaikan rata-rata 0,08% dari luas 55.334 Ha tahun 2014 menjadi 55.737 Ha tahun 2018.

Tabel 2.51
Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Buleleng Tahun 2014-2018

Jenis Lahan	2014	2015	2016	2017	2018	Perkembangan 2014 s/d 2018		Perkembangan 2017 s/d 2018	
						(rata-rata Pertahun)		(rata-rata Pertahun)	
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(%/th)	(ha)	(%/th)
1. Lahan Sawah									
a. Sawah Irigasi	10,694	10,707	10,577	10,270	9.449	(424,00)	(0,01)	(821,00)	(0,04)

Jenis Lahan	2014	2015	2016	2017	2018	Perkembangan 2014 s/d 2018		Perkembangan 2017 s/d 2018	
						(rata-rata Pertahun)		(rata-rata Pertahun)	
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(%/th)	(ha)	(%/th)
b. Sawah non irigasi	95	82	83	65	48	(30,00)	(0,08)	(17,00)	(0,15)
c. Total Lahan Sawah (a+b)	10,789	10,789	10,660	10,335	9.497	(454,00)	(0,01)	(838,00)	(0,04)
2. Lahan Pertanian Bukan Sawah	70,465	70,430	70,543	115,365	71.324	219,00	0,00	640,00	0,00
a. Tegal/kebun	37,056	36,991	37,069	36,880	37.398	(176,00)	(0,00)	518,00	0,01
b.Ladang/huma	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.Perkebunan	31,924	31,947	31,963	31,323	31.465	(601,00)	(0,00)	142,00	0,00
d.Ditanami pohon hutan rakyat	1,133	1,133	1,133	2,133	2.133	1.000,00	0,13	-	-
e.Padang pengembalaan/padang rumput	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.Sementara tidak diusahakan*)	42	49	48	48	48	6,00	0,03	-	-
g.lainnya (tmbak, kolam, empang, hutan negara	310	310	310	300	280	(10,00)	(0,01)	(20,00)	(0,03)
3. Lahan Bukan Pertanian (Pemukiman, Perkantoran, Jalan dll)	55,334	55,369	55,385	10,888	55.737	235,00	0,00	168,00	0,00
Total Luas Kabupaten/Kota	136,588	136,588	136,588	136,588	136.558	-	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong investasi di daerah. Data ini dapat memberikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Buleleng. Data menunjukkan angka kriminalitas fluktuatif dan cenderung menurun.

Tabel 2.52
Angka Kriminalitas Kabupaten Buleleng
Periode Tahun 2016-2020

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus narkoba	47	54	55	47	60
2.	Jumlah kasus pembunuhan	-	2	1	2	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	8	8	4	20	15
4.	Jumlah kasus penganiayaan	89	36	56	32	39
5.	Jumlah kasus pencurian	112	91	114	29	68
6.	Jumlah kasus penipuan	18	6	2	5	3
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	0	0	1	-
Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun		192	274	197	232	84
Angka kriminalitas		0,0003	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003

Sumber: Polres Kabupaten Buleleng, 2021

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa berbagai kejahatan terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, yang dapat menghambat tingkat kepercayaan investor dalam berkontribusi pada pembangunan daya saing daerah Buleleng. Kejahatan yang menduduki frekwensi paling tinggi adalah kasus pencurian berkisar 29-112 kasus dan kasus penganiayaan pada urutan kedua mencapai 32-89. Tindak kejahatan ini sedapat mungkin diturunkan melalui upaya-upaya pendekatan baik secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sehingga dapat menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan daerah.

b. Jumlah Demonstrasi

Yang menjadi indikator pendorong perkembangan investasi di daerah adalah adanya kesetabilan ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan. Adanya demonstrasi atau unjuk rasa menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih

rendah. Data menunjukkan di Kabupaten Buleleng periode tahun 2014-2016, masih terjadi demonstrasi, namun di tahun 2017 tidak lagi terjadi demonstrasi baik dalam frekwensi rendah maupun tinggi, sebagian besar demo dilakukan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi di bidang ekonomi dan politik.

Tabel 2.53
Jumlah Demo Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang politik	4	-	-	-	-
2	Ekonomi	5	-	-	-	-
3	Kasus pemogokankerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah unjuk rasa	9	-	-	-	-

Sumber: Polres Kabupaten Buleleng, 2021

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang bisa dicapai oleh penduduk di Kabupaten Buleleng. Melihat dari komposisi persentase penduduk 10 tahun ke atas yang telah menamatkan sekolah maupun memiliki ijazah, di mana penduduk Buleleng masih sebagian besar SMP ke bawah atau sekitar 65,31% tingkat SMA/keatas mencapai 34,69%. Dengan demikian, pengisian ketenagakerjaan masih sebagian besar tingkat SMA ke bawah, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Buleleng menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2016-2020

No	Pendidikan Tertinggi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak Punya	27,3	16,9	37,40	35,46	22,46
2	Tamat SD	29,5	27,0	25,23	30,64	23,89
3	SLTP Sederajat	15,8	13,2	15,00	11,77	18,96
4	SLTA Sederajat	22,4	31,0	17,17	17,40	17,56
5	D1-D2/D3	1,3	3,75	1,23	1,84	1,03
6	D4/S1-S3	3,5	7,3	3,98	2,89	3,88

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Buleleng Dalam Angka, 2021

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia <15 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 tahun). Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Data menunjukkan angka ketergantungan penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2020 berkisar 67,04 artinya setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 67,04 orang penduduk yang belum dan tidak produktif.

Tabel 2.55
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Buleleng Tahun
2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 Tahun	170,98	167,60	165,57	193,64	195,02
2	Jumlah penduduk usia > 64 Tahun	53,54	50,70	52,11	65,35	65,95
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	224,52	218,30	217,68	256,39	260,97
4	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	424,59	435,30	439,40	564,39	530,83
5	Rasio ketergantungan (3) (4)	52,88	50,15	49,54	45,89	67,04

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Buleleng Dalam Angka, 2021

Untuk itu, Kabupaten Buleleng perlu menangkap sebagai peluang perkembangan, tetapi juga harus menyiapkan penanganan dampak yang tidak dikehendaki. Selain itu sebagai pemerintahan daerah yang relatif tua dibanding tetangganya, ada kemungkinan pemerintah daerah masih harus membenahi dan meningkatkan kapasistasnya.

2.5 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Secara lengkap, berikut ini adalah hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada RPJMD periode sebelumnya:

Evaluasi pelaksanaan RPJMD adalah mengukur kinerja program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mengetahui ketercapaian indikator dan target pada setiap program, sehingga dapat dirumuskan tindak lanjutnya di perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi kinerja program terdiri dari evaluasi kinerja program urusan wajib dan urusan pilihan.

Pada Tahun 2021 merupakan periode kondisi akhir Dokumen RPJMD 2017-2022, untuk itu evaluasi pelaksanaan RPJMD yang bertujuan sebagai alat ukur kinerja program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mengetahui ketercapaian indikator dan target pada setiap program, sehingga dapat dirumuskan tindak lanjutnya di perencanaan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya yakni Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng 2023-2026 sebagai acuan Identifikasi Awal Isu-Isu Strategis Pembangunan Buleleng ke depan. Evaluasi kinerja program terdiri dari evaluasi kinerja Program Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (periode sebelumnya), dapat dilihat kurang konsistennya penentuan indikator capaian program dari masing-masing urusan. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas hasil evaluasi dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 201-2022 yang menyebabkan beberapa kelemahan, meliputi :

1. Belum lengkapnya data informasi yang berdampak pada pengoptimalan pengukuran realisasi program serta indikator capaian baik yang tercapai maupun tidak mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya;
2. Belum optimalnya realisasi program yang melebihi targetkinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

Untuk mengetahui lebih jelas, target dan realisasi capaian RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam 3 Aspek Pembangunan Daerah (Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing) dapat kami sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai ($<$); Sesuai ($=$); Melampaui ($>$)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI													
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah													
1:01	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) (%)	5.40	6.3	5.40	6.40	5,53	6.50	-5.76	6.60	-1,22	6.70		Data 2021 belum Release dari BPS	
1:02	Persentase peningkatan nilai investasi	1.236.414.24 6.708	1% (1.248.778. 389.000)	0.52 % (657.441.2 85.772)	1% (1.261.266. 173.000)		1% (1.273.878. 835.000)		1% (1.286.617. 623.000)		1% (1.299.483. 799.000)	DINAS PENANAMAN MODAL PTSP		
1:03	Laju inflasi (%)	3.38	3.50	1.88	3.50	2.42	3.50	2.48	3.50	2.39	3.50		68.29	Belum Tercapai ($<$)
1:04	PDRB Perkapita (Juta)	47.724	53.220	50.040	56.387	53.54	62.398	50.12	68.918	27.020	76.303		0.00	
1:05	Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini)	0.339	0.320	0.308	0.316	0.344	0.312	0.284	0.308	0,2820	0.304		0.00	
	FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1:00	PENDIDIKAN													

No.	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
1:01	Persentase sekolah yang menyertakan pendidikan karakter dan penggalian potensi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.00	Sesuai (=)
1:02	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	351	353	353	355	355	357	357	359	359	361	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.00	Sesuai (=)
1:03	Angka Melek Huruf (%)	99.41	99.46	99.66	99.51	91.4	99.56	92.13	99.61	92.13	99.79	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	92.49	Belum Tercapai (<)
1:04	Angka Rata- rata Lama Sekolah	6.90	6.96	7.11	7.03	7.08	7.10	7.24	7.17	7.24	7.24	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.98	Melampaui (>)
1:05	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	104.46	100	104.40	100	103.7 5	100	101.2 8	100	105.8 7	100	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	105.87	Melampaui (>)
1:06	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96.09	96.47	93.40	96.85	93.75	97.24	94.72	97.62	98.98	98.00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	101.39	Melampaui (>)
1:07	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.72	0.01	0.01	0.01	0.002 6	0.01	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	26.00	Belum Tercapai (<)

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
1:08	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.00	Sesuai (=)
1:09	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	97.20	99.02	98.00	99.12	92.43	99.21	99.31	99.39	99.50	99.50	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.11	Melampaui (>)
1:10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/ MTs	104.23	100	106.50	100	98.12	100	95.26	100	102.7 3	100	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	102.73	Melampaui (>)
1:11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/ MTs	94.60	95.08	84.60	95.56	77.63	96.04	89.37	96.52	87.20	97.00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	90.34	Belum Tercapai (<)
1:12	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/ MTs	0.04	0.04	0.04	0.03	0.08	0.03	0	0.02	0.01	0.02	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	50.00	Belum Tercapai (<)
1:13	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100	100	100	100	99.95	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.00	Sesuai (=)
1:14	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	92.66	93.10	98.00	93.63	93.63	94.01	94.01	94.55	100	95.00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	105.76	Melampaui (>)
2:00	KESEHATAN													

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIK ATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
2:01	Persentase RT ber PHBS (%)	78.50	80.00	90.00	83.00	83.00	85.00	85.00	88.00	90.00	90.00	DINAS KESEHATAN	102.27	Melampaui (>)
2:02	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71.06	71.15	71.36	71.24	71.68	71.33	71.83	71.41	71.95	71.50	DINAS KESEHATAN	100.76	Melampaui (>)
2:03	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran	4.90	4.88	3.93	4.86	5.72	4.84	6.90	4.82	8.39	4.80	DINAS KESEHATAN	174.07	Melampaui (>)
2:04	Persentase Balita Gizi Buruk	0.06	0.05	0.02	0.05	0.04	0.04	0.06	0.04	1.42	0.03	DINAS KESEHATAN	4057.14	Melampaui (>)
3:00	KETENAGAKERJAAN													
3:01	Menurunnya angka pengangguran (%)	2	1.95	1.93	1.89	1.84	1.82	5.19	1.74	5.38	1.65	DINAS TENAGA KERJA	309.20	Melampaui (>)
3:02	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74.29	74.74	75.31	75.29	76.87	75.94	75.07	76.79	73.08	77.74	DINAS TENAGA KERJA		

Tabel 2.55

**Capaian Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum**

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui >)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
	PELAYANAN UMUM													
1	PENDIDIKAN													
1:01	PENDIDIKAN DASAR (SD)													
1:01:01	Persentase sekolah yang telah memenuhi SPM	40.00	50.00	63.16	60.00	60.00	70.00	95.40	75.00	100	80.00	DINAS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	133.33	Melampaui (>)
1:01:02	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	99.74	99.81	103.02	99.88	99.67	99.96	99.96	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.00	Sesuai (=)
1:01:03	Rasio ketersediaan sekolah/pendud uk SD/MI	68.51	68.71	68.71	68.91	72.79	72.79	72.07	69.31	71.40	69.51	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	103.02	Melampaui (>)
1:01:04	Rasio guru terhadap murid (Guru/Murid)	1:15	1 : 20	1:20	1:20	0.16	1:20	1:17	1:20	1:20	1:20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.00	Sesuai (=)
1:01:05	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata- rata (Guru/Kls/10.00 0 Pddk)	1.15	1.22	1.22	1.29	0.16	1.36	1.35	1.43	0.44	1.50	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	30.77	Belum Tercapai (<)
1:02	PENDIDIKAN DASAR (SMP)													

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
1:02:01	Angka Partisipasi Sekolah (%)	96.40	97.70	96.29	99.75	98.8	99.98	90.85	100	92.24	100	DINAS PENDIDIKANPEMUDA DAN OLAHRAGA	92.24	Belum Tercapai (<)
1:02:02	Rasio ketersediaan sekolah menengah (Sek/10.000 Pddk)	23.86	24.86	24.86	25.86	22.95	26.86	22.95	27.86	25.84	28.86	DINAS PENDIDIKANPEMUDA DAN OLAHRAGA	92.75	Belum Tercapai (<)
1:02:03	Rasio guru terhadap murid (Guru/Murid)	1:17	1 : 32	1:32	1:32	1:18	1:32	1:18	1:32	1:32	1:32	DINAS PENDIDIKANPEMUDA DAN OLAHRAGA	100.00	Sesuai (=)
1:02:04	Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf (%)	99.41	99.53	99.66	99.64	91,40	99.78	92.13	99.98	12.57	100	DINAS PENDIDIKANPEMUDA DAN OLAHRAGA	12.57	Belum Tercapai (<)
1:03	FASILITAS PENDIDIKAN													
1:03:01	Persentase lembaga pendidikan non formal yang telah memenuhi SPM	40	45	45	50	50	55	100	60	29.03	65	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	48.38	Belum Tercapai (<)
1:03:02	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	35.87	36.67	35.2	37.47	36,67	38.27	36.67	39.07	39.87	39.87	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	102.05	Melampaui (>)
1:04	PENDIDIKAN USIA DINI													
1:04:01	APK Pendidikan Usia Dini (%)	75.32	75.62	75.07	75.92	75,50	76.22	36.89	76.52	53.42	76.82	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	69.81	Belum Tercapai (<)
1:05	ANGKA PUTUS SEKOLAH													
1:05:01	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0,72	0.01	0.01	0.01	0.0026	0.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	26.00	Belum Tercapai (<)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
1:05:02	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0.04	0.04	0.00	0.03	0,08	0.03	0	0.02	0.01	0.02	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	50.00	Belum Tercapai (<)
1:06	ANGKA KELULUSAN													
1:06:01	Angka kelulusan SD/MI (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	100.00	Sesuai (=)
1:06:02	Angka kelulusan SMP/MTs (%)	100	100	99.98	100	99.98	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	100.00	Sesuai (=)
1:06:03	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	97.20	99.02	98.00	99.12	92.43	99.21	99.31	99.39	99.50	99.50	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	100.11	Melampaui (>)
1:06:04	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	92.66	93.10	98.00	93.63		94.01		94.55	95.00	95.00	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	100.48	Melampaui (>)
1:06:05	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV (%)	91.01	91.03	90.50	91.05	93,90	91.07	93.92	91.09	93.43	91.11	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	102.57	Melampaui (>)
2	KESEHATAN													
2:01	Tingkat akreditasi pelayanan BRSUD Buleleng	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	DINAS KESEHATAN	100.00	Sesuai (=)
2:02	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi madya	5	5	9	7	7	8	12	9	6	9	DINAS KESEHATAN	66.67	Belum Tercapai (<)
2:03	Rasio Posyandu per Satuan Balita (Bh/10000)	1.12	1.13	1.14	1.14	1,17	1.15	1.4	1.16	1.80	1.17	DINAS KESEHATAN	155.17	Melampaui (>)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui >)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
2:04	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk (Bh/10000)	0.150	0.151	0.151	0.152	0,151	0.153	0.135	0.154	0.155	0.155	DINAS KESEHATAN	100.65	Melampaui (>)
2:05	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (Bh/10000)	0.00120	0.0012 ₁	0.00121	0.0012 ₂	0,00121	0.0012 ₃	0.0135	0.0012 ₄	0.00125	0.00125	DINAS KESEHATAN	100.81	Melampaui (>)
2:06	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Bh/10000)	13.70	13.72	13.30	13.74	32,09	13.76	27.00	13.78	7.30	13.80	DINAS KESEHATAN	52.98	Belum Tercapai (<)
2:07	Rasio Perawat per Satuan Penduduk (Bh/10000)	115.7	115.72	106.18	115.74	125,19	115.76	152	115.78	2.76	115.8	DINAS KESEHATAN	2.38	Belum Tercapai (<)
2:08	Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4(%)	91.70	95.00	96.84	95.50	93,04	96.00	99.40	96.50	94.37	97.00	DINAS KESEHATAN	97.79	Belum Tercapai (<)
2:09	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	96.68	96.80	90.00	97.5	99,33	98.00	105.00	98.50	107.33	99.00	DINAS KESEHATAN	108.96	Melampaui (>)
2:10	Cakupan desa kelurahan UCI (%)	100	100	100	100	100	100	99.3	100	94.59	100	DINAS KESEHATAN	94.59	Belum Tercapai (<)
2:11	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	100.00	Sesuai (=)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui >)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
2:12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA(%)	100	100	70.00	100	70	100	100	100	37.58	100	DINAS KESEHATAN	37.58	Belum Tercapai (<)
2:13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB(%)	100	100	85.00	100	82.00	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	100.00	Sesuai (=)
2:14	Cakupan kunjungan bayi(%)	105.4	100	90.00	100	110.50	100	100	100	109.47	100	DINAS KESEHATAN	109.47	Melampaui (>)
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	PEKERJAAN UMUM													
3:01	Penduduk berakses air minum (%)	82.97	85.00	85.00	90.00	86,12	92.00	86.12	95.00	86.74	98.00	DINAS PUTR	91.31	Belum Tercapai (<)
3:02	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	19.00	25.00	19.96	36.00	20.16	47.67	20.62	58.84	50.62	70.00	DINAS PUTR	86.03	Belum Tercapai (<)
	PENATAAN RUANG													
3:01	Pelayanan Informasi tata ruang (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PUTR	100.00	Sesuai (=)
4	PERUMAHAN													
4:01	Rumah tidak layak huni (%)	87.79	70.23	72.40	52.67	53.72	35.11	47.89	17.54	45.06	0	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	256.90	Melampaui (>)
4:02	Pelayanan pengelolaan air limbah (%)	86.05	88.02	87.63	90.00	90.00	90.00	93.20	94.00	94.00	96.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	100.00	Sesuai (=)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
4:03	Rasio rumah layak huni	0.185	0.188	0.188	0.190	0.192	0.193	0.192	0.195	0.194	0.195	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	99.49	Belum Tercapai (<)
4:04	Rasio permukiman layak huni	22.70	22.70	25.10	32.70	28.95	37.70	37.70	42.70	42.70	47.40	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	100.00	Sesuai (=)
4:05	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	93.71	94.97	94.45	96.23	95.88	97.48	97.12	98.74	97.38	100	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	98.62	Belum Tercapai (<)
4:06	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	83.53	86.82	85.47	90.12	89.22	93.41	88.48	96.71	89.16	100	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	92.19	Belum Tercapai (<)
4:07	Persentase permukiman yang tertata	22.70	28.00	25.10	32.70	32.70	37.70	37.70	42.70	42.70	47.40	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	100.00	Sesuai (=)
4:08	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0.069	0.060	0.068	0.046	0.027	0.031	0.031	0.018	0.018	0	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	100.00	Sesuai (=)
4:09	Persentase penanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	14.29	35.71	29.31	50.00	60.66	64.29	61.33	78.57	78.57	100	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	100.00	Sesuai (=)
4:10	Persentase areal kawasan kumuh	0.069	0.060	0.068	0.046	0.027	0.031	0.031	0.018	0.018	0	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	100.00	Sesuai (=)
4:11	Persentase pengelolaan RTH publik di kawasan perkotaan	76.72	83.39	85,20	92.11	85.38	95.57	84.09	96.54	96.54	99.01	DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	100.00	Sesuai (=)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui >)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
5	PERENCANAAN													
5:01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BAPPEDA	100.00	Sesuai (=)
5:02	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKAD A	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BAPPEDA	100.00	Sesuai (=)
5:03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BAPPEDA	100.00	Sesuai (=)
5:04	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA	100.00	Sesuai (=)
6	PERHUBUNGAN													

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
6:01	Pemasangan rambu (%)	67.97	72.90	72.90	77.60	77.60	82.29	82.29	86.98	86.98	91.67	DINAS PERHUBUNGAN	100.00	Sesuai (=)
6:02	Perolehan penghargaan WTN (buah)	1	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	n/a	1	DINAS PERHUBUNGAN	Pada tahun 2021 tidak diselenggarak an oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan)	
6:03	rasio Ijin trayek (unit)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	DINAS PERHUBUNGAN	100.00	Sesuai (=)
6:04	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	5,100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	DINAS PERHUBUNGAN	100.00	Sesuai (=)
6:05	Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis (buah)	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	DINAS PERHUBUNGAN	100.00	Sesuai (=)
6:06	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan umum	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	DINAS PERHUBUNGAN	100.00	Sesuai (=)
7	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL													
7:01	Persentase perekaman KTP elektronik	96.27	97.30	96.64	98.30	99.22	99.30	100.00	99.50	100.00	99.75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.50	Melampaui (>)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
7:02	Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	92.91	94.00	89.86	96.00	98.18	97.00	97.60	98.00	98.02	99.50	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.02	Melampaui (>)
7:03	cakupan penerbitan akte kematian	66.43	68.50	63.60	70.50	66.04	72.50	102.31	74.50	100.00	76.50	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	134.23	Melampaui (>)
8	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA													
8:01	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0.60	0.59	0,60	0.58	0.60	0.57	0.52	0.56	0.60	0.55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	107.14	Melampaui (>)
8:02	Total Fertility Rate (TFR)	2.20	2.15	2,20	2.14	2.20	2.13	2.36	2.12	2.36	2.10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111.32	Melampaui (>)
8:03	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	45	46	45	47	45	48	45	49	45	49	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	91.84	Belum Tercapai (<)
8:04	Rasio akseptor KB	85.38	86.02	85.97	86.39	86.60	86.80	86.27	87.67	50.78	87.67	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57.92	Belum Tercapai (<)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui >)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
8:05	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	85.38	86.02	52.73	86.39	86.60	86.80	52.70	87.67	52.73	87.67	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60.15	Belum Tercapai (<)
8:06	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) 15-19) /1000	39.00	39.00	40.00	39.00	40.00	38.00	38.00	37.00	31.45	37.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85.00	Belum Tercapai (<)
8:07	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	4.30	4.30	4.22	4.20	4.22	4.10	4.28	4.05	10.22	4.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	252.35	Melampaui (>)
8:08	Penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	37.00	38.00	37.15	39.00	38.50	40.00	38.60	41.00	38.56	41.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.05	Belum Tercapai (<)
8:09	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	74.33	74.43	72,99	74.53	89.10	74.63	86.35	74.73	75.73	74.73	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	101.34	Melampaui (>)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
8:10	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	53.51	53.61	53,02	53.71	86.39	53.81	83.16	53.91	62.16	53.91	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	115.30	Melampaui (>)
8:11	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	37.86	37.96	36,15	47.86	75.51	47.96	78.69	57.96	38.63	57.96	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66.65	Belum Tercapai (<)
8:12	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	975	1100	650	1210	650	1130	200	1460	1291	1460	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	88.42	Belum Tercapai (<)
8:13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00	Sesuai (=)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
8:14	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	70.00	71.00	69,71	72.00	50.68	73.00	70.65	74.00	70.03	74.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.64	Belum Tercapai (<)
8:15	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1/148	1/148	1/148	1/148	1/148	1/148	1/148	1/148	1/148	1/148	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00	Sesuai (=)
8:16	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	82.19	83.19	82.01	84.19	82.19	85.19	82.19	86.19	82.19	86.19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95.36	Belum Tercapai (<)
8:17	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	85.48	85.48	79.97	85.48	85.48	85.48	85.48	85.48	85.48	85.48	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00	Sesuai (=)
8:18	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	22	22	22	22	22	20	22	22	22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00	Sesuai (=)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui >)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
8:19	Cakupan peserta KB aktif (%)	85.38	86.02	85.95	86.39	84.26	86.80	86.55	87.20	83.07	87.67	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95.26	Belum Tercapai (<)
8:20	Jumlah masyarakat yang mendapatkan konseling KB (%)	85.00	85.00	95.00	85.00	99.89	90.00	100.00	90.00	75.00	90.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83.33	Belum Tercapai (<)
9	SOSIAL													
9:01	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang memberikan pelayanan sosial (buah)	18	9	9	9	9	9	9	9	3	18	DINAS SOSIAL	33.33	Belum Tercapai (<)
9:02	PMKS yang memperoleh bantuan sosial(%)	4.28	12.80	7.29	15.40	6.33	18.00	6.84	19.30	3.62	20.50	DINAS SOSIAL	18.76	Belum Tercapai (<)
9:03	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial(%)	2.75	3.40	7.71	4.00	7.02	4.60	7.31	5.00	3.86	5.40	DINAS SOSIAL	77.20	Belum Tercapai (<)
10	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
10:01	Jumlah Organisasi Pemuda (Buah)	25	27	26	29	28	30	27	32	27	35	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	84.38	Belum Tercapai (<)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui >)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
10:02	Jumlah Organisasi olah raga (buah)	34	35	41	36	42	36	43	36	43	37	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	119.44	Melampaui (>)
10:03	Jumlah Kegiatan kepemudaan (Kali)	20	20	11	21	10	22	9	23	5	24	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	21.74	Belum Tercapai (<)
10:04	Jumlah Kegiatan olah raga (Kali)	54	56	56	59	45	62	44	65	44	68	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	67.69	Belum Tercapai (<)
10:05	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)(buah /penduduk)	165	166	169	167	167	168	17	169	12	170	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	7.10	Belum Tercapai (<)
11	KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI													
11:01	Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kel (orang)	5,074	5174	5174	5,274	5,074	5,347	5,074	5,474	5,016	5,574	BADAN KESBANGPOL	91.63	Belum Tercapai (<)
12	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN													
12:01	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	67.65	69.00		70.00	69.02	72.00	68.85	75.00		80.00	SEKRETARIAT DAERAH	Nilai SAKIP 2021, Belum Release dari KemenPAN	
12:02	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	BPKPD	LHP 2021 belum Release dari BPK	
12:03	Nilai IKM	80	83	80	85	80	87	80	88	80	90	SEKRETARIAT DAERAH	90.91	Belum Tercapai (<)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui >)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
13	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DANPELATIHAN													
13:01	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.60	4.40	5.50	6.20	9.30	8.10	9.90	10.00	10.53	12.00	BPKSDM	105.30	Melampaui >)
13:02	Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	57.7	60.75	53.96	63.6	56.76	66.4	44.9	69.23	54.89	72.05	BPKSDM	79.29	Belum Tercapai <)
13:03	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	85	87	87	90	90	92	92	95	95	97	BPKSDM	100.00	Sesuai =)
14	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
14:01	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	70	75	75	80	80	85	85	90	95	95	SATPOL PP	105.56	Melampaui >)
14:02	Prosentase penegakan Perda	65	70	70	75	75	80	80	85	90	90	SATPOL PP	105.88	Melampaui >)
15	TENAGA KERJA													

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
15:01	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	32.00	42.00	2.36	62.00	63.13	70.00	50.00	90.00	93.75	100.00	DINAS TENAGA KERJA	104.17	Melampaui (>)
15:02	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	40.00	46.15	2.15	66.00	66.00	71.00		90.20	100.00	100.00	DINAS TENAGA KERJA	110.86	Melampaui (>)
15:03	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%)	54.00	64.00	1.55	80.00	80.00	91.00		97.00	0.00	100.00	DINAS TENAGA KERJA	0.00	Belum Tercapai (<)
15:04	Angka sengketa pengusaha-pekerja setahun (%)	9.88	.18.75	19.11	17.50	18.50	13.71	0.43	12.42	5.54	8.67	DINAS TENAGA KERJA	44.61	Belum Tercapai (<)
15:05	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)	78.00	80.00	80.86	85.70	86.69	90.91	85.71	91.66	75.00	100.00	DINAS TENAGA KERJA	81.82	Belum Tercapai (<)
16	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													
16:01	Cakupan prasarana sarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	47.62	50.39	87,60	54.26	54.26	58.14	58.14	65.89	100	65.89	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	151.77	Melampaui (>)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
16:02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	0	6.08	19,59	12.16	19.59	18.24	19.59	30.40	24.32	30.40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80.00	Belum Tercapai (<)
16:03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	0	20	20,00	40	60	60	80	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100.00	Sesuai (=)
16:04	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100.00	Sesuai (=)
16:05	Persentase Posyandu Aktif	62.57	63.97	68,44	65.36	79.30	66.76	79.08	69.55	78.52	69.55	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	112.90	Melampaui (>)
17	STATISTIK													
17:01	Buku “Kabupaten dalam angka” (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINAS KOMINFOSANTI	100.00	Sesuai (=)
17:02	Buku “PDRB Kabupaten” (dokumen)	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	DINAS KOMINFOSANTI	0.00	Belum Tercapai (<)
18	KEARSIPAN													
18:01	Lembaga/SKPD yang mengelola arsip sesuai standar	30	30	42	50	42	50	40	50	40	50	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	80.00	Belum Tercapai (<)
18:02	Peningkatan SDM pengelola Kearsipan (orang)	300	350	350	365	500	380	500	395	500	395	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	126.58	Melampaui (>)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
19	INFFORMASI DAN KOMUNIKASI													
19:01	Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)	6	6	6	6	9	6	6	6	7	6	DINAS KOMINFOSANTI	116.67	Melampaui (>)
19:02	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (kali)	12	12	12	24	80	24	54	24	164	24	DINAS KOMINFOSANTI	683.33	Melampaui (>)
19:03	Pameran/Expo (kali)	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	DINAS KOMINFOSANTI	50.00	Belum Tercapai (<)
20	PERPUSTAKAAN													
20:01	Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan (orang)	104	104	158	219	240	264	294	354	294	354	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	83.05	Belum Tercapai (<)
21	PERINDUSTRIAN													
21:01	Persentase Pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	4.50	5.20	5.90	5.90	5.84	6.60	5.92	8.00	6,09	8.00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM		Belum Tercapai (<)
22	PERDAGANGAN													
22:01	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB	2.40	3.30	11.67	3.60	11.84	4.20	11.85	5.40		5.40	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,KOP ERASI DAN UMKM	Data 2021 belum Release dari BPS	
23	UMKM													

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
23:01	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95.00	94.80	94.80	94.60	94.60	94.40	94.40	94.20	94.20	94.20	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM	100.00	Sesuai (=)
24	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
24:01:00	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	44.50	46.00	43.97	47.50	43.97	49.00	43.97	50.00	43.97	50.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87.94	Belum Tercapai (<)
24:02:00	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	44.46	44.67	44.86	45.10	44.86	45.74	44.86	47.72	44.86	47.72	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.01	Belum Tercapai (<)
24:03:00	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0.068	0.066	0.036	0.064	0.036	0.062	0.049	0.059	0.052	0.059	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	88.14	Belum Tercapai (<)
24:04:00	Partisipasi angkatan kerja perempuan	16.90	16.90	69.98	18.30	69.98	18.90	69.98	19.60	69.98	21.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	357.04	Melampaui (>)
24:05:00	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit layanan terpadu	90.00	90.50	100.00	91.00	91.00	91.50	100.00	93.00	100.00	93.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107.53	Melampaui (>)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
24:06:00	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	51.79	51.84	51.79	51.89	51.79	51.94	51.79	52.00	51.79	52.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99.60	Belum Tercapai (<)
24:07:00	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	75.00	76.00	75.00	77.00	75.00	77.50	75.00	80.00	75.00	80.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93.75	Belum Tercapai (<)
24:08:00	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	75	80	75	85	75	90	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00	Sesuai (=)

No.	ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
24:09:00	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00	Sesuai (=)
24:10:00	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.00	Sesuai (=)
24:11:00	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	16.85	17.01	16.85	17.25	16.85	17.58	16.85	18.52	16.85	18.52	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90.98	Belum Tercapai (<)
25	PERTANAHAN													
25:01:00	Persentase luas lahan Pemkab bersertifikat	65.30	71.00	66.67	77.00	72.67	83.00	77.00	97.00	90.53	97.00	DINAS PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	93.33	Belum Tercapai (<)

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Aspek Daya Saing

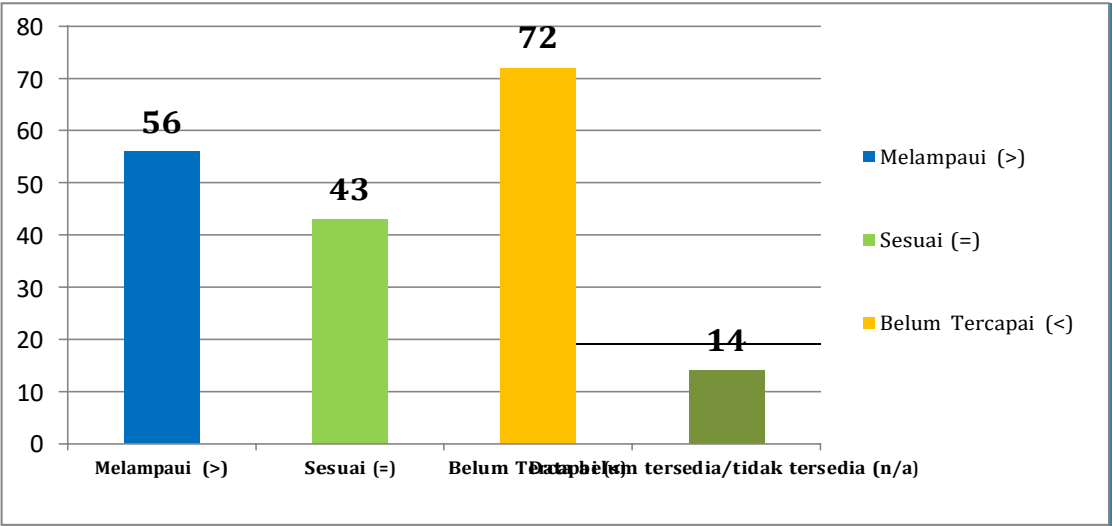
No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
	FOKUS KEMAMPUAN EKOMONI DAERAH													
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
1:01	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (rupiah)	782.000	797.00 0		812.00 0		827.000		842.000		850.000		0.00	
1:02	Persentase desa berstatus swasembada	17.05	17.05	13.18	19.38	15.50	21.71	14.73	24.03	13.18	26.36	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA	54.85	
1:03	Rasio ketergantungan (%)	50.15	49.57		49.09	48,55	48.55	45.17	47.98		47.42		0.00	
	FOKUS FASILITAS WILAYAH INFRASTRUKTUR													
2:00	LINGKUNGAN HIDUP													
2:01	Indeks pertanaman padi (IP Padi)	2.2	2.2		2.2		2.3		2.4		2.5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0.00	
2:02	Persentase penanganan sampah (%)	75	76	5,18	80	10.67	75	42.55	74	70	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	94.59	Belum Tercapai (<)
2:03	Jumlah pengukuran pencemaran status mutu air	8	9	9	10	15	11	15	11	12	12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	109.09	Melampaui (>)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui >)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
2:04	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	79	80	70	81	81	82	82	83	92	84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	110.84	Melampaui (>)
2:05	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	80	82	82	84	84	86	86	88	88	90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.00	Sesuai (=)
2:06	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (buah/1000 pddk)	57	62	60	67	67	72	72	76	84	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	110.53	Melampaui (>)
2:07	Penegakan hukum lingkungan (%)	80	82	95	83	152	84	131	85	87	86	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	102.35	Melampaui (>)
2:08	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.18	64.54	63,67	65.91	63.68	67.28	71.46	68.74	71.5	70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	104.02	Melampaui (>)
3:00	FALISITAS WILAYAH													
3:01	Proporsi Jalan kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	69.71	71.00	71,19	73.00	76.39	75.00	70.07	78.00	71.07	80.00	DINAS PUTR	91.12	Belum Tercapai (<)
3:02	jembatan kondisi mantap (%)	78.44	79.00	76,35	81.00	77.21	84.00	77.21	86.00	71.07	90.00	DINAS PUTR	82.64	Belum Tercapai (<)
3:03	Irigasi kabupaten dalam kondis mantap (%)	71.20	72.96	71,62	74.72	74.78	76.48	76.50	78.24	78.24	80.00	DINAS PUTR	100.00	Sesuai (=)
4:00	LEMBAGA KEUANGAN													
4:01	Koperasi aktif (%)	84	85	85	85	85	86	85	86	85	87	DINAS PERDAGANGAN , PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM	98.84	Belum Tercapai (<)

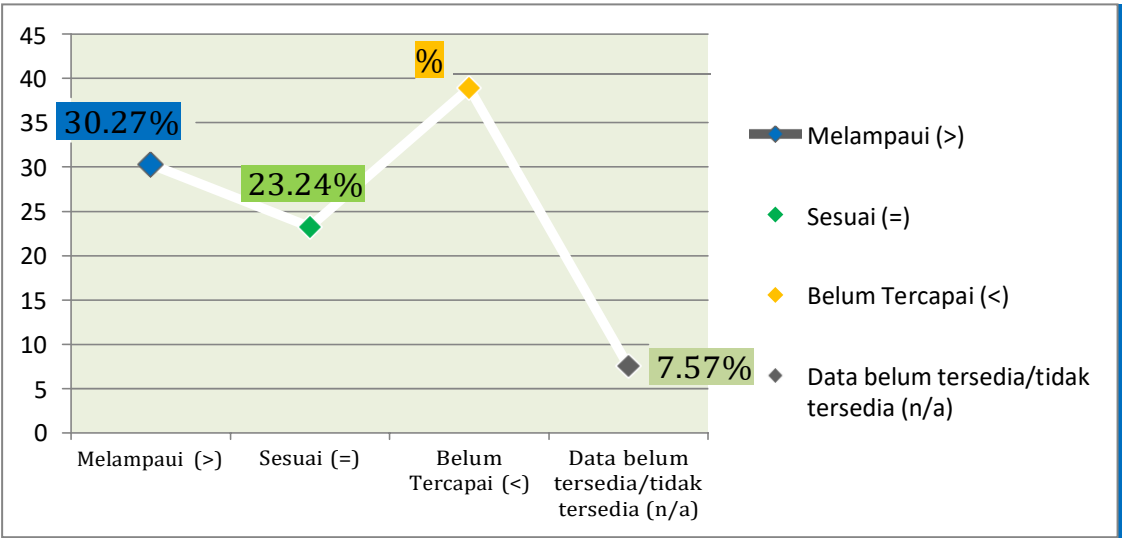
No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
4:02	Jenis dan jumlah bank dan cabang (buah)	38	38	39	39	39	40	39	41	39	42	DINAS PERDAGANGAN , PERINDUSTRIA N, KOPERASI DAN UMKM	95.12	Belum Tercapai (<)
4:03	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (buah)	8	8	8	8	8	8	8	9	8	9	DINAS PERDAGANGAN , PERINDUSTRIA N, KOPERASI DAN UMKM	88.89	Belum Tercapai (<)
	URUSAN PILIHAN													
1:00	PERTANIAN													
1:01	Luas lahan pertanian yang menerap-kan sistem organik	465	511	511	562	570	618	652	679	684	746	DINAS PERTANIAN	100.74	Melampaui (>)
1:02	Produktivitas padi (ton/ hektar)	5.65	5.66	62.56	5.68	58.94	5.69	58.32	5.71	56.10	5.72	DINAS PERTANIAN	982.49	Melampaui (>)
1:03	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	22.40	22.00	21.26	21.80	21.2	21.40	22.28	21.00	22,57	20.70	DINAS PERTANIAN		
1:04	Cakupan bina kelompok petani (%)	50	55	55	60	64	65	66	70	71	75	DINAS PERTANIAN	101.43	Melampaui (>)
2:00	KELAUTAN DAN PERIKANAN													
2:01	Produksi perikanan (ton)	19,494	20.003	20,837	20,056	21,196	20,109	14,919	20,165	20,402	20,217	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	101.18	Melampaui (>)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD 2017	Target dan Capaian Tahun 2018		Target dan Capaian Tahun 2019		Target dan Capaian Tahun 2020		Target dan Capaian Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2022	SKPD Penanggung Jawab Urusan	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui >)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
2:02	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	36.38	36.89	36,93	37.4	37.99	37.91	38.05	38.42	38.68	38.93	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	100.68	Melampaui >)
2:03	Cakupan Bina Kelompok Perikanan (%)	54.34	60.50	64,28	66.70	73.60	72.90	77.30	79.10	85.11	85.40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	107.60	Melampaui >)
3:00	KETAHANAN PANGAN													
3:01	Ketersediaan pangan utama beras (kg/kapita/tahun)	114	122	124	124	124	126	113	128	110	130	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	85.94	Belum Tercapai (<)
4:00	PARIWISATA													
4:01	Jumlah destinasi wisata dengan tingkat kunjungan minimal sebesar 300.000 per tahun	1	1	0	1	1	2	0	2	0	3	DINAS PARIWISATA	0.00	Belum Tercapai (<)
4:02	Jumlah kunjungan wisata	873.000	918.65 0	1003.810	962.48 2	1.084.168	1.010.00 0	141.413	1,061,13 8	224,209	1.114.192	DINAS PARIWISATA	21.13	Belum Tercapai (<)
4:03	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	18,42	18,49	16.59	18,60	16.50	18,70	13.47	18.85	13.47	19,05	DINAS PARIWISATA	71.47	Belum Tercapai (<)
4:04	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (buah)	195	196	65	200	65	203	249	207	156	301	DINAS PARIWISATA	75.36	Belum Tercapai (<)
4:05	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (buah)	436	442	224	449	224	458	725	465	496	470	DINAS PARIWISATA	106.67	Melampaui >)

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, diperoleh informasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dari 3 (tiga) Aspek Bidang Urusan yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2021 berdasarkan tingkat capaiannya. Dari 185 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021, yang memiliki capaian kinerja dengan Interpretasi Melampaui (>) sebanyak 56 Indikator atau 30,27 %, capaian kinerja Sesuai (=) sebanyak 43 Indikator atau 23,24 % dan Belum Tercapai (<) sebanyak 72 Indikator atau 38,92%. Sedangkan untuk Indikator dengan Data belum tersedia/tidak tersedia sebanyak 14 Indikator atau 7,57%.



Gambar 2.23
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2021



Gambar 2.24
Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
2021

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 dan 2021. Tekanan tersebut menyebabkan pendapatan daerah dari sisi komponen penerimaan perpajakan menurun. Dari sisi belanja daerah, pandemi Covid-19 berdampak pada pergeseran belanja daerah dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat serta upaya untuk memelihara keberlanjutan usaha terutama pada sektor-sektor terdampak. Pada tahun 2021, fokus APBD diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan. Program penanganan Covid-19-PEN tetap dilakukan dan dialokasikan dalam empat klaster utama, yaitu (1) pendanaan perlindungan sosial (2) pendanaan kesehatan; (3) pendanaan dukungan UMKM; (4) pendanaan program prioritas.

Prospek perekonomian daerah diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 pada kisaran 5,2 persen. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah antara lain :

- a. Jika pandemi *Covid-19* dapat ditangani pada tahun 2022, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2023-2026 secara bertahap akan kembali pulih.
- b. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi *Covid-19* yang diharapkan dapat mendukung *new normal*, menekan penyebaran *Covid-19* sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi;

- c. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.
- d. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Buleleng, antara lain rencana pembangunan *Short Cut titik 7,8,9,10,10,11,12*, pembangunan SPAM Regional Burana, SPAM Tamblang, pembangunan Bendungan Tamblang, pembangunan anjungan di sekitar short cut akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;
- e. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Beberapa tantangan global dan nasional yang akan dihadapi daerah Kabupaten Buleleng yaitu :

- a. Masih terdapatnya varian baru *Covid-19*, penyelesaian dan dampak pandemi ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Non Migas.
- c. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah

masih terbatasnya sumber- sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

- d. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *Covid-19*, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- e. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi *Covid-19*. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- f. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum *Covid-19* terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi *Covid-19*.
- g. Melemahnya daya saing daerah seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, selanjutnya akan dibahas gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berisi penjelasan tentang kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada perodesasi Rencana Pembangunan daerah 2023-2026 mendatang.

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

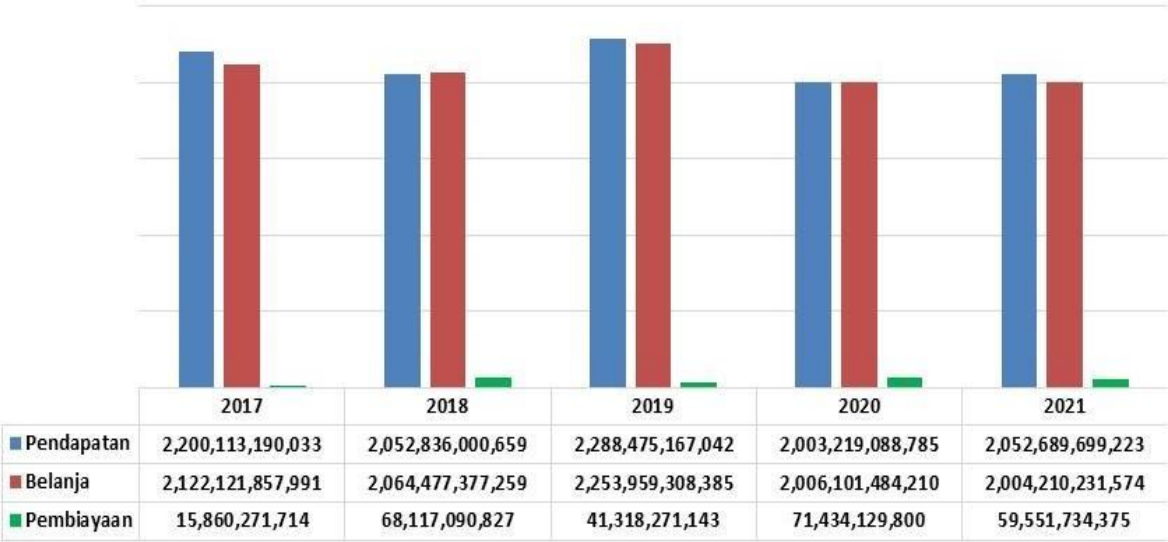
Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi

Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat

untuk suatu tahun tertentu. Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan daerah, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan daerah tahun 2017-2021. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun dimasa pandemi, seperti disajikan dalam gambar 3.1 dan Tabel 3.1 berikut.



Grafik 3.1.

Perkembangan realisasi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2017–2021

Tabel 3.1
Perkembangan APBD Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2017-2021

Uraian		Tahun Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN		2.200.113.190.033	2.052.836.000.659	2.288.475.167.042	2.003.219.088.785	2.052.689.699.223
1	PAD	455.195.426.086	335.555.493.392	365.596.494.163	318.986.891.632	397.453.482.959
2	Dana Transfer	1.725.693.033.947	1.623.967.447.866	1.829.591.780.269	1.573.171.787.153	1.574.989.396.001
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.224.730.000	93.313.059.400	93.286.892.610	111.060.410.000	80.246.820.264
BELANJA		2.122.121.857.991	2.064.477.377.258	2.253.959.308.385	2.006.101.484.210	2.004.210.231.574
1	Belanja operasi	1.549.917.227.786	1.622.346.376.131	1.723.936.119.289	1.464.223.634.793	1.585.529.410.642
2	Belanja modal	295.220.710.245	204.310.158.602	274.879.718.610	259.440.204.132	176.520.790.673
3	Belanja Tak terduga	4.817.043.246	0	5.331.986,	46.090.243.621	5.190.431.459
4	Belanja transfer	272.166.876.712	237.820.842.524	255.138.138.500	236.347.401.663	236.969.598.800
SURPLUS (DEFISIT)		77.991.332.042	(11.641.376.599)	34.515.858.656	(2.882.395.424)	48.479.467.649
PEMBIAYAAN		15.860.271.714	68.117.090.827	41.318.271.143	71.434.129.800	59.551.734.375
1	Penerimaan Pembiayaan	26.558.271.714	93.843.090.827	56.475.714.227	75.834.129.800	68.551.734.375
2	Pengeluaran Pembiyaaan	10.698.000.000	25.726.000.000	15.157.443.084	4.400.000.000	9.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA		93.851.603.757	56.475.714.227	75.834.129.800	68.551.734.375	108.031.202.024

Sumber : Badan Keuangan Daerah (diolah)

Grafik dan Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kondisi normal sebelum pandemi Covid-19 tahun 2017 s/d 2019, perkembangan realisasi APBD Kabupaten Buleleng cendrung fluktuatif. Tahun 2017 pendapatan daerah sebesar 2,200 trilyun lebih, belanja daerah 2,122 trilyun lebih dan pembiayaan sebesar 15,860 milyar lebih, tahun 2018 APBD menurun dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 2,052

trilyun lebih, belanja daerah 2,064 trilyun lebih dan pembiayaan sebesar 68,117 milyar lebih dan pada tahun 2019 APBD kembali meningkat dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 2,288 trilyun lebih, belanja daerah 2,253 trilyun lebih dan pembiayaan sebesar 41,318 milyar lebih, fluktuatif tersebut dipengaruhi faktor kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana transfer daerah dan dana desa serta kebijakan pemerintah provinsi dalam alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan khusus. Pada masa pandemi tahun 2020 dan 2021 APBD Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi cukup signifikan, tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 maka pendapatan daerah menurun 12,5% menjadi 2,003 trilyun rupiah lebih, belanja menurun 11% menjadi 2,006 trilyun lebih dan pembiayaan menjadi 71,434 milyar rupiah lebih, dan tahun 2021 APBD mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi pendapatan sebesar 2,052 trilyun rupiah lebih, belanja daerah menurun menjadi 2,004 trilyun lebih dan pembiayaan menjadi 59,551 milyar rupiah lebih.

Perbandingan realisasi pendapatan dan belanja pada APBD Kabupaten Buleleng rentang tahun 2017 s/d 2021 terlihat pada tahun 2017 mengalami surplus sebesar 77,991 miliar lebih dengan realisasi silpa sebesar 93,851 milyar rupiah lebih, tahun 2018 mengalami defisit sebesar 11,641 miliar rupiah lebih dengan realisasi silpa sebesar 56,475 milyar rupiah lebih, tahun 2019 mengalami surplus sebesar 34,515 miliar rupiah lebih dengan realisasi silpa sebesar 75,834 milyar rupiah lebih, tahun 2020 mengalami defisit sebesar 2,882 miliar lebih dengan realisasi silpa sebesar 68,551 milyar rupiah lebih, dan tahun 2021 mengalami surplus sebesar 48,479 miliar lebih dengan realisasi silpa sebesar 108,031 milyar rupiah lebih.

Jika dibandingkan tahun 2017 dengan tahun 2021 APBD Kabupaten Buleleng terlihat menurun dari sisi

pendapatan dan belanja daerah, dimana pada tahun 2017 pendapatan mencapai 2,200 triliun lebih menjadi 2,052 triliun lebih pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebesar 6,7%, pada belanja daerah juga mengalami penurunan dari 2,122 triliun lebih pada tahun 2017 menjadi 2,004 triliun lebih pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebesar 5,6%. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19 dengan refocusing anggaran alokasi transfer ke daerah dan refocusing alokasi belanja yang difokuskan pada belanja bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi serta penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya kinerja sektor-sektor ekonomi terutama sektor pariwisata, perdagangan, industri pengolahan dan transportasi serta pada sisi keuangan daerah berdampak pada penyesuaian terhadap target-target pendapatan daerah dan belanja daerah.

3.1.1.1 *Pendapatan Daerah*

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Struktur pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Transfer Pemerintah; dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Kinerja komponen-komponen pendapatan tersebut sebagai berikut:

1) *Pendapatan Asli Daerah/PAD*

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2021 cenderung berfluktuatif setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan minus 3,7 persen. Realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2017 sebesar 455,195 milyar lebih dan capaian terendah pada

tahun 2020 sebesar 318,986 milyar rupiah lebih.

Sumber PAD terbesar dari pendapatan lain-lain yang sah dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 299,743 milyar rupiah lebih dan pada tahun 2021 menjadi 204,546 milyar rupiah lebih dengan rata-rata pertumbuhan minus 5,35 persen, terbesar kedua dari komponen pendapatan pajak daerah dengan capaian tahun 2017 sebesar 124,234 milyar rupiah lebih dan tahun 2021 sebesar 136,713 milyar rupiah lebih dengan rata-rata pertumbuhan 3,91 persen disusul komponen pendapatan retribusi daerah dengan capaian tahun 2017 sebesar 17,076 milyar rupiah lebih dan tahun 2021 sebesar 36,147 milyar rupiah lebih dengan rata-rata pertumbuhan 24,55 persen dan terendah dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 14,141 milyar rupiah lebih dan tahun 2021 sebesar 20,045 milyar rupiah lebih dengan rata-rata pertumbuhan 10,12 persen.

Komponen utama PAD yang realisasinya relatif cukup stabil setiap tahunnya adalah pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan fluktuasi realisasi PAD disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Dinamika regulasi keuangan daerah adanya pergeseran alokasi pos-pos pendapatan asli daerah seperti Dana BOS pada tahun 2017 termasuk komponen PAD namun pada tahun 2018 dan seterusnya bergeser menjadi komponen lain-lain pendapatan yang sah sehingga realisasi PAD menjaditertinggi.
- Menurunnya pendapatan BLUD RSUD Singaraja akibat diberlakukannya peraturan BPJS terkait rujukan berjenjang sehingga tingkat kunjungan pasien ke RSUD menurun.

- Dampak pandemi Covid-19 berdampak pada realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah terlihat menurun pada tahun 2020. Jika dibandingkan sebelum pandemi kedua komponen PAD ini menunjukkan kinerja pertumbuhan positif.

2). *Pendapatan Transfer*

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat terdiri dari komponen Dana perimbangan seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, sedangkan dana transfer antar daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari provinsi dan bantuan keuangan.

Perkembangan kinerja realisasi pendapatan transfer tahun 2017-2021 cenderung berfluktuatif, realisasi tahun 2017 sebesar 1,725 triliun rupiah lebih, menurun tahun 2018 menjadi 1,623 triliun lebih, mengalami peningkatan tahun 2019 menjadi 1,829 triliun rupiah lebih dan dimasa pandemi pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 1,573 triliun rupiah lebih dan tahun 2021 menunjukkan peningkatan sedikit menjadi 1,574 triliun rupiah lebih dengan rata-rata pertumbuhan minus 1,78 persen.

Sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terealisasi pada tahun 2017 sebesar 1,313 triliun rupiah lebih dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,225 triliun rupiah lebih dengan

rata-rata pertumbuhan minus 1,54 persen, pada komponen Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi pada tahun 2017 sebesar 55,372 milyar rupiah lebih dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 28,832 milyar rupiah lebih dengan rata-rata pertumbuhan minus 9,80 persen dan pada komponen Dana Desa terealisasi pada tahun 2017 sebesar 105,860 milyar rupiah lebih dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 130,380 milyar rupiah lebih dengan rata-rata pertumbuhan 5,51 persen. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari dana bagi hasil provinsi dan bantuan keuangan terealisasi pada tahun 2017 sebesar 250,583 milyar rupiah lebih dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 189,978 rupiah lebih dengan rata-rata pertumbuhan minus 1,44 persen.

Kecendrungan fluktuatif realisasi pendapatan transfer dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana ke daerah berdasarkan tematik dan lokasi prioritas sehingga pendapatan daerah bersumber DAK berfluktuatif setiap tahun.
- Pandemi Covid-19 berdampak pada kurang maksimalnya pendapatan negara yang akhirnya berdampak pada penurunan alokasi dana perimbangan ke daerah
- Penurunan pendapatan transfer antar daerah, sejak pandemi mengalami penurunan alokasi dana bagi hasil dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi dan tidak adanya bantuan keuangan khusus dari Kabupaten Badung.

3). ***Lain – lain pendapatan Daerah Yang Sah***

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari komponen pendapatan hibah, Dana BOS dan

pendapatan lainnya. Dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari sebesar 19,224 miliar rupiah lebih pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar menjadi 117,420 miliar rupiah lebih pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 94,8 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya pergeseran alokasi Dana BOS dimana pada tahun 2017 termasuk komponen PAD namun sejak tahun 2018 dan seterusnya bergeser menjadi komponen lain-lain pendapatan yang sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah periode tahun 2017 – 2021 disajikan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertum (%)
	2017	2018	2019	2020	2021 (Realisasi unaudited)	
PENDAPATAN DAERAH	2,200,113,190,031	2,052,836,000,657	2,288,475,167,041	2,003,219,088,784	2,052,689,700,221	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	455,195,426,085	335,555,493,391	365,596,494,162	318,986,891,631	397,453,482,958	(1.37)
Pendapatan Pajak Daerah	124,234,062,680	133,652,474,409	155,755,834,812	118,257,303,529	136,713,798,655	3.91
Hasil Retribusi Daerah	17,076,083,898	19,056,986,034	20,319,816,298	19,809,775,071	36,147,505,908	24.55
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14,141,579,593	13,029,559,420	17,168,853,955	19,823,539,604	20,045,797,893	10.12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	299,743,699,914	169,816,473,528	172,351,989,097	161,096,273,427	204,546,380,502	(5.35)
PENDAPATAN TRANSFER	1,725,693,033,946	1,623,967,447,866	1,829,591,780,269	1,573,171,787,153	1,574,989,396,999	(1.78)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,475,109,074,606	1,386,924,356,773	1,468,565,599,719	1,353,566,117,453	1,385,011,331,074	(1.40)
- Dana Perimbangan	1,313,915,837,606	1,245,134,579,773	1,300,735,814,719	1,177,658,540,453	1,225,794,143,075	(1.54)
Bagi Hasil Pajak	24,108,450,527	24,498,664,444	16,946,359,776	30,863,634,723	33,107,529,975	15.05
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3,819,187,611	4,067,748,591	4,055,794,178	1,982,878,726	2,141,751,000	(9.22)
Dana Alokasi Umum	965,435,235,000	965,435,235,000	998,167,419,000	904,071,781,000	890,141,572,000	(1.89)
Dana Alokasi Khusus Fisik	139,001,553,800	64,707,270,589	98,757,997,165	57,420,495,056	131,714,466,466	21.68
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	181,551,410,668	186,425,661,149	182,808,244,600	183,319,750,948	168,688,823,634	(1.74)
- Dana Insentif Daerah	55,332,266,000	34,750,000,000	43,803,047,000	50,116,451,000	28,837,016,999	(9.80)
- Dana Desa	105,860,971,000	107,039,777,000	124,026,738,000	125,791,126,000	130,380,171,000	5.51
Pendapatan Transfer antar daerah	250,583,959,340	237,043,091,093	361,026,180,550	219,605,669,700	189,978,065,925	(1.44)
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	163,566,162,328	162,184,905,120	174,670,617,177	142,162,195,730	115,018,073,909	(7.71)
Bantuan Keuangan Provinsi dan kabupaten lainnya	87,017,797,012	74,858,185,973	186,355,563,373	77,443,473,970	74,959,992,016	18.33
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19,224,730,000	93,313,059,400.00	93,286,892,610	111,060,410,000	80,246,820,264	94.16
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Prundang-Undangan	19,224,730,000	93,313,059,400	93,286,892,610	111,060,410,000	80,246,820,264	94.16
Pendapatan hibah dari pemerintah	19,098,000,000	3,795,000,000	3,225,000,000	14,160,260,000	1,002,489,506	37.75
Pendapatan hibah BOS	-	89,512,359,400	89,984,832,610	96,900,150,000	79,056,072,000	(2.55)
Pendapatan lainnya	126,730,000	5,700,000	77,060,000	0	188,258,758	264.11

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng 2021

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah. Dapat dimaknai menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan administratif dan infrastruktur publik yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat melalui alokasi dana dalam APBD yang berkualitas. Komponen utama belanja daerah terdiri dari 4 kelompok besar yaitu belanja operasi; belanja modal; belanja tak terduga dan belanja transfer. Perkembangan realisasi belanja daerah berfluktuatif setiap tahun, tahun 2017 terealisasi sebesar 2,122 trilyun rupiah lebih, tahun 2018 menurun menjadi 2,064 trilyun rupiah lebih, tahun 2019 meningkat menjadi 2,253 trilyun rupiah lebih, memasuki masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 belanja daerah menurun menjadi 2,006 trilyun lebih dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 2,004 trilyun rupiah lebih. Perkembangan realisasi belanja masing-masing komponen sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bansos. Realisasi belanja operasi pada tahun 2017 sebesar 1,549 trilyun lebih meningkat menjadi 1,585 trilyun lebih dengan rata-rata pertumbuha sebesar 1,04 persen.

2) Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari belanja tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal tetap lainnya. Realisasi belanja modal pada tahun 2017 sebesar 295,220 milyar rupiah lebih menurun menjadi 176,520 milyar lebih dengan

rata-rata pertumbuhan sebesar minus 8,46 persen.

3) *Belanja Tak Terduga*

Belanja tak terduga realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19, sedangkan dalam kondisi normal realisasi dikisaran 5,1 milyar rupiah lebih sampai dengan 5,3 milyar rupiah lebih.

4) *Belanja Transfer*

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja transfer pada tahun 2017 sebesar 272,166 milyar rupiah lebih meningkat menjadi 236,969 milyar lebih dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 3,11 persen. Perkembangan realisasi belanja daerah periode 2017-2021 disajikan dalam table 3.3

Tabel 3.3

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017-2021

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumb (%)
	2017	2018	2019	2020	2021 (Realisasi unaudited)	
BELANJA DAERAH	2,122,121,857,988	2,064,477,377,253	2,253,959,308,383	2,006,101,484,208	2,004,210,231,574	(1.16)
BELANJA OPERASI	1,549,917,227,785	1,622,346,376,129	1,723,936,119,288	1,464,223,634,793	1,585,529,410,642	1.04
Belanja pegawai	813,487,114,965	846,251,700,286	846,125,769,825	807,030,781,147	847,840,859,277	1.11
Belanja Barang Jasa	624,689,025,270	685,887,780,451	748,488,283,551	625,200,702,646	670,796,301,720	2.44
Belanja Hibah	103,085,710,350	83,556,957,642	98,073,681,295	31,655,996,000	60,348,589,645	5.34
Belanja Bansos	8,655,377,200	6,649,937,750	31,248,384,617	336,155,000	6,543,660,000	523.61
BELANJA MODAL	295,220,710,245	204,310,158,600	274,879,718,609	259,440,204,131	176,520,790,673	(8.46)
Belanja Modal Tanah	812,283,680	6,641,791,759	3,403,833,192	270,182,400	-	119.21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75,804,456,249	52,646,111,082	75,950,418,445	54,617,759,864	70,967,788,739	3.89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45,132,074,595	33,919,485,250	92,317,497,175	176,506,273,399	47,144,796,616	41.31
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	140,702,104,123	87,422,414,086	79,445,029,927	12,776,306,003	49,313,392,048	38.77

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumb (%)
	2017	2018	2019	2020	2021 (Realisasi unaudited)	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32,769,791,598	23,680,356,423	23,762,939,870	15,269,682,465	9,094,813,269	(25.89)
BELANJA TAK TERDUGA	4,817,043,246	-	5,331,986	46,090,243,621	5,190,431,459	216,030
Belanja Tak Terduga	4,817,043,246	-	5,331,986	46,090,243,621	5,190,431,459	216,030
BELANJA TRANSFER	272,166,876,712	237,820,842,524	255,138,138,500	236,347,401,663	236,969,598,800	(3.11)
Belanja Transfer Bagi Hasil	16,400,000,000	17,297,396,900	14,947,500,500	11,875,752,163	11,594,367,300	(7.76)
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	255,766,876,712	220,523,445,624	240,190,638,000	224,471,649,500	225,375,231,500	(2.75)

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya dan pinjaman daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan dalokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Realisasi pembiayaan daerah periode lima tahun terakhir berflutuatif setiap tahun, tahun 2017 terealisasi 15,860 milyar rupiah lebih meningkat pada tahun 2018 menjadi 68,117 milyar rupiah lebih dan tahun 2019 menurun menjadi 41,3184 milyar rupiah lebih dimasa pandemi pada tahun 2020 realisasi pembiayaan daerah sebesar 71,434 dan tahun 2021 menurun menjadi 59,551 milyar rupiah lebih, dengan rata –rata pertumbuhan pembiayaan sebesar 86,60 persen yang disebabkan karena pertumbuhan tahun 2018 tumbuh sangat tinggi 300 persen lebih. Penerimaan pembiayaan bersumber dari penggunaan silpa tahun lalu dan dialokai untuk membiayai belanja program kegiatan dan penyertaan modal , seperti yang disajikan dalam table 3.4

Tabel 3.4

Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2021

URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumb
	2017	2018	2019	2020	2021 (Realisasi unaudited)	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH	-	11,641,376,596	-	2,882,395,424	-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	93,851,603,757	93,843,090,827	75,834,129,800	68,551,734,376	108,031,202,025	7.20
Silpa Riil	93,851,603,757	93,843,090,827	75,834,129,800	68,551,734,376	108,031,202,025	7.20
Pinjaman	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,698,000,000	25,726,000,000	15,157,443,084	4,400,000,000	9,000,000,000	33.24
Penyertaan Modal	10,698,000,000	25,726,000,000	15,157,443,084	4,400,000,000	9,000,000,000	33.24
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempopinjaman	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN BERSIH	-	11,641,376,596	-	2,882,395,424	-	

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Penyusunan neraca daerah dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, neraca daerah juga memberikan informasi penting kepada pihak Legislatif dan Lembaga Pemberi Pinjaman, serta masyarakat luas tentang posisi keuangan daerah. Neraca Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, seperti disajikan dalam Tabel 3.5

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan aset Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah aset mencapai 1,969 trilyun lebih lebih menjadi 2,780 trilyun lebih pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 9,09% rata-rata per tahun. Pertumbuhan tersebut didorong oleh

meningkatnya aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan investasi jangka panjang yang cukup signifikan dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 10,57%, 8,82, 8,78 % dan 13,67% rata-rata per tahun. Perkembangan aset ini memberi indikasi bahwa Kabupaten Buleleng memiliki potensi sumber pendanaan pembangunan. Perkembangan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Buleleng mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun dari 57,581 miliar rupiah lebih pada tahun 2016 menurun menjadi 28,888 miliar rupiah lebih pada tahun 2020. Disisi lain Ekuitas dana mengalami peningkatan dari 1,912 trilyun rupiah lebih pada tahun 2016 menurun menjadi 2,751 trilyun rupiah lebih pada tahun 2020.

Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi Neraca Daerah Tahun 2016-2020

URAIAN	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan
ASET	1,969,765,271,975	2,290,897,584,861	2,391,575,544,903	2,601,452,999,640	2,780,755,317,273	9.09
Aset Lancar	138,447,431,039	190,991,912,581	183,136,221,173	228,898,129,459	191,010,576,516	10.57
Kas	28,640,171,691	93,851,603,757	56,475,714,227	75,834,129,800	68,551,734,375	53.14
Piutang pendapatan	125,827,344,760	112,779,413,283	142,263,238,504	145,541,361,746	136,879,509,482	3.03
Piutang lainnya		-	30,163,070	22,557,881,788	63,949,447	0.00
Penyisihan piutang	(31,873,185,109)	(35,087,955,767)	(40,022,567,638)	(44,353,890,785)	(50,284,724,965)	12.09
Biaya dibayar dimuka	14,137,159	8,980,544	9,696,961	48,689,792	59,974,108	99.20
Persediaan	15,838,962,538	19,439,870,764	24,379,976,049	29,269,957,118	35,740,134,069	22.58
Investasi jangka Panjang	125,131,332,054	154,951,786,857	182,758,682,674	197,942,353,603	202,576,615,875	13.11
Investasi non permanen	98,936,210	145,284,813	272,154,990	355,281,431	366,690,025	41.98
linvestasi permanen	125,032,395,844	154,806,502,044	182,486,527,684	197,587,072,172	202,209,925,850	13.08
Aset tetap	1,657,188,963,424	1,911,320,058,035	1,965,604,617,179	2,117,436,868,359	2,315,873,891,568	8.82
Tanah	470,926,834,421	539,933,108,101	552,440,348,860	593,566,069,382	618,717,715,325	7.16
Peralatan dan mesin	401,562,513,110	467,490,118,133	507,695,191,178	583,286,241,606	638,517,628,408	12.34
Gedung dan bangunan	783,081,616,738	795,003,736,557	829,643,297,829	883,556,666,251	1,103,815,372,611	9.33
Jalan, jaringan dan instalansi	718,965,203,533	969,021,217,421	1,053,466,948,566	1,122,893,068,922	1,156,818,697,713	13.28
Aset tetap lainnya	59,053,092,149	76,389,281,242	72,415,640,309	93,567,730,752	108,146,910,004	17.24
Konstruksi dalam pengerjaan	43,557,634,839	27,058,103,848	27,159,614,318	40,701,367,635	24,086,600,679	-7.12
Akumulasi penyusutan	(819,957,931,366)	(963,575,507,267)	(1,077,216,423,881)	(1,200,134,276,189)	(1,334,229,033,172)	12.97
Dana cadangan	-	-	-	-	-	
Dana cadangan	-	-	-	-	-	
Aset lainnya	48,997,545,458	33,633,827,388	60,076,023,877	57,175,648,219	71,294,233,314	16.78
Tagihan jangka panjang	-	-	92,516,225	92,178,938	32,263,625	-16.34
Kemitraan dengan pihak ketiga	13,356,175,750	13,465,209,875	13,356,721,750	15,204,255,750	16,149,863,120	5.02
Aset tidak berwujud	989,422,660	892,966,800	647,493,200	495,995,550	592,517,810	-10.29
Aset lain-lain	34,651,947,048	19,275,650,713	45,979,292,702	41,383,217,981	54,519,588,759	28.98
KEWAJIBAN	57,581,337,010	15,493,165,743	12,501,315,689	14,289,529,889	28,888,073,443	6.02
Kewajiban jangka pendek	57,581,337,010	15,493,165,743	12,501,315,689	14,289,529,889	28,888,073,443	6.02
Pendapatan diterima dimuka	277,063,933	344,135,496	417,926,241	533,249,083	1,406,450,321	59.25
Utang Belanja	18,253,365,425	8,975,216,839	7,717,103,947	13,748,824,578	27,481,581,272	28.30
Utang jangka pendek lainnya	39,050,907,652	6,173,813,408	4,366,285,501	7,456,228	41,850	-78.18
Kewajiban jangka panjang	0	0	0	0	0	
EKUITAS DANA	1,912,183,934,967	2,275,404,419,122	2,379,074,229,218	2,587,163,469,756	2,751,867,243,835	9.67
Ekuitas Dana	1,912,183,934,967	2,275,404,419,122	2,379,074,229,218	2,587,163,469,756	2,751,867,243,835	9.67
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,969,765,271,977	2,290,897,584,865	2,391,575,544,907	2,601,452,999,645	2,780,755,317,278	9.09

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng 2021

Selanjutnya, untuk melihat kinerja sehat atau tidaknya pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisa tingkat likuiditas dan solvabilitas. Rasio Likuiditas dimaksudkan untuk melihat kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara, Rasio Solvabilitas adalah kemampuan daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 3.6
Tingkat Likuiditas dan Solvabilitas Keuangan Kabupaten
Buleleng Periode Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
LIKUIDITAS					
Rasio Lancar	2.40	12.33	14.65	16.02	6.61
Rasio Cepat	2.13	11.07	12.70	13.97	5.37
SOLVABILITAS					
Rasio Aset dan Hutang	34.21	147.87	191.31	182.05	96.26

Sumber : Badan Keuangan Daerah (diolah)

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan rasio likuiditas, yaitu Rasio Lancar dan Rasio Cepat menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, walaupun ada kecenderungan menurun pada tahun 2020. Sementara itu, kemampuan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total asset juga menunjukkan kemampuan yang sangat baik.

3.2. **KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MASA LALU**

Belanja Daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup:

- 1. Rasio Kemandirian Daerah;
- 2. Proporsi Penggunaan Anggaran;
- 3. Rasio Belanja Modal; dan
- 4. Analisis Pembiayaan.

3.2.1 Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017– 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	2,200,113,190,031	2,052,836,000,657	2,288,475,167,041	2,003,219,088,784	2,052,689,700,221
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	455,195,426,085	335,555,493,391	365,596,494,162	318,986,891,631	397,453,482,958
RASIO PAD	20.69	16.35	15.98	15.92	19.36
Pendapatan Transfer	1,725,693,033,946	1,623,967,447,866	1,829,591,780,269	1,573,171,787,153	1,574,989,396,999
RASIO Pendapatan Transfer	78.44	79.11	79.95	78.53	76.73

Sumber : BPKPD 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian Daerah Kabupaten Buleleng masih termasuk dalam kategori rendah karena angka rasio transfer masih lebih besar dibanding rasio PAD. Pergerakan dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi atas rasio kemandirian Daerah yang terlihat dari rasio PAD pada tahun 2021 mencapai 19,36 persen dibanding tahun 2017 sebesar 20,69 persen. Adapun rasio Pendapatan transfer menunjukkan perkembangan cenderung fluktuasi terlihat dari rasio transfer dari 78,44 persen pada tahun 2017 turun menjadi 76,73 persen di tahun 2021. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Buleleng masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Pusat meskipun pergerakan pada masa pandemi dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan.

3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel 3.6. Belanja pegawai pemenuhan kebutuhan aparatur diperhitungkan dari belanja gaji pegawai dan tenaga kontrak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Tabel 3.8
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Total Belanja (Rp)	2,122,121,857,988	2,064,477,377,253	2,253,959,308,383	2,006,101,484,208	2,004,210,231,574
Total Belanja Pegawai (Rp)	813,487,114,965	846,251,700,286	846,125,769,825	807,030,781,147	847,840,859,277
Proporsi Belanja Pegawai (%)	38.33	40.99	37.54	40.23	42.30

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng, 2021

Secara absolut belanja pegawai lima tahun terakhir mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017

sebesar 813,487 milyar rupiah lebih dan pada tahun 2021 menjadi 847,840 milyar rupiah lebih. Secara proporsi juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 proporsi belanja pegawai sebesar 38,33 persen, dan tahun 2021 menjadi 42,30 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan CPNS Formasi 2019 menjadi PNS di tahun 2021 dan kebutuhan penganggaran tambahan penghasilannya, kebutuhan penganggaran untuk PPPK yang telah lulus seleksi pada tahun 2020.

3.2.3 Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9
Rasio Belanja Modal Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Total Belanja (Rp)	2,122,121,857,988	2,064,477,377,253	2,253,959,308,383	2,006,101,484,208	2,004,210,231,574
Total Belanja Modal (Rp)	295,220,710,245	204,310,158,600	274,879,718,609	259,440,204,131	176,520,790,673
Proporsi Belanja Modal (%)	13.91	9.90	12.20	12.93	8.81

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng, 2021

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari rasio belanja modal 13,91 persen di tahun 2017 menurun menjadi 8,81 persen di tahun 2021. Penurunan rasio tersebut dipengaruhi dampak pandemi, dimana alokasi belanja difokuskan pada penanganan dampak pandemi sehingga belanja modal yang dilaksanakan lebih selektif hanya pada kegiatan yang memiliki daya ungkit pada pemulihan ekonomi dan menggunakan sumber dana yang bersifat terarah.

3.2.4 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya (pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, penerimaan kembali sisa Belanja atau akibat lainnya, sisa anggaran belanja, pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pembiayaan daerah, sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah, penerimaan dana cadangan serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari : Penyertaan Modal Pemerintah daerah serta pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit riil yang meliputi selisih pendapatan dengan belanja dan pengeluaran daerah. Defisit riil anggaran tahun 2017-2021 disajikan tabel 3.10.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

URAIAN	REALISASI				
	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Pendapatan Daerah	2,200,113,190,031	2,052,836,000,657	2,288,475,167,041	2,003,219,088,784	2,052,689,700,221
Dikurangi Realisasi					
Belanja Daerah	2,122,121,857,988	2,064,477,377,253	2,253,959,308,383	2,006,101,484,208	2,004,210,231,574
Defisit/Surplus Riil	77,991,332,043	(11,641,376,596)	34,515,858,658	(2,882,395,424)	48,479,468,647

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng, 2021

Dari Tabel 3.8 terlihat bahwa pada tahun 2018 dan 2020 mengalami defisit, namun pada tahun 2017, 2019 dan 2021 terjadi surplus anggaran. Selanjutnya Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dan 2020 ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah, dengan komposisi dalam Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11

Penutup Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten

BulelengTahun 2017-2021

NO	URAIAN	Total Defisit Riil				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penggunaan SiLPA	Surplus	11.642.376.596	surplus	2.882.396.424	surplus
2	Penerimaan Kembali InvestasiNon Permanen Lainnya	0	0	0	0	0
3	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
4	Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng 2021

Tabel 3.10 menunjukkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, tahun 2017 realisasi silpa sebesar 93,851 milyar rupiah lebih dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 108,031 milyar rupiah lebih yang bersumber dari sisa penghematan belanja akibat lainnya. Namun demikian hal tersebut, bukan berarti bahwa target kinerja dari Pemerintah daerah tidak tercapai. Sisa penghematan belanja bisa disebabkan karena adanya sisa-sisa kontrak, sisa anggaran karena harga satuan dan beberapa kegiatan yang terealisasi kurang dari 100 persen sampai akhir tahun.

Tabel 3.12

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten

BulelengTahun 2017 - 2021

URAIAN	REALISASI SILPA				
	2017	2018	2019	2020	2021
SILPA	93,851,603,757	56,475,714,231	75,837,129,800	68,551,734,375	108,031,202,024
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Dana Transfer	-	-	-	-	-
Pelampuan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14,598,000,000	719,459,400	-	-	-
Sisa Penghematan Belanja akibat lainnya dan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselisaikan	79,253,603,757	55,756,254,831	75,837,129,800	68,551,734,375	108,031,202,024

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Disamping itu kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Kondisi pandemi masih belum dapat dipastikan kapan selesainya, sejak diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* berdampak cukup parah pada lapangan usaha pariwisata, perdagangan, dan transportasi bahkan sebagian usaha akomodasi ada yang tutup sehingga berpengaruh pada pendapatan dari sektor pajak maupun retribusi daerah. Namun demikian pada tahun 2022 dan kedepannya diasumsikan kondisinya lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2020, sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak atas pandemic *Covid-19*. Proyeksi pendapatan daerah ditunjukkan dalam tabel 3.13.

Tabel 3.13

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun
2023-2026

URAIAN	KONDISI AWAL		PROYEKSI				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021 (Realisasi <i>unaudited</i>)	2022 (<i>Outlook</i>)	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN DAERAH	2,052,689,700,221	2,079,345,283,232	2,253,707,000,000	2,288,857,000,000	2,328,590,000,000	2,371,273,000,000	3.38
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	397,453,482,958	420,379,886,115	450,707,000,000	460,017,000,000	477,024,000,000	488,586,000,000	3.85
Pendapatan Pajak Daerah	136,713,798,655	157,676,579,841	170,200,000,000	176,640,000,000	188,396,000,000	198,458,000,000	5.93
Hasil Retribusi Daerah	36,147,505,908	47,248,782,500	51,521,000,000	53,291,000,000	55,891,000,000	57,391,000,000	5.01
Hasil Pengel Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20,045,797,893	19,822,033,435	24,606,000,000	24,606,000,000	27,257,000,000	27,257,000,000	8.73
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	204,546,380,502	195,632,490,339	204,380,000,000	205,480,000,000	205,480,000,000	205,480,000,000	1.25
PENDAPATAN TRANSFER	1,574,989,396,999	1,658,965,397,117	1,803,000,000,000	1,828,840,000,000	1,851,566,000,000	1,882,687,000,000	3.26
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,385,011,331,074	1,492,900,225,000	1,593,000,000,000	1,612,340,000,000	1,634,066,000,000	1,655,187,000,000	2.64
- Dana Perimbangan	1,225,794,143,075	1,326,128,581,000	1,422,000,000,000	1,441,340,000,000	1,463,066,000,000	1,484,187,000,000	2.89
DTU-Dana Bagi Hasil	35,249,280,975	26,245,319,000	30,000,000,000	30,000,000,000	32,000,000,000	33,000,000,000	6.02
Dana Alokasi Umum	890,141,572,000	890,141,572,000	967,000,000,000	986,340,000,000	1,006,066,000,000	1,026,187,000,000	3.66
Dana Alokasi Khusus Fisik	131,714,466,466	95,549,232,000	105,102,500,000	105,102,500,000	105,102,500,000	105,102,500,000	2.50
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	168,688,823,634	314,192,458,000	319,897,500,000	319,897,500,000	319,897,500,000	319,897,500,000	0.45
- Dana Insentif Daerah	28,837,016,999	40,643,358,000	41,000,000,000	41,000,000,000	41,000,000,000	41,000,000,000	0.22

URAIAN	KONDISI AWAL		PROYEKSI				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021 (Realisasi <i>unaudited</i>)	2022 (<i>Outlook</i>)	2023	2024	2025	2026	
- Dana Desa	130,380,171,000	126,128,286,000	130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000	0.77
Pendapatan Transfer antar daerah	189,978,065,925	166,065,172,117	210,000,000,000	216,500,000,000	217,500,000,000	227,500,000,000	8.65
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	115,018,073,909	139,829,476,285	170,000,000,000	175,000,000,000	180,000,000,000	190,000,000,000	8.23
Bantuan Keuangan Provinsi dan kabupaten lainnya	74,959,992,016	26,235,695,832	40,000,000,000	41,500,000,000	37,500,000,000	37,500,000,000	11.64
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	80,246,820,264	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Prundang- Undangan	80,246,820,264	-	-	-	-	-	-
Pendapatan hibah dari pemerintah	1,002,489,506						-
Pendapatan hibah BOS	79,056,072,000						-
Pendapatan lainnya	188,258,758						-

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD

Pendapatan Daerah tahun 2023-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,38 persen, tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2,253 trilyun rupiah lebih dan di akhir periode RPD 2023-2026 menjadi 2,371 trilyun rupiah lebih. Dari tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD dan Pendapatan Transfer sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak diproyeksikan.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2017 – 2021 dan kondisi sosial ekonomi atas dampak pandemi *Covid-19* sebagai dasar perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah yang tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta target pertumbuhan lapangan usaha pembentuk PDRB yang berpengaruh terhadap PAD. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023-2026 diproyeksi akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,85 persen. Tahun 2023 PAD diproyeksi sebesar 450,707 milyar rupiah lebih dan setiap tahunnya diproyeksi meningkat dan tahun 2026 sebesar 488,568 milyar rupiah lebih. Semua komponen PAD diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 8,73 persen, selanjutnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing 5,93 persen, 5,01 persen dan 1,25 persen. Proyeksi pendapatan transfer dihitung dengan memperhatikan realisasi pada masa sebelum

pandemi dan capaian realisasi masa pandemi dan evaluasi perkiraan tahun 2022. komponen pendapatan transfer dari dana perimbangan pada dana bagi hasil (DBH) sedangkan sumber dana DAU dan DAK diproyeksikan atau diasumsikan penerimaannya mengalami peningkatan sehubungan dengan adanya formasi dan pengangkatan P3K dan PNS serta kebijakan DAK walaupun dialokasikan berdasarkan tematik dan lokasi prioritas yang ditentukan sesuai kebijakan nasional tetapi terdapat juga kebijakan DAK regular dan pemerataan, pada pendapatan transfer antar daerah yang diproyeksikan pada Dana Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan. Pada komponen Dana Insentif Daerah diproyeksikan meningkat dengan mempertimbangkan penerimaan tahun 2022 sedangkan komponen Dana Desa diproyeksikan sesuai penerimaan tahun 2021. Pada lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan tidak ada penerimaan, walaupun tahun-tahun sebelumnya ada penerimaan hibah dan penerimaan lainnya namun kedepannya belum dapat dipastikan, disamping itu adanya perubahan kebijakan alokasi transfer keuangan daerah pada Dana BOS menjadi komponen kelompok dana perimbangan DAK Non Fisik sejak Tahun 2022.

3.3.1.2 *Proyeksi Belanja Daerah*

Proyeksi Belanja Daerah disajikan dalam tabel 3.14. Belanja Daerah tahun 2023-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,07 persen, tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2,200 trilyun rupiah lebih dan di akhir periode RPD 2023-2026 menjadi 2,356 trilyun rupiah lebih.

Proyeksi belanja daerah memperhitungkan arahan penggunaan sumber-sumber pendapatan dan kebutuhan prioritas daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi diproyeksikan meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,66 persen dengan perincian :
 - a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 1,49 persen per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
 - b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 1,87 persen per tahun. Kenaikan tersebut diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah seperti jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage, namun demikian perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap tahun anggaran untukantisipasi kegiatan pemilu dan pilukada tahun 2024.
 - c. Proyeksi belanja hibah dialokasikan meningkat rata-rata sebesar minus 3,85 persen pertahun.
 - d. Proyeksi belanja bantuan sosial tahun 2023 disumsikan tetap per tahunnya sama dengan belanja bantuan sosial tahun 2022.
- 2) Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,24 persen.
- 3) Belanja Tak Terduga sejak tahun 2023 diasumsikan tetap

yaitu sama dengan realisasi pada tahun 2021.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer dialokasikan kepada desa berupa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan dan dana desa. Belanja transfer diproyeksikan sesuai ketentuan perundangan dimana 10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk bagi hasil pada pemerintah desa dan 10 persen dari dana transfer umum untuk bantuan keuangan umum pada desa dan bantuan keuangan khusus pada desa dialokasikan tetap sedangkan dana desa dialokasikan sesuai besaran dana desa tahun 2021. Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan SPM, pelayanan dasar dan Prioritas pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

Tabel 3.14
Proyeksi Belanja Daerah tahun
2023-2026

URAIAN	KONDISI AWAL		PROYEKSI				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021 (Realisasi <i>unaudited</i>)	2022 (<i>Outlook</i>)	2023	2024	2025	2026	
BELANJA DAERAH	2,004,210,231,574	2,171,376,485,257	2,200,607,000,000	2,248,857,000,000	2,313,590,000,000	2,356,273,000,000	2.07
BELANJA OPERASI	1,585,529,410,642	1,731,587,092,639	1,760,842,000,000	1,767,581,000,000	1,818,451,000,000	1,848,921,000,000	1.66
Belanja pegawai	847,840,859,277	970,174,772,319	1,008,813,000,000	1,012,455,000,000	1,020,613,000,000	1,028,787,000,000	1.49
Belanja Barang Jasa	670,796,301,720	692,499,049,320	694,358,000,000	697,585,500,000	739,217,000,000	744,843,000,000	1.87
Belanja Hibah	60,348,589,645	63,595,771,000	52,353,000,000	52,223,000,000	53,303,000,000	69,973,000,000	3.85
Belanja Bansos	6,543,660,000	5,317,500,000	5,318,000,000	5,317,500,000	5,318,000,000	5,318,000,000	0.00
BELANJA MODAL	176,520,790,673	179,883,770,857	180,293,000,000	219,049,000,000	229,350,000,000	238,352,000,000	5.24
Belanja Modal Tanah	-	200,000,000	2,500,000,000	3,000,000,000	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,967,788,739	84,408,984,535	78,488,000,000	81,012,000,000	87,988,000,000	86,988,000,000	0.92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47,144,796,616	38,555,142,990	41,008,000,000	46,832,000,000	47,345,000,000	45,347,000,000	4.36
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49,313,392,049	35,842,766,799	38,297,000,000	67,405,000,000	73,217,000,000	85,217,000,000	26.97
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,094,813,269	20,876,876,533	20,000,000,000	20,800,000,000	20,800,000,000	20,800,000,000	(0.05)
BELANJA TAK TERDUGA	5,190,431,459	9,276,486,011	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-
Belanja Tak Terduga	5,190,431,459	9,276,486,011	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-
BELANJA TRANSFER	236,969,598,800	250,629,135,750	254,472,000,000	257,227,000,000	260,789,000,000	264,000,000,000	1.31
Belanja Transfer Bagi Hasil	11,594,367,300	20,550,000,000	22,172,000,000	22,993,000,000	24,389,000,000	25,500,000,000	5.56
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	225,375,231,500	230,079,135,750	232,300,000,000	234,234,000,000	236,400,000,000	238,500,000,000	0.90

URAIAN	KONDISI AWAL		PROYEKSI				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021 (Realisasi <i>unaudited</i>)	2022 (<i>Outlook</i>)	2023	2024	2025	2026	
BELANJA TRANSFER	236,969,598,800	250,629,135,750	254,472,000,000	257,227,000,000	260,789,000,000	264,000,000,000	1.31
Belanja Transfer Bagi Hasil	11,594,367,300	20,550,000,000	22,172,000,000	22,993,000,000	24,389,000,000	25,500,000,000	5.56
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	225,375,231,500	230,079,135,750	232,300,000,000	234,234,000,000	236,400,000,000	238,500,000,000	0.90

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD

Belanja daerah tahun 2023-2026 dirancang surplus setiap tahun, terlihat dari perbandingan pendapatan daerah dengan belanja daerah sebagai berikut:

TAHUN		2023	2024	2,025	2026	
PENDAPATAN		2,253,707,000,000	2,288,857,000,000	2,328,590,000,000	2,371,273,000,000	
BELANJA		2,200,607,000,000	2,248,857,000,000	2,313,590,000,000	2,356,273,000,000	
(SURPLUS)		53,100,000,000	40,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	

3.3.1.3 *Proyeksi Pembiayaan*

Pembiayaan Daerah untuk tahun 2023-2026 diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata 4,34 persen pertahun. Pada sisi penerimaan pembiayaan dari sumber Silpa diproyeksikan menurun setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan minus - 14,04 persen dengan pertimbangan adanya kebijakan pemerintah bahwa sisa anggaran yang sudah ditentukan penggunaannya akan diperhitungkan penyaluran tahun berikutnya, pada tahun 2023 dan 2024 juga dirancang pembentukan dana cadangan yang bersumber dari penyisihan pendapatan daerah yang diperuntukkan untuk menanggulangi pembiayaan pemilkada tahun 2024, besaran pembentukan dana cadangan sebesar 43,1milyar tahun 2023 dan 27 milyar tahun 2024. Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2023-2026 ditunjukkan dalam tabel 3.15

Tabel 3.15
Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun
2023-2026

URAIAN	KONDISI AWAL		PROYEKSI				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021 (Realisasi <i>unaudited</i>)	2022 (<i>Outlook</i>)	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN DAERAH	-	92,031,202,025	48,322,621,468	113,464,555,931	39,455,442,033	37,594,055,982	4.34
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108,031,202,025	108,031,202,025	58,322,621,468	126,464,555,931	54,455,442,033	52,594,055,982	2.62
Silpa/ Silpa Riil	108,031,202,025	108,031,202,025	58,322,621,468	56,364,555,931	54,455,442,033	52,594,055,982	(14.04)
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	70,100,000,000	-	-	
Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9,000,000,000	16,000,000,000	53,100,000,000	40,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	36.18
Pembentukan Dana Cadangan			43,100,000,000	27,000,000,000			
Penyertaan Modal	9,000,000,000	16,000,000,000	10,000,000,000	13,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	1.97
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN BERSIH	-	92,031,202,025	48,322,621,468	113,464,555,931	39,455,442,033	37,594,055,982	4.34

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD

3.3.2 *Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama*

Belanja dan Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Belanja dan Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga, belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.2.1 *Belanja Operasi*

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:

- a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga kontrak dengan SK Bupati.
- b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak.
- c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah pada lembaga yang dibentuk berdasarkan perundangan, pemilukada dan Hibah partai Politik.

3.3.2.2 *Belanja Tidak Terduga*

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan hibah yang tidak direncanakan.

3.3.2.3 *Belanja Transfer*

Belanja transfer dialokasikan kepada pemerintah desa berupa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan

keuangan dan dana desa. Belanja transfer diproyeksikan sesuai ketentuan perundangan dimana 10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk bagi hasil pada pemerintah desa dan 10 persen dari dana transfer umum untuk bantuan keuangan umum pada desa, sedangkan dana desa dialokasikan sesuai besaran dana desa tahun 2021 dan nantinya akan disesuaikan dengan besaran alokasi dana desa yang diterbitkan setiap tahun oleh pemerintah.

3.3.2.4 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku, namun dalam periode tahun 2017-2021 tidak dialokasikan pembentukan dana cadangan dan selanjutnya pada periode 2023-2026 dapat dialokasikan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 2023-2026 memperhatikan ketentuan penyertaan modal daerah, berdasarkan hal tersebut pengeluaran pembiayaan periode 2023-2026 setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.16

Tabel 3.16
Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib Daerah Tahun
2023 – 2026

URAIAN	KONDISI AWAL		PROYEKSI				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021 (Realisasi <i>unaudited</i>)	2022 (<i>Outlook</i>)	2023	2024	2025	2026	
BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN WAJIB DAERAH	1,284,154,592,845	1,432,889,361,492	1,476,058,000,000	1,486,005,000,000	1,500,175,000,000	1,512,010,000,000	1.36
BELANJA OPERASI	1,032,994,562,586	1,156,983,739,731	1,206,586,000,000	1,210,778,000,000	1,219,386,000,000	1,228,010,000,000	1.51
Belanja pegawai	847,840,859,277	970,174,772,319	1,008,813,000,000	1,012,455,000,000	1,020,613,000,000	1,028,787,000,000	0.63
Belanja Barang Jasa	184,010,757,309	185,666,021,412	186,500,000,000	186,950,000,000	187,400,000,000	187,850,000,000	0.14
Belanja Hibah	1,142,946,000	1,142,946,000	11,273,000,000	11,373,000,000	11,373,000,000	11,373,000,000	222
Belanja Bansos	-	-	-	-	-	-	
BELANJA TAK TERDUGA	5,190,431,459	9,276,486,011	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	(11.53)
Belanja Tak Terduga	5,190,431,459	9,276,486,011	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	(11.53)
BELANJA TRANSFER	236,969,598,800	250,629,135,750	254,472,000,000	257,227,000,000	260,789,000,000	264,000,000,000	1.31
Belanja Transfer Bagi Hasil	11,594,367,300	20,550,000,000	22,172,000,000	22,993,000,000	24,389,000,000	25,500,000,000	5.56
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	225,375,231,500	230,079,135,750	232,300,000,000	234,234,000,000	236,400,000,000	238,500,000,000	0.90
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9,000,000,000	16,000,000,000	10,000,000,000	13,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	1.97
Penyertaan Modal	9,000,000,000	16,000,000,000	10,000,000,000	13,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	1.97

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD

3.3.3 Penghitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Dari uraian-uraian sebelumnya, terkait proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja periodik wajib serta pengelurana pembiayaan wajib maka kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program kegiatan selama 4 (empat) tahun ke depan (2023-2026) disajikan dalam tabel 3.17

Tabel 3.17
Penghitungan Kapasitas riil Keuangan Daerah Tahun 2023-2026

URAIAN	KONDISI AWAL		PROYEKSI				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021 <i>unaudited</i>	2022 <i>(Outlook)</i>	2023	2024	2025	2026	
Pendapatan Daerah	2,052,689,700,221	2,079,345,283,232	2,253,707,000,000	2,288,857,000,000	2,328,590,000,000	2,371,273,000,000	0.84
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	108,031,202,025	108,031,202,025	58,322,621,468	56,364,555,931	54,455,442,033	52,594,055,982	(8.75)
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	70,100,000,000	-	-	
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	2,160,720,902,246	2,187,376,485,257	2,312,029,621,468	2,415,321,555,931	2,383,045,442,033	2,423,867,055,982	0.40
Dikurangi:							
Belanja Wajib Mengikat	1,284,154,592,845	1,432,889,361,492	1,476,058,000,000	1,486,005,000,000	1,500,175,000,000	1,512,010,000,000	-
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	876,566,309,401	754,487,123,765	835,971,621,468	929,316,555,931	882,870,442,033	911,857,055,982	0.68

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data kondisi eksisting, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Isu strategis juga merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan.

Saat ini, permasalahan dan tantangan pembangunan daerah, regional, nasional maupun internasional semakin bertambah sehubungan terjadinya pandemi *Covid-19* sejak awal tahun 2020 dan belum dapat dipastikan sampai kapan pandemi berakhir. Dampak pandemi sudah terjadi pada tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya, permasalahan dan tantangan pembangunan juga memperhatikan dampak pandemi.

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan

antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah.

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2021 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 Tahap IV. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan gambaran umum, hasil telaahan evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun 2017 – 2022, telaahan tahapan pencapaian RPJPD 2005-2025 serta permasalahan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2021, selanjutnya dianalisis permasalahan pembangunan jangka menengah yang perlu diperhatikan pada periode rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Permasalahan umum pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek mulai dari aspek fisik dan lingkungan, sosial kependudukan, aspek ekonomi, aspek infrastruktur dan pelayanan umum.

4.1.1.1. Permasalahan Aspek Fisik dan Lingkungan

Kabupaten Buleleng mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng terjal mencapai lebih dari 40% luas kabupaten, 41% lebih wilayahnya termasuk pada ketinggian 500-1000 mdpl dengan topografis Nyegara Gunung dimana jarak antara periran dengan perbukitan sangat tipis. Permasalahan umum terkait aspek fisik dan lingkungan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tutupan lahan baik di kawasan lindung maupun kawasan budidaya
2. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun.
3. Masih terdapat pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah industri maupun limbah padat (sampah)

4. Terdapat kawasan rawan bencana alam seperti tanah longsor, Banjir, gelombang pasang, gerakan tanah, dan kebakaran
5. Terdapat wilayah rawan kekeringan karena menurunnya sumber-sumber air baku

4.1.1.2. Permasalahan Aspek Sosial Kependudukan

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Buleleng terkait dengan aspek sosial kependudukannya adalah:

1. IPM Kabupaten Buleleng menempati urutan kelima (72.56, tahun 2021) dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, pembentuk IPM pada aspek pengeluaran perkapita yang disesuaikan cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2019 dan aspek umur harapan hidup dan aspek pendidikan mengalami peningkatan relatif kecil
2. Pertumbuhan penduduk yang relatif meningkat setiap tahun
3. Prosentase penduduk miskin diatas Provinsi Bali dan merupakan urutan ke 2 yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitarnya yaitu sebesar 6.12% pada tahun 2021. Angka kemiskinan cenderung mengalami peningkatan cukup signifikan dari 5,19 tahun 2019 menjadi 6,12% tahun 2021.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung meningkat, tahun 2019 sebesar 3,02% meningkat menjadi 5,38% tahun 2021, salah satu faktor yang berpengaruh adalah belum optimalnya kualitas tenaga kerja lokal
5. Ketimpangan Pendapatan Masyarakat 0,2820 Tahun 2021, hal tersebut menunjukkan pergeseran kelompok ketimpangan pendapatan masyarakat dari kelompok ketimpangan rendah walaupun nilainya tidak begitu besar.

4.1.1.3. Permasalahan Ekonomi

Permasalahan di bidang ekonomi Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya pertumbuhan lapangan usaha strategis penopang perekonomian daerah seperti lapangan pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha akomodasi, makan minum, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran
2. Kualitas tenaga kerja yang kurang sesuai dengan yang dibutuhkan di pasar kerja;
3. Belum optimalnya daya saing perekonomian daerah.
4. Struktur UMKM didominasi usaha mikro dan terdapat sektor informal
5. Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri pengolahan dan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi daerah
6. Belum optimalnya kondusifitas iklim investasi.

4.1.1.4. Permasalahan Infrastruktur

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Buleleng terkait infrastruktur

1. Belum optimalnya konektivitas antar pusat-pusat kegiatan wilayah, masih terdapat kondisi jalan rusak sedang dan berat sebanyak 28,33% dari total ruas jalan yang ada di Kabupaten Buleleng.
2. Saluran drainase belum mencakup seluruh wilayah kabupaten dan masih bercampur dengan air limbah (domestic dan non-domestik)
3. Pelayanan pengelolaan air limbah belum mencakup seluruh wilayah kabupaten.
4. Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum
5. Belum optimalnya jaringan irigasi
6. Belum optimalnya pengurangan sampah berbasis sumber dan masih minimnya sarana prasarana persampahan
7. Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan

4.1.1.5. *Permasalahan Pelayanan Umum*

- 1. Rendahnya angka partisipasi untuk jenjang pendidikan SMP
- 2. Distribusi sarana dan prasarana pendidikan belum merata.
- 3. Distribusi tenaga kesehatan yang kurang merata di seluruh kecamatan.
- 4. Aksesibilitas fasilitas kesehatan terbatas.
- 5. Pelayanan kesehatan belum sesuai standar.
- 6. Pengembangan iklim investasi yang belum optimal dalam meningkatkan jumlah investor ke Buleleng.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan rencana pembangunan daerah, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan sesuai prinsip good governance	Tata Kelola Pemerintahan yang belum efektif dan efisien, menyebabkan: <ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">▪ Kualitas perencanaan kinerja daerah yang belum optimal.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance) yang belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memadainya sarana dan prasarana e-Government dalam mendukung tata laksana pemerintahan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Publik yang belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan public belum maksimal
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kualitas manajemn ASN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SDM terampil dan berpendidikan memadai masih terbatas.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum maksimalnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas pengawasan perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan
2.	Belum optimalnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	<p>A.Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitasnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribusi sarana dan prasarana pendidikan belum merata ▪ Fasilitas dan tenaga pendidikan yang belum mencukupi sesuai kebutuhan riil

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kesadaran masyarakat Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat Aksesibilitas terbatas.
		B.Masih terancamnya kesehatan masyarakat (gizi buruk dan penyakit menular) yang disebabkan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai secara kualitas dan kuantitas 	<ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas fasilitas kesehatan terbatas Pelayanan kesehatan belum sesuai standar
		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kesadaran masyarakat
3.	Belum terwujudnya daya saing ekonomi daerah	Tingginya tingkat kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan PMKS
		Rendahnya daya saing ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya keterampilan masyarakat Belum optimalnya pengembangan wilayah untuk mendorong perekonomian Masih kurang kondusifnya iklim usaha serta belum terpadunya upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Belum optimal ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi dan pelayanan dasar	Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pertanian dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya pembangunan irigasi baru sesuai kebutuhan riil. ▪ Belum optimalnya pelayanan irigasi yang ada saat ini.
		Infrastruktur layanan dasar publik belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kualitas Jaringan jalan dan jembatan belum optimal ▪ Cakupan pelayanan air limbah domestic belum optimal ▪ Cakupan layanan persampahan belum optimal ▪ Kualitas Jaringan Irigasi yang belum optimal
		Sarana dan prasarana permukiman yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan sanitasi yang belum mencukupi. ▪ Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal.
5.	Turunnya kualitas lingkungan karena berkurangnya lahan lindung dan lahan pertanian	Terjadinya alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lemahnya pengendalian pemanfaatan lahan ▪ Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kawasan lindung masih rendah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Adanya pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya Indeks kualitas air ▪ Menurunnya Indeks tutupan lahan ▪ Menurunnya Indeks kualitas udara ▪ Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah masih kurang
6.	Stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat masih belum optimal	Sarana prasarana dibidang kebencanaan yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana belum banyak dilakukan dan sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas. ▪ waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran belum sebanding dengan luas wilayah penanganan ▪ Kesadaran masyarakat terhadap aturan dan tata tertib masih kurang berimbas kepada Penegakan hukum menjadi kurang efektif

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
7.	Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan lokal Bali sehingga perlu dilestarikan	Terjadinya perubahan cara pandang, sikap, dan perilaku terhadap nilai budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lemahnya perlindungan dan pengenalan peninggalan sejarah dan nilai budaya kepada masyarakat. ▪ Lemahnya perlindungan dan pengembangan terhadap kesenian lokal. ▪ Lemahnya Pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat adat yang ada di setiap wilayah

4.1.2 Perumusan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi- fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus

fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dilakukan identifikasi masalah pembangunan.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1) Urusan Pendidikan

- a) Belum terpenuhinya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai;
- b) Masih kurangnya tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik

2) Urusan Kesehatan

- a) SOP pelayanan kesehatan masih belum terupdate menyesuaikan standar/situasi terbaru;
- b) terbatasnya informasi yang dapat diperoleh dari masyarakat terkait upaya intervensi kasus stunting;
- c) Masih belum optimalnya akses terhadap kesehatan yang berkualitas, ini disebabkan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, tenaga kesehatan, jaminan pembiayaan kesehatan, serta luasnya cakupan pelayanan.
- d) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih perlu di tingkatkan. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), serta angka kesakitan dan kematian yang diderita oleh masyarakat, baik berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular perlu diturunkan.
- e) Kualifikasi pendidikan SDM khususnya dokter spesialis dan sub spesialis yang masih kurang.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Sebagian dari Perda Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan Peraturan-peraturan di atasnya;
- b) Masih rendahnya kapasitas Pengelolaan SPAM Perdesaan
- c) Kondisi jalan jalan mantap masih kurang dari 72 %

karena adanya peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten menyebabkan bertambahnya panjang jalan kabupaten sehingga berpengaruh terhadap target capaian kondisi jalan mantap.

- d) Belum optimalnya jaringan irigasi.
 - e) Belum optimalnya cakupan layanan air minum
 - f) Kondisi TPA Bengkala saat ini sudah overload dan terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana pendukung TPA karena sebagian besar sudah rusak berat dan berumur lebih dari 10 Tahun.
 - g) Belum adanya peraturan rinci tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang pada kawasan-kawasan yng ditetapkan sehingga pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang terbatas berdampak pada produktifitas kawasan belum optimal.
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a) Penanganan Rumah korban bencana yang belum maksimal;
 - b) Masih adanya rumah tidak layak huni yang dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - c) Masih terdapat kawasan kumuh terutama di kawasan perkotaan Singaraja yang secara bertahap perlu dilakukan penanganan secara komprehensif;
- 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
- a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi berbagai peraturan daerah guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b) Masih belum optimalnya peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban.
 - c) Belum memadainya sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana

- d) Sarana dan prasaran penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang kurang memadai.
- e) Masih rendahnya kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- f) Keterbatasan Personil baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang dimiliki.

6) Urusan Sosial

- a) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih perlu ditingkatkan.
- b) Meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat pandemi.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1) Urusan Tenaga Kerja

- a) Masih relatif tingginya angkatan kerja dengan keterampilan yang rendah dan belum sesuai kebutuhan pasar kerja, sehingga memiliki daya saing yang rendah.
- b) Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma-norma dan aturan ketenagakerjaan.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Capaian point hasil evaluasi Kategori Layak Anak yang secara rutin dinilai oleh Kementerian P3A belum bisa ditingkatkan secara signifikan.
- b) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c) Ditetapkannya 21 Desa/Kelurahan yang menjadi Lokus Stunting pada Tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah menjadi fokus pekerjaan yang mesti digarap dari berbagai sector.
- d) Belum terpenuhinya secara optimal hak-hak anak seperti akta kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman

3) Urusan Pangan

- a) Ketergantungan masyarakat akan konsumsi pangan utama beras masih tinggi.
- b) Belum optimalnya pola distribusi bahan pangan antar daerah sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut.
- c) Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan pasokan dan harga pangan
- d) Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beranekaragam, seimbang dan aman.

4) Urusan Pertanahan

- a) Kurangnya SDM teknis pertanahan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan;
- b) Masih banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat
- c) Belum tersedianya *database* tentang pemanfaatan lahan;

5) Urusan Lingkungan Hidup

- a) Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dari rumah tangga belum maksimal.
- b) Masih adanya pelaku usaha/kegiatan yang belum menerapkan pengelolaan limbah sebelum dilepas ke lingkungan.
- c) TP3R belum dapat dilaksanakan dengan optimal dalam upaya pengelolaan sampah untuk mengurangi kiriman sampah ke TPA.
- d) Kapasitas SDM petugas yang belum optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- e) Belum terpenuhinya luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana penunjang, serta sumber daya manusia dalam menunjang

fungsi pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

- b) Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat terkait kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Belum memadainya sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada masyarakat
- b) Belum berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan dan kurangnya peran serta lembaga keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha.
- c) Lemahnya proses pengadministrasian profil desa.
- d) Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Menurunnya persentase PUS yang memakai kontrasepsi modern (CPR) dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi karena alasan ekonomi.
- b) Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)

9) Urusan Perhubungan

- a) Masih Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan dan faktor lingkungan.
- b) Tidak sebandingnya pertumbuhan kendaraan bermotor dibandingkan dengan penambahan jalan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir menyebabkan terjadinya tundaan lalu lintas bahkan munculnya titik-titik kemacetan pada beberapa ruas jalan. Selain itu penambahan jumlah kendaraan pribadi juga menyebabkan penambahan penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir *on street*.

- c) Banyaknya ruas jalan dan persimpangan yang masih memerlukan pemasangan fasilitas keselamatan jalan seperti APILL, marka, rambu jalan, *Guadrail*, Cermin tikung serta pagar pengaman pejalan kaki.

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) Terbatasnya jumlah SDM di bidang TIK di Pemerintah Kabupaten Buleleng
- b) Belum optimalnya proses integrasi aplikasi yang tersebar di instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
- c) Penerapan e government belum optimal

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Sulitnya akses Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b) Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi berimbas kepada kurang optimalnya kinerja Koperasi.
- c) Pemanfaatan teknologi oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih kurang sehingga berdampak kepada lemahnya akses pasar.
- d) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi

12) Urusan Penanaman Modal

- a) Belum optimalnya identifikasi potensi investasi Kabupaten Buleleng.
- b) Belum ditetapkan regulasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko
- c) Tingkat kesadaran Pelaku Usaha belum sepenuhnya memahami perubahan regulasi
- d) Kondosifitas Iklim investasi belum optimal

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a) Belum optimalnya keterlibatan pemuda secara aktif dalam

kegiatan kepemudaan dan pengembangan jiwa kewirausahaan

- b) Belum optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta pemenuhan sarana dan prasarana olahraga

14) Urusan Statistik

- a) SDM bidang Statistik tidak ada yang secara khusus menguasai tentang ilmu statistik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik;

15) Urusan Persandian

- a) Kurangnya SDM dan sarana dan prasarana dibidang persandian
- b) Belum optimalnya antisipasi dalam menghadapi ancaman keamanan data dan informasi yang berkembang saat ini.
- c) Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan data dan informasi yang dimiliki.

16) Urusan Kebudayaan

- a) Melemahnya penggunaan Bahasa Daerah Bali dalam berkomunikasi sehari-hari, lebih-lebih terhadap penguasaan aksara Bali;
- b) Pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya termasuk nilai-nilai budaya dan cagar budaya masih sangat kurang;
- c) Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan lokal Bali sehingga perlu dilestarikan.

17) Urusan Perpustakaan

- a) Tidak adanya petugas khusus yang menangani/mengelola perpustakaan sekolah dasar maupun perpustakaan masyarakat.
- b) Kurangnya sarana mobil keliling dibandingkan luas wilayah yang dilayani.

18) Urusan Kearsipan

- a) Belum tersedianya Depo Arsip yang representatif/standar/gedung penyimpanan Arsip
- b) Masih rendahnya minat dan terbatasnya sumber daya aparatur di bidang *arsiparis*.

C. URUSAN PILIHAN

1) Urusan Pariwisata

- a) Masih kurangnya penegetahuan dan keterampilan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif Pengembangan destinasi pariwisata belum optimal;
- b) Masih banyaknya usaha industri pariwisata yang belum memiliki standar usaha.
- c) Belum optimalnya pengembangan pariwisata tematik di kawasan maupun Desa Wisata
- d) Kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan masih rendah;
- e) Aksesibilitas menuju destinasi pariwisata masih belum optimal;
- f) Penerapan konsep pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya dan lingkungan belum terintegrasi;
- g) Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata;

2) Urusan Pertanian

- a) Belum ada kebijakan yang efektif untuk menekan alih fungsi dan alih kepemilikan lahan pertanian produktif;
- b) Harga produk tidak menentu, dan anjloknya harga hasil pertanian pada musim panen raya;
- c) Ancaman kekeringan setiap tahun meningkat yang berdampak pada sulitnya memenuhi target luas panen;
- d) Pengolahan hasil pertanian belum optimal dan aktivitas pertanian cenderung terfokus pada sektor hulu;
- e) Kuarangnya SDM yang memadai untuk pelayanan kesehata hewan.

- f) Masih kurangnya minat pembudidaya ternak dan kurangnya akses modal
- g) Masih minimnya infrastruktur pertanian, khususnya menyangkut jaringan irigasi, jalan, dan industri pengolahan hasil-hasilnya;
- h) Ketergantungan petani pada pupuk anorganik, pestisida, masih sangat tinggi;

3) Urusan Perdagangan

- a) Masih minimnya jaringan pasar yang terbentuk;
- b) Masih lemahnya interaksi antar golongan pedagang, yang menyebabkan pedagang golongan ekonomi lemah sulit mengembangkan usahanya;

4) Urusan Perindustrian

- a) Keterampilan Sumber Daya Manusia masih rendah (SDM Pengerajin);
- b) Sarana Produksi belum memadai;
- c) Mutu Produk belum Optimal;
- d) Promosi produk unggulan belum optimal.
- e) Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri

D. URUSAN PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1) Perencanaan

- a) Belum optimalnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- b) Belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
- c) Belum optimalnya kapasitas SDM perencana.

2) Keuangan

- a) Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah modul Keuangan Daerah masih dihadapkan pada kendala-kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi;

- b) Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;
 - c) Kualitas sumber daya manusia/aparatur pemerintahan daerah belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - d) Belum optimalnya identifikasi aset pemerintah daerah;
- 3) Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
- a) Masih terdapat ketimpangan antara jumlah jabatan struktural dengan jumlah pegawai yang memiliki golongan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan
 - b) Belum optimalnya kapasitas, integritas dan disiplin aparatur dalam pencapaian kinerja yang maksimal
 - c) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja
- 4) Penelitian dan Pengembangan
- a) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan daerah.
 - b) Belum optimalnya peran dan fungsi kelitbangan daerah dalam penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah
 - c) Belum adanya tenaga fungsional kelitbangan.
- 5) Pengawasan
- a) Masih adanya obyek pemeriksaan yang belum paham dalam menindaklanjuti rekomendasi/hasil temuan;
 - b) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan tidak pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rekomendasi.

- 6) Sekretariat Daerah
 - a) Masih kurangnya sosialisasi produk hukum daerah.
 - b) Masih kurangnya kuantitas SDM pengelola aplikasi terkait pengadaan barang dan jasa.
 - c) Belum optimalnya capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- 7) Sekretariat DPRD
 - a) Belum optimalnya penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM kesekretariatan DPRD;
 - b) Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis demi kemajuan wilayahnya;
 - c) Perlunya peningkatan kapasitas DPRD dalam pembahasan produk legislasi daerah.
- 8) Kewilayahan
 - a) Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan publik dikarenakan keterbatasan sarana prasarana pendukung
 - b) Belum optimalnya koordinasi antara OPD teknis dengan kecamatan terkait pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan
- 9) Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - a) Masih perlu ditingkatkannya wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa di kalangan masyarakat
 - b) Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas dan LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah
 - c) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik, kedewasaan perilaku berdemokrasi serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

4.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Buleleng, dapat dirumuskan beberapa isu strategis. Isu strategis dirumuskan dengan melihat urgensi permasalahan-permasalahan yang ada untuk menjadi isu yang harus diutamakan. Terdapat beberapa isu strategis yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Isu Strategis Daerah

4.2.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia di suatu daerah merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas merupakan beberapa dari banyak dampak yang dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kinerja pemerintah yang kurang optimal juga dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia di dalam lingkungan pemerintahan. Yang dimaksud kualitas sumber daya manusia disini meliputi kualitas dalam hal kemampuan berpikir dan berinisiasi (kualitas intelektual); kualitas spiritual (termasuk didalamnya adalah sikap yang baik dan prinsip dalam mempertahankan nilai-nilai kebaikan); dan kualitas fisik atau kesehatan.

Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah adalah tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut. Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu masalah di Kabupaten Buleleng adalah mengenai masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada angka partisipasi penduduk untuk sekolah menengah, terutama sekolah menengah atas masih rendah. Sehingga masih sebagian besar penduduk hanya mendapat pendidikan SMP ke bawah. Hal ini menjadi masalah karena dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan formal dan pada akhirnya

akan berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan.

Selain mengenai tingkat pendidikan masyarakat, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah aspek kesehatan masyarakat.

4.2.1.2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Demikian juga dengan Kabupaten Buleleng, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng, masih rendah yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya.

Kemiskinan akan membatasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, air bersih dan tempat tinggal yang layak. Merupakan kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakatnya untuk dapat hidup sejahtera dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu peningkatan kemampuan ekonomi dengan penambahan pendapatan, dan juga pengurangan pengeluaran. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan peningkatan ketrampilan, pemberian bantuan modal, dan pemberdayaan yang lain. Adapun yang dimaksud dengan pengurangan pengeluaran meliputi subsidi dan pemberian bantuan.

4.2.1.3. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah / Infrastruktur Kabupaten Buleleng

Aksesibilitas yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuhnya perekonomian masyarakat, serta mendukung pelayanan publik lain di suatu daerah. Sebaliknya, sulitnya akses antara pusat pelayanan dan daerah layanannya, serta satu daerah ke daerah lain akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga menyulitkan masyarakat ketika akan mengakses pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Aksesibilitas dalam hal ini meliputi prasarana dan sarana transportasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya 58,93% jalan di Kabupaten Buleleng yang dalam kondisi baik (data tahun 2020), 11,14% dalam kondisi sedang dan sisanya mengalami kerusakan ringan dan berat.

Dengan membaiknya aksesibilitas di Kabupaten Buleleng masyarakat akan lebih mudah menjangkau pusat-pusat aktifitas, baik untuk mengakses pasar (untuk memasarkan dan belanja bahan baku), dan untuk mendapatkan pelayanan umum. Terbukanya aksesibilitas juga memudahkan distribusi barang dan jasa ke wilayah-wilayah terkecil. Gagasan untuk mendorong perkembangan agrowisata di Kabupaten Buleleng juga perlu didorong dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Dengan demikian masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah akan lebih mudah menjangkau kawasan-kawasan agrowisata yang berkembang di Kabupaten Buleleng.

4.2.1.4. Pelestarian adat dan budaya daerah

Seberapa penting arti dan peran kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Menurut filosofi masyarakat Bali, kedinamisan dalam hidup akan tercapai apabila terwujudnya hubungan yang harmonis antara aspek pawongan, palemahan dan parahyangan. Untuk itu pembangunan harus meliputi aspek-aspek tersebut atau yang biasa disebut Tri Hita Karana. Pawongan merupakan para penghuni rumah. Palemahan berarti harus ada hubungan yang baik antara penghuni rumah dan lingkungannya. Upaya pelestarian adat dan kebudayaan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang dan mencegah terjadinya dari kepunahan.

Kebudayaan Bali adalah aset yang sangat penting dan berharga, sehingga pembangunan kebudayaan Bali tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Akan tetapi, pembangunan kebudayaan Bali

saat ini tidak mengalami kemajuan secara signifikan karena politik legislasi dan politik anggaran yang kurang memadai. Budaya lokal tidak mengalami kemajuan yang berarti kecuali hanya untuk sarana komoditas ekonomi dan pariwisata saja. Selain itu, arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan kurang kuat. Permasalahan lainnya adalah eksistensi kebudayaan Bali (adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal) terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah dan kualitas, baik itu kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, dan pranata budaya.

4.2.1.5. Pemeliharaan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko dampak bencana

Kabupaten Buleleng dengan alamnya yang *Nyegara Gunung* telah menarik banyak orang untuk datang dan berwisata. Sebagian besar obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng berbasis wisata alam dan agrowisata. Fakta tersebut menjadi salah satu alasan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Buleleng untuk selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan keindahan alamnya. Selain untuk mendukung potensi wisata, upaya pelestarian lingkungan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang dan mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh rusaknya lingkungan.

Sebagian lahan di Kabupaten Buleleng merupakan lahan lindung, Buleleng harus dikendalikan dan diawasi dengan ketat untuk mencegah pembangunan berlebihan di kawasan dengan peruntukan lahan penyangga dan terlebih lagi di kawasan lindung. Berkurangnya lahan konservasi berpotensi untuk menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, ketersediaan air tanah juga akan terdampak oleh berkurangnya luasan daerah serapan.

Dampak dari kerusakan lingkungan di Kabupaten Buleleng, terutama dengan berkurangnya luasan lahan lindung dan pembangunan berlebihan di lahan penyangga tidak hanya akan

dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng, melainkan juga akan dirasakan masyarakat di daerah sekitarnya.

Selain bencana yang berpotensi terjadi sebagai akibat dari kerusakan lingkungan, masyarakat Kabupaten Buleleng juga dihadapkan dengan potensi bencana alam Banjir dan tanah longsor karena kondisi geografis yang *Nyegara Gunung* dengan lahan sebagian besar dikemiringan. Untuk itu pembangunan di daerah berpotensi bencana juga perlu dibatasi dan diatur secara tegas.

4.2.1.6. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien atau Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien atau Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan hukum dan kerangka politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam praktiknya, pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama untuk membicarakan berbagai permasalahan yang dihadapi bersama serta sekaligus merencanakan bersama pula mengenai sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa yang akan datang.

4.2.1.7. Peningkatan Produktifitas perekonomian daerah

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep green economy, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian green economy merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi.

Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi.

Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam green economy tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

Dimasa pandemi produktifitas perekonomian daerah cenderung menurun, tercatat lapangan usaha strategis seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan akomodasi dan makan minum terkontraksi cukup signifikan sehingga kedepannya menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produktivitas sektor-sektor penopang utama perekonomian daerah

4.2.1.8. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak

Dengan adanya agenda Pemilu 2024, dan Pemilukada serentak 2024. Tahapan Pemilu dan Pemilukada 2024 memang tidaklah berakhir setelah pemungutan suara. Masih ada banyak tahapan berikutnya yang justru krusial, mulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara, penentuan hasil pemilu, saling gugat di Mahkamah Konstitusi, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada pilpres putaran kedua jika pasangan calon presiden-wakil presiden berjumlah lebih dari dua. Tahapan pemilu dan Pemilukada baru berakhir setelah semua yang dipilih dilantik.

Pemilu dan Pemilukada serentak jika tidak disiapkan danantisipasi akan berpotensi kurang kondusifnya ketentraman, ketertiban umum wilayah disamping itu pelaksanaan pemilukada juga berpengaruh terhadap penganggaran APBD

4.2.2. Isu Strategis Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Isu strategis daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana diuraikan di atas dapat dirumuskan menjadi isu strategis berdasarkan urusan pemerintahan.

Tabel.4.2

Isu Strategis Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ISU STRATEGIS
1	PENDIDIKAN	a) Rendahnya angka partisipasi untuk jenjang pendidikan dasar.
		b) Distribusi sarana dan prasarana pendidikan belum merata.
		c) Kurangnya kesadaran pada sebagian masyarakat akan pentingnya meraih pendidikan tinggi
		d) Masih kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin
		e) Masih adanya putus sekolah, seperti tidak melanjutkan sekolah, DO (Drop Out), dikeluarkan dari sekolah
2	KESEHATAN	a) Distribusi tenaga kesehatan yang kurang merata di seluruh kecamatan.
		b) Aksesibilitas fasilitas kesehatan terbatas
		c) Pelayanan kesehatan belum optimal sesuai standar
		d) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan
		e) Jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan masih terbatas dan belum merata
		f) Tingkat Prevalensi Srunting yang masih perlu untuk diintervensi.
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	a) Kondisi sanitasi permukiman relatif belum baik
		b) Pengembangan prasarana drainase perkotaan (Saluran drainase belum mencakup seluruh wilayah kabupaten dan masih bercampur dengan air limbah)
		c) Kondisi jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten diperlukan pemeliharaan berkala agar statusnya menjadi baik.
		d) Peningkatan dan pemerataan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ISU STRATEGIS
		e) Pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat dan komunal
		f) Pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan
		g) Pembangunan yang masif tanpa memperhatikan tata ruang
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	a) Banyak rumah dalam kondisi fisik yang mendesak untuk diperbaiki (Pasca Bencana)
		b) Penanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	a) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana kepada masyarakat
		b) Penerapan jaringan Mitigasi dan evakuasi bencana
		c) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
		d) Penegakan PERDA
6	Sosial	a) PMKS yang memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar.
		b) Penanganan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social
		c) Penurunan angka kemiskinan
7	Tenaga Kerja	a) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
		b) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
		c) Penyediaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten
		d) Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi
8	Penanaman Modal	a) Jumlah Investasi PMDN/PMA (formal) di Kabupaten Buleleng

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ISU STRATEGIS
		b) Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
9	Pangan	a) Tingkat Ketersediaan pangan utama
		b) Ketersediaan cadangan pangan
		c) Lumbung pangan
10	Lingkungan Hidup	a) Belum efektifnya penanganan sampah melalui 3R (Reuse, Reduce, Recycle)
		b) Infrastruktur penanganan sampah yang masih kurang
		c) Pengembangan dan Pemantapan TPA (Lahan TPA yang sudah overload perlu perluasan areal sehingga penanganan sampah maksimal)
		d) Pengelolaan dan pemeliharaan RTH
		e) Pembangunan yang masif tanpa memperhatikan tata ruang
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a) Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil dan menengah
		b) Koperasi Aktif
12	Urusan Kebudayaan	a) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
		b) Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
		c) Peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing
13	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
		b) Cakupan KOTA Layak Anak
		c) Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
14	Urusan Pariwisata	a) Pengembangan Ekonomi kreatif

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ISU STRATEGIS
		b) Meningkatkan length of stay wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat
		c) Industri pariwisata yang memenuhi standar usaha pariwisata
15	Urusan Pertanian	a) Penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		b) Peningkatan populasi Ternak
		c) Peningkatan Produksi Pertanian
		d) Pengelolaan pertanian hingga saat ini masih dikelola secara tradisional sehingga hasil produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim
16	Urusan Perdagangan	a) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
		b) Bahan Pokok Penting (Bapokting) tersedia cukup di Pasar Buleleng
17	Urusan Perindustrian	a) Kontribusi Sektor Industri PDRB HB
		b) Pertumbuhan Industri skala kecil
18	Urusan Perikanan	a) Jumlah Produksi Ikan (ton)
		b) Perikanan Budi daya yang masih perlu dikembangkan
19	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	a) Indeks perkembangan kawasan perdesaan
		b) Belum berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan dan kurangnya peran serta lembaga keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha
20	Urusan Komunikasi dan Informatika	a) Indeks domain tata kelola SPBE belum optimal
		b) Keterbatasan infrastruktur jaringan sehingga belum mampu menyediakan akses internet yang baik secara merata di wilayah Kabupaten Buleleng

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ISU STRATEGIS
21	Unsur Penunjang penyelenggaraan pemerintahan (Perencanaan)	Capaian Kinerja pembangunan Daerah yang belum optimal dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintahan
22	Unsur Penunjang penyelenggaraan pemerintahan (Keuangann)	a) Peningkatan Capaian Akuntabilitas Keuangan menuju tata kelola keuangan daerah yang optimal.
23	Unsur Pengawasan	a) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan tidak pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rekomendasi
		b) Peningkatan kualitas pengawasan secara optimal
24	Unsur Pendukung penyelenggaraan pemerintahan	a) Kualitas pelayanan public kepada masyarakat yang belum optimal.
		b) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 yang disampaikan kepada rakyat Buleleng pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017. Jadi visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah visi dan misi pilihan rakyat Buleleng. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng terpilih tahun 2017-2022 juga merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012- 2017. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2012-2017.

Periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng akan berakhir pada tahun 2022. Kabupaten Buleleng juga salah satu kabupaten yang akan melaksanakan rencana pemilukada serentak ditahun 2024, sehingga akan ada kekosongan Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang definitip sampai dilaksanakannya pemilukada serentak ditahun 2024. Dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dalam instruksinya Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dalam hal proses penyusunan, didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

5.1.1. Visi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025`

Berdasarkan perhitungan atas potensi daerah Kabupaten Buleleng, faktor-faktor strategis lain yang mungkin mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, dan berpedoman pada amanat pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dirumuskan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

**“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya
Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu. Secara harafiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, parahyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan

pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diwujudkan dengan melaksanakan lima Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng berikut.

5.1.2. Misi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025

Visi Pembangunan Buleleng “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana” merupakan kondisi yang ingin dicapai tahun 2025. Untuk mencapainya dilaksanakan misi berikut secara bertahap.

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Misi 3: Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Misi 4: Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Tabel 5.1
TAHAPAN PENCAPAIAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

MISI	TAHAPAN PENCAPAIAN			
	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025
1. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Unggul dan Kompetitif	Penuntasan pendidikan dasar 9 tahun dan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Pengenalan Wajib belajar 12 tahun dan jaminan kesehatan masyarakat yang berkualitas`	Penuntasan wajib belajar 12 tahun, asuransi kesehatan untuk semua, dan penguasaan sains dan teknologi	Masyarakat unggul, kompetitif, menguasai sains dan teknologi untuk menunjang daya saing

MISI	TAHAPAN PENCAPAIAN			
	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025
2. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang sejahtera	Pembangunan ekonomi di sektor prioritas sesuai potensi daerah didukung infrastruktur dan investasi	Peningkatan daya saing dan keseimbangan perekonomian di sektor pertanian (agrobisnis), industri, dan pariwisata agar pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat meningkat didukung infrastruktur dan investasi	Pemantapan daya saing dan keseimbangan perekonomian di sektor-sektor pertanian, industri, dan pariwisata agar pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat meningkat dan mantap didukung oleh infrastruktur yang handal dan investasi	Pemantapan daya saing dan keseimbangan perekonomian di sektor-sektor prioritas agar pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat meningkat dan mantap didukung oleh infrastruktur yang handal, investasi, serta penggunaan sains dan teknologi
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat	Penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban	Penegakan hukum dan tramtib, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel	Penegakan hukum dan tramtib, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel	Penegakan hukum dan tramtib, serta pemantapan kualitas pelayanan publik yang murah, cepat, transparan dan akuntabel didukung penggunaan sains dan teknologi

MISI	TAHAPAN PENCAPAIAN			
	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2022-2025
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global	Pengembangan nilai, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	Pemantapan pengembangan nilai, pengelolaan dan pengembangan kekayaan budaya	Pemantapan pengembangan nilai, pemantapan pengelolaan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya dan penghormatan terhadap multikulturalisme	Pemantapan pengembangan nilai, pemantapan pengelolaan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya dan penghormatan terhadap multikulturalisme, berbasis sains dan teknologi
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	Peningkatan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan	Pemantapan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan	Pemantapan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan didukung oleh sains dan teknologi

5.2 Tujuan dan Sasaran

Misi pembangunan Kabupaten Buleleng diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk 1) Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Unggul dan Kompetitif; 2) Mewujudkan masyarakat Buleleng yang sejahtera; 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat; 4) Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Buleleng yang sejahtera. Misi pembangunan ini tetap dalam kerangka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buleleng 2015 – 2025. Kerangka Logis Pencapaian Misi “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Unggul dan Kompetitif”, yang mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagai berikut :

- 1 Tujuan 1 :** Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif
 - Sasaran :**
 - 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - 2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
 - 3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
 - 4. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
- 2 Tujuan 2 :** Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing
 - Sasaran :**
 - 1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah
 - 2. Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan
 - 3. Stabilitas harga - harga bahan pokok penting
- 3 Tujuan 3 :** Meningkatnya kualitas infrastruktur
 - Sasaran :** Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
- 4 Tujuan 4 :** Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial
 - Sasaran :**
 - 1. Menurunnya penduduk miskin

2. Meningkatnya Penanganan PMKS

5 Tujuan 5 : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat

6 Tujuan 6 : Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari

Sasaran : Meningkatnya pelestarian adat dan budaya

7 Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas air

2. Meningkatnya kualitas udara

3. Meningkatnya tutupan lahan

4. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang

8 Tujuan 8 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran : 1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)

2. Meningkatnya kualitas layanan publik

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan

4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

5. Meningkatnya kualitas manajemen ASN

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Secara umum penjabaran atas visi misi RPJPD kedalam tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 mengacu pada pendekatan kinerja pembangunan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dirumuskan penjabarannya menjadi 8 Tujuan, dan jumlah sasaran 22. Lebih lanjut akan diuraikan dalam Tabel 5.1 Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Indikator RPD Kabupaten Buleleng.

5.2.1. Penyelarasan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

Visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 terkait dalam hal mendukung Misi RPJPD Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025. Adapun visi RPJPD Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025 yaitu “*Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana*”

Terdapat 5 misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025. Lima misi tersebut dijabarkan kedalam 8 tujuan yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 seperti tertuang pada gambar 5.1 berikut :



Gambar 5.1

Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 dengan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

Tabel 5.2

Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan 1		Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif									
	Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Nilai	72,56	73,20	73,55	73,90	74,10	74,10	
	Sasaran		1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	Angka	71,95	72,34	72,66	72,86	73,05	73,05	Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
			2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,25	7,27	7,27	7,31	7,33	7,33	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng

NO	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	13,08	13,27	13,29	13,38	13,48	13,48	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng
				3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Tahun	100	100	100	100	100	100	Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng.
			3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	72,89	73,00	73,50	74,00	75,00	75,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng
			4. Meningkatnya kompetensi ketenaga kerjaan	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,38	3,3	3,0	2,8	2,4	2,4	Dinas Tenaga Kerja Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Nilai	74,86	75,56	76,26	76,76	77,26	77,26	Dinas Tenaga Kerja Kab.Buleleng
2	Tujuan 2		Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing									
	Indikator Tujuan		PDRB dan PDRB Perkapita		Angka	22,277 T /28,134 jT	23,648 T/	24,476 T/	25,431 T/	26,601 T/	26,601 T/	
	Sasaran		1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	%	-1,22	3,3	3,5	3,95	4,6	4,6	
			2. Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan	Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai	60,49	61,50	62,00	63,00	64,50	64,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buleleng

NO	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Stabilitas harga - harga bahan pokok penting	Laju Inflasi	%	2,39	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKab. Buleleng
3	Tujuan 3		Meningkatnya kualitas infrastruktur									
	Indikator Tujuan		Indeks infrastruktur wilayah		Nilai	77,50	79,13	80,05	80,86	81,78	81,78	
	Sasaran		Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	1. Persentase Kondisi jalan dan jembatan mantap	%	71,07	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
				2. Persentase Keamanan, keselamatan, ketertibandan kelancaran lalu lintas Perhubungan	%	83,66	89,00	90,00	90,33	91,33	91,33	Dinas Perhubungan Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap	%	78.24	78,56	79,00	79,50	80,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
				4. Persentase Capaian Pelayanan Air Minum	%	86,74	87,00	87,50	88,00	88,50	88,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
				5. Persentase pelayanan limbah air	%	94,00	94.46	94,56	94,66	94,76	94,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
				6. Persentase panjang saluran drainase Dalam Kondisi Baik	%	47.67	48,27	48,88	49,48	50,09	50,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7. Persentase pengembangan sistem persampahan	%	37,21	41,86	46,51	51,16	55,81	55,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
4	Tujuan 4	:	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial									
	Indikator Tujuan	:	1. Persentase penduduk miskin		%	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6	
			2. Persentase PMKS tertangani		%	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	
	Sasaran	:	1. Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6	Dinas Sosial Kab.Buleleng
			2. Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	%	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	Dinas Sosial Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Tujuan 5		Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat									
	Indikator Tujuan		Persentase Penanganan Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat (Trantibum linmas)		%	100	100	100	100	100	100	
	Sasaran		Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	1. Persentase Penanganan bencana	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	BPBD Kab.Buleleng, dan Dinas Pemadam Kebakaran,Kab.Buleleng
				2. Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum)	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Tujuan 6		Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari								
	Indikator Tujuan		Persentase pelesetarian adat budaya	%	14,00	23,88	32,37	41,65	51,10	51,10	
	Sasaran		Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	1. Persentase Cagar budaya yang lestari	%	20	30	40	50	60	Dinas Kebudayaan Kab.Buleleng
				2. Persentase Budaya tak benda yang lestari	%	16,67	33,33	50,00	66,67	83,83	Dinas Kebudayaan Kab.Buleleng
				3. Persentase desa adat yang lestari`	%	26,66	32,57	39,67	47,95	57,42	Dinas Kebudayaan Kab.Buleleng
7	Tujuan 7		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
	Indikator Tujuan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	70,00	70,05	70,11	70,13	70,14	70,14	

NO	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran		1. Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Nilai	64,17	59,10	59,10	59,12	59,14	59,14	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
			2. Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Nilai	88,52	89,65	89,76	89,79	89,80	89,80	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
			3. Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	Nilai	52,44	52,60	52,66	52,68	52,68	52,68	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
			4. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang	%	70	75	76	77	78	78	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kab.Buleleng
8	Tujuan 8		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien									
	Indikator Tujuan		Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya reformasi birokrasi daerah yang berkualitas	Nilai	60,58	60,58	60,60	60,65	60,66	60,66	

NO	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,30	3,10	3,20	3,30	3,40	3,40	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Buleleng
			2. Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	%	85	90	90	90	95	95	Seetda Kab.buleleng
			3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	Nilai	68,85	70	70,01	70,01	70,02	70,02	Bagian Organisasi Setda Kab.buleleng
			4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	0	77	78	79	80	80	Badan Pengelolaan Keuanagn dan Pendapatan Daerah Kab.buleleng

NO	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5. Meningkatnya kualitas manajemn ASN	Indeks Merit sistem	Nilai	100	150	200	250	300	300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kab.Buleleng
			6. Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah Kab.Buleleng

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buleleng merupakan pendekatan dari pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD ini. Dengan pendekatan ini diharapkan gagasan mengenai transformasi, reformasi dan upaya perbaikan manajemen kinerja birokrasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan hingga evaluasi dapat diterjemahkan dengan baik menjadi program pembangunan 2023– 2026.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan faktor atau lingkungan strategis yang mempengaruhi upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPD ini. Faktor-faktor pengaruh tersebut berada dalam lingkungan internal dan eksternal yang memiliki keterkaitan signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buleleng.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan ini merupakan strategi pencapaian dari tujuan dan sasaran dalam RPD, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari lingkungan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buleleng. Strategi dalam hal ini merupakan rujukan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara konseptual strategi ini dirumuskan dengan memandang beberapa tujuan dan dan sasaran pembangunan sebagai sebuah satu kesatuan. Sehingga kemudian rumusan

strategi yang dihasilkan juga merupakan satu rangkaian tindakan strategis dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah 2005-2025. Satu strategi dapat saja terhubung secara spesifik dengan satu tujuan atau sasaran. Namun dapat juga satu strategi terkait dengan beberapa tujuan atau sasaran sekaligus, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1

Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
1	Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Optimalisasi sistem kesehatan masyarakat
			2. Percepatan penurunan stunting
		2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan ksesibilitas dan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan
		3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Peningkatan pengarusutamaan gender
		4. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan daya saing tenaga kerja
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	1. Meningkatkan kemudahan berinvestasi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
			2. Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan
			3. Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata
			4. Meningkatkan sebaran industri pengolahan
			5. Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM
			6. Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi
			7. Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal
		2. Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat
		3. Stabilitas harga harga bahan pokok penting	Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar
			2. Peningkatan kualitas kinerja persampahan
4	Meningkatnya penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial	1. Menurunnya penduduk miskin	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
		2. Meningkatnya Penanganan PMKS	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS
5	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	1. Peningkatan mitigasi bencana daerah dan penanganan bencana
			2. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum
6	Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Peningkatan penggalan, pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas air	Peningkatan kualitas air dan udara

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
		2. Meningkatnya kualitas udara	
		3. Meningkatnya tutupan lahan	Peningkatan tutupan vegetasi pada perkotaan dan lahan kritis
		4. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang	Peningkatan konsistensi penataan ruang
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik
		2. Meningkatnya kualitas layanan publik	
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
		4. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
		6. Meningkatnya kualitas pengawasan	

6.2 Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian pilihan tindakan yang membentuk skenario pembangunan dalam jangka 4 tahun ke depan. Strategi juga menjadi tema pembangunan tahunan untuk periode 4 tahun. Tema pembangunan ini adalah arah kebijakan pembangunan daerah.

Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tindakan yang harus dilakukan. Setiap tahun rencana pembangunan memiliki penekanan atau prioritas tertentu yang mengarahkan untuk perumusan program dan kegiatan pembangunan.,sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.2

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN			
			2023	2024	2025	2026
1	Optimalisasi sistem kesehatan masyarakat	1. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat				
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan				
		3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan				

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN			
			2023	2024	2025	2026
2	Percepatan penurunan stunting	Konvergensi integrasi penurunan stunting				
3	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan	Pemenuhan layanan pendidikan merata dan berkualitas				
4	Peningkatan pengarusutamaan gender	1. Menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender				
		2. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan				
5	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	1. Pengembangan Pendidikan dan pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja				
		2. Mengembangkan				

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN			
			2023	2024	2025	2026
		Pendidikan dan latihan kewirausahaan di tingkat pemula dan menengah				
6	Meningkatkan kemudahan berinvestasi	Meningkatkan pelayanan perijinan berbasis elektronik				
7	Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan Perikanan	Pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan				
8	Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata	Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif				
9	Meningkatkan sebaran industri pengolahan	Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industri				
10	Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM	Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM				
11	Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi				
12	Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usahai nformal	Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal				

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN			
			2023	2024	2025	2026
13	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat	Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting				
14	Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting	Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting				
15	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar	1. Meningkatkan kualitas konektivitas pusat pusat kegiatan wilayah				
		2. Meningkatkan sarana prasarana kelengkapan jalan				
		3. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi				
		4. Mengembangkan jaringan air minum perpipaan perkotaan dan perdesaan				
		5. Mengembangkan prasarana air limbah domestik				
		6. Meningkatkan kualitas jaringan drainase				

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN			
			2023	2024	2025	2026
16	Peningkatan kualitas kinerja persampahan	1. Mengembangkan prasarana persampahan skala kabupaten dan skala kawasan				
		2. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan				
17	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1. Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial				
		2. Meningkatkan penanganan RTLH dan kawasan kumuh				
18	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial				
19	Peningkatan mitigasi bencana daerah dan penanganan bencana	1. Peningkatan deteksi dini dan desa tangguh bencana				
		2. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan				
20	Peningkatan	Meningkatkan				

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN			
			2023	2024	2025	2026
	Ketentraman dan ketertiban umum	penegakan peraturan daerah				
21	Peningkatan penggalian, pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat	1. Melestarikan bendasisu dan cagar budaya				
		2. Pengembangan dan pelestarian lembaga adat dan kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan adiluhung				
22	Peningkatan kualitas air dan udara	Pengendalian pencemaran air dan udara				
23	Peningkatan tutupan vegetasi pada perkotaan dan lahan kritis	Pengelolaan RTH publik dan Gerakan penghijauan				
24	Peningkatan konsistensi penataan ruang	Pemenuhan regulasi dan pengendalian pemanfaatan ruang				
25	Implementasi reformasi	1. Peningkatan kualitas SDM dan				

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN			
			2023	2024	2025	2026
	birokrasi dan pelayanan publik	sarana prasarana e-Government				
		2. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.				
		3. Peningkatan kualitas pengelolaan ASN				
		4. Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan daerah				

Tema fokus pembangunan dan perumusan arah kebijakan tahun 2023-2026 **“Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”**

Tabel 6.3
Tema Fokus Pembangunan Tahun 2023-2026

TEMA FOKUS PEMBANGUNAN			
2023	2024	2025	2026
“Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”	“Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”	“Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”	“Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”
JABARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN			
1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Perekonomian Daerah berbasis potensi unggulan	2. Peningkatan Perekonomian Daerah berbasis potensi unggulan	2. Peningkatan Perekonomian Daerah berbasis potensi unggulan	2. Peningkatan Perekonomian Daerah berbasis potensi unggulan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar	3. Peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar	3. Peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar	3. Peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar
4. Penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial	4. Penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial	4. Penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial	4. Penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	5. Pemantapan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	5. Pemantapan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	5. Pemantapan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat
6. Pelestarian adat dan budaya lokal.	6. Pelestarian adat dan budaya lokal.	6. Pelestarian adat dan budaya lokal.	6. Pelestarian adat dan budaya lokal.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.	7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.	7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.	7. Peningkatan kualitas Lingkungan hidup.

TEMA FOKUS PEMBANGUNAN			
2023	2024	2025	2026
8. Peningkatan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	8. Peningkatan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	8. Peningkatan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	8. Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah kemudian dirumuskan dengan menjabarkan strategi pembangunan daerah berdasarkan kebijakan umum dan kemudian ditambahkan dengan program. Rumusan program pembangunan daerah tersebut kemudian dilengkapi dengan indikator capaiannya

Tabel 6.4

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan rencana program dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi sistem kesehatan masyarakat	1. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Capaian Kinerja UKM dan UKP di Kabupaten
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan dengan sertifikasi sesuai standar

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
		3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai standar
2	Percepatan penurunan stunting	Konvergensi integrasi penurunan stunting	1. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase desa dengan partisipasi dan Kemandirian bidang kesehatan (desa siaga aktif mandiri)
			2. Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga
			3. Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Kelahiran Total (TFR)
3	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan	Pemenuhan layanan pendidikan merata dan berkualitas	1. Program pengelolaan pendidikan	Persentase peningkatan akses dan kualitas pendidikan
			2. Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase kualitas guru dan tenaga kependidikan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
			3. Program pembinaan perpustakaan	Persentase pengelolaan perpustakaan sekolah dan desa sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)
4	Peningkatan pengarusutamaan gender	1. Menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas
		2. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan	1. Program perlindungan perempuan	Persentase perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan
			2. Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase kualitas Data Gender dan Anak pada Instansi Pemerintah
5	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	1. Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi
		2. Mengembangkan Pendidikan dan Latihan kewirausahaan ditingkat pemula dan menengah	Program penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
6	Meningkatkan kemudahan berinvestasi	Meningkatkan pelayanan perijinan berbasis elektronik	1. Program promosi penanaman modal	Persentase terpenuhinya pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Kab. Buleleng
			2. Program pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat
			3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Realisasi Investasi
7	Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	Pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan	1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang menggunakan Sarana Pertanian yang Unggul
			2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Prasarana Pertanian yang unggul
			3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Kelompok tani /ternak yang berbudidaya secara intensif

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
			4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Pengendalian dan penanganan bencana pertanian
			5. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
			6. Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi Perikanan tangkap
			7. Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi Perikanan budidaya
			8. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan
8	Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata	Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rata - rata lama tinggal wisatawan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
			2. Program pemasaran pariwisata	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kabupaten Buleleng
			3. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi
9	Meningkatkan sebaran industri pengolahan	Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industri	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB
10	Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM	Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM	1. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM Formal
			2. Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM naik kelas
11	Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi	Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi aktif dan sehat

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
12	Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal	Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	1. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang berkualitas
			2. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Kemitraan UMKM
13	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	1. Program peningkatan kerjasama desa	Persentase desa Yang dikerjasamakan dengan baik
			2. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan lembaga / organisasi masyarakat yang aktif
14	Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting	Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
15	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar	1. Meningkatkan Kualitas konektivitas pusat kegiatan wilayah	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Kondisi jalan dan jembatan mantap

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
		2. Meningkatkan sarana prasarana kelengkapan jalan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Perhubungan
		3. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap
		4. Mengembangkan jaringan air minum perpipaan perkotaan dan perdesaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Capaian Pelayanan Air Minum
		5. Mengembangkan prasarana air limbah domestik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Pelayanan Air Limbah
		6. Meningkatkan kualitas jaringan drainase	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik
16	Peningkatan kualitas kinerja persampahan	1. Mengembangkan prasarana persampahan skala kabupaten dan skala kawasan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase pengembangan sistem persampahan
		2. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan Persampahan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
17	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1. Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial	1. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Prosentase Keluarga Sejahtera Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan)
			2. Program pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif
			3. Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
		2. Meningkatkan penanganan RTLH dan kawasan kumuh	1. Program pengembangan perumahan	Persentase penanganan Rumah Korban Bencana alam
			2. Program kawasan permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh
			3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Penanganan RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
18	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Program rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
19	Peningkatan mitigasi bencana daerah dan penanganan bencana	1. Peningkatan deteksi dini dan desa tangguh bencana	Program penanggulangan bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
		2. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan non kebakaran

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
20	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan penegakan peraturan daerah	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
21	Peningkatan penggalian, pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat	1. Melestarikan benda situs dan cagar budaya	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)
		2. Pengembangan dan pelestarian lembaga adat dan Kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan adiluhung	1. Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina
			2. Program pengembanga n kebudayaan	Persentase Desa Adat yang lestari
22	Peningkatan kualitas air dan udara	Pengendalian pencemaran air dan udara	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
			2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)
23	Peningkatan tutupan vegetasi pada perkotaan dan lahan kritis	Pengelolaan RTH publik dan Gerakan penghijauan	1. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan terhadap kewajiban Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			2. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Prosentase masyarakat/ lembaga msayarakat yang memperoleh Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
24	Peningkatan konsistensi penataan ruang	Pemenuhan regulasi dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
25	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana e-Government	Program informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik
		2. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.	Program pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		3. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja daerah	1. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Capaian nilai LPPD
			2. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
			3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik
		4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
		5. Peningkatan kualitas pengelolaan ASN	Program kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN
		6. Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan daerah	1. Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan
			2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang mendapatkan pendampingan dan asistensi

TABEL 6.5
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RPD TAHUN
2023-2026

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
									2023		2024		2025		2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tujuan 1					Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif													
	Indikator Tujuan					Indeks Pembanguna nManusia (IPM)		Nilai	72,56	73,20		73,55		73,90		74,10		74,10	
	Sasaran 1					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	Angka	71,95	72,34		72,66		72,86		73,05		73,05	Dinas Kesehatan Kab.Buleleng
			Program		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan danupaya kesehatan masyarakat		Capaian Kinerja UKM dan UKP di Kabupaten	%	75	76	191,387,000,000	77	192,000,000,000	79	199.681.000.000	80	205.000.000.000	80	Dinas Kesehatan Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
									2023		2024		2025		2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				2	Program peningkatan kapasitas sumber dayamanusia kesehatan		Persentase SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan dengan sertifikasi sesuai standar	%	100	100	24,000,000	100	25,000,000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	Dinas Kesehatan Kab.Buleleng
				3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		Persentase Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuaistandar	%	75	76	14,000,000	77	15,000,000	79	15.000.000	80	15.000.000	80	Dinas Kesehatan Kab.Buleleng
				4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase desa dengan partisipasidan Kemandirian bidang kesehatan (desa siaga aktif mandiri)	%	2.7	5.41	75,000,000	8.11	75,000,000	10.81	100.000.000	13.51	125.000.000	13.51	Dinas Kesehatan Kab.Buleleng
				5	Program peningkatan kualitas keluarga		Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	%	80	80	31,500,000	80	35.000.000	82	45.000.000	82	55.000.000	82	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				6	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Kelahiran Total (TFR)	per 1.000 jiwa	2.10	2.09	4,500,000,000	2.08	4.700.000.000	2.07	4.725.000.000	2.06	5.000.000.000	2.06	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng
	2	Sasaran 2			Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1 Rata-rata lamasekolah	Tahun	7,25	7,27		7,27		7,31		7,33		7,33	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Buleleng
			Program		Program pengelolaan pendidikan	Persentase peningkatan akses dan kualitas pendidikan	%	80	85	196.200.000.000	90	195,000,000,000	95	199.000.000.000	100	210.000.000.000	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng
						2 Rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	13,08	13,27		13,29		13,38		13,48		13,48	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase kualitas guru dan tenaga kependidikan	%	91,11	91,13	8,500,000,000	91,15	9,000,000,000	91,17	9.200.000.000	91,19	9.250.000.000	91,19	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng
						3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Tahun	100	100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng
			Program		Program pembinaan perpustakaan	Persentase pengelolaan perpustakaan sekolah dan desa sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan	%	100	105	485,000,000	105	500.000.000	110	600.000.000	116	650.000.000	116	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	Sasaran 3			Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	72,89	73,00		73,50		74,00		75,00		75,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng
			Program	1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas	%	70.00	72,97	284,000,000	76,35	284.000.000	79,73	295.000.000	83,11	300.000.000	83,11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2	Program perlindungan perempuan	Persentase perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan	%	100.00	100.00	120,000,000	100.00	120.000.000	100.00	135.000.000	100.00	150.000.000	100.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng
				3	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase kualitas Data Gender dan Anak pada Instansi Pemerintah	%	80.00	80.00	32,000,000	82.00	35.000.000	84.00	40.000.000	85.00	45.000.000	85.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng
	4	Sasaran 4			Meningkatnya kompetensi ketenaga kerjaan	1 Tingkat Penganggur anTerbuka (TPT)	%	5,32	3,3		3,0		2,8		2,4		2,4	Dinas Tenaga Kerja Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM		SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2023		2024		2025		2026			
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Program		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	%	4.20	4.40	683,000,000	4.63	850.000.000	4.87	1.150.000.000	5.11	1.450.000.000	5.11	Dinas Tenaga Kerja Kab.Buleleng
						2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Nilai	74,86	75,56		76,26		76,76		77,26		77,26	Dinas Tenaga Kerja Kab.Buleleng
			Program		Program penempatan tenaga kerja		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	23.12	23.86	207,000,000	25.00	210.000.000	26.12	250.000.000	27.25	300.000.000	27.25	Dinas Tenaga Kerja Kab.Buleleng
2	Tujuan 2				Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing														
	Indikator Tujuan				PDRB dan PDRB Perkapita			Angka	22,277 T /28,13 jt	23,648 T/29,52 jt		24,476 T/30,44 Jt		25,431 T/31,54 Jt		26,601 T/32,83 Jt		26,601 T/32,83 Jt	
		Sasaran 1			Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah		Pertumbuhan ekonomi daerah	%	-1,22	3,3		3,5		3,95		4,6		4,6	

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
									2023		2024		2025		2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Program	1	Program promosi penanaman modal		Persentase terpenuhinya pelaksanaan Promosi Penanaman Modaldi Kab. Buleleng	%	100	100	360,000,000	100	360.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buleleng
				2	Program pelayanan penanama nmodal		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81.35	81.4	900,000,000	81.45	1.000.000.000	81.5	1.100.000.000	81.55	1.250.000.000	81.55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buleleng
				3	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		Persentase Realisasi Investasi	%	57	70	900,000,000	73	1.000.000.000	75	1.200.000.000	76	1.250.000.000	76	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buleleng
				4	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Sarana Pertanian yang Unggul	%	48,18	59,01	4,200,000,000	66,30	3.500.000.000	73,30	5.000.000.000	79,53	5.500.000.000	79,53	Dinas Pertanian Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Prasarana Pertanian yangUnggul	%	48,18	59,01	900,000,000	66,30	1.400.000.000	73,30	3.500.000.000	79,53	4.000.000.000	79,53	Dinas Pertanian Kab.Buleleng
				6	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Kelompok tani /ternak yang berbudidaya secara intensif	%	48,18	59,01	950,000,000	66,30	950.000.000	73,30	1,000,000,000	79,53	1,000,000,000	79,53	Dinas Pertanian Kab.Buleleng
				7	Program pengendalian dan penanggulanga n bencana pertanian	Persentase Pengendalian dan penanganan bencana pertanian	%	100	100	427,000,000	100	450.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	Dinas Pertanian Kab.Buleleng
				8	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	79	79	1,000,000,000	80	1.250.000.000	81	1.350.000.000	82	1.350.000.000	82	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				9	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	16.672	16.700	1.100,000,000	16.725	900.000.000	16.750	1.200.000.000	16.800	2.000.000.000	16.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Buleleng
				10	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya	Ton	3.543	3.567	1.115,000,000	3.519	1.050.000.000	3.617	1.250.000.000	3.642	1.300.000.000	3.642	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Buleleng
				11	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan	Ton	500	525	75,000,000	550	75.000.000	575	100.000.000	600	100.000.000	600	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Buleleng
				12	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah daya tarik destinasi wisata unggulan	Destinasi	0	3	6,400,000,000	3	6.400.000.00	3	7.000.000.000	3	7.500.000.000	3	Dinas Pariwisata Kab.Buleleng
				13	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kabupaten Buleleng	%	1	2	1,200,000,000	3	1.200.000.000	4	1.300.000.000	5	1.400.000.000	5	Dinas Pariwisata Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				14	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitas HAKI	Produk	0	10	750.000.000	10	900.000.000	10	1.250.000.000	10	1.421.000.000	10	Dinas Pariwisata Kab.Buleleng
				15	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi	%	2	2	1,200,000,000	2	1.300.000.000	2	1.600.000.000	2	1.600.000.000	2	Dinas Pariwisata Kab.Buleleng
				16	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan PadaPDRB	%	78,14	78,14	2,500,000,000	78,59	2.600.000.000	79,09	2.600.000.000	79,64	2.600.000.000	79,64	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Buleleng
				17	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM Formal	%	19	20	9,300,000,000	21	9.200.000.000	22	10.000.000.000	23	11.000.000.000	24	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Buleleng
				18	Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM naik kelas	%	1.5	1.6	70,000,000	1.7	70.000.000	1.8	85.000.000	1.9	250.000.000	1.9	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
									2023		2024		2025		2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				19	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Persentase koperasi aktif dan sehat	%	12	17	331,000,000	20	135.000.000	23	150.000.000	28	150.000.000	28	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Buleleng
				20	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang berkualitas	%	80	82	108,000,000	83	110.000.000	84	125.000.000	85	125.000.000	85	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil danMenengah Kab.Buleleng
				21	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Kemitraan UMKM	%	100	100	155,000,000	100	155.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	Sasaran 2			Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan	Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai	60,49	61,50		62,00		63,00		64,50		64,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Buleleng
			Program	1	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase desa yang dikerjasamakan dengan baik	%	13.17	17.05	230,000,000	20.93	250.000.000	24.81	300.000.00	28.68	350.000.000	28.68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kab.Buleleng
				2	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adatdan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan lembaga / organisasi masyarakat yang aktif	%	4	5	2,650,000,000	5	2.650.000.000	5	2.675.000.000	5	2.700.000.000	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kab.Buleleng
	3	Sasaran 3			Stabilitas harga - hargabahan pokok penting	Laju Inflasi	%	2,39	2,5-3,5		2,5-3,5		2,5-3,5		2,5-3,5		2,5-3,5	

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
									2023		2024		2025		2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Program		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	56	57	165,000,000	58	165.000.000	59	175.000.000	60	175.000.000	60	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Buleleng	
3	Tujuan 3				Meningkatnya kualitas infrastruktur														
	Indikator Tujuan				Indeks infrastruktur wilayah		Nilai	77,50	79,13		80,05		80,86		81,78		81,78		
		Sasaran 1			Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	1	Persentase Kondisi jalan danjembatan mantap	%	71,07	72,00		73,00		74,00		75,00		75,00	
			Program		Program penyelenggaraan jalan		Persentase Kondisi jalan danjembatan mantap	%	71,07	72,00	38,300,000,000	73,00	67,628,000,000	74,00	70.312.000.000	75,00	82.312.000.000	75,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
									2023		2024		2025		2026				
									TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						2	Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas Perhubungan	%	83,66	89,00		90,00		90,33		91,33		91,33	Dinas Perhubungan Kab.Buleleng
			Program		Program penyelenggaraan lalu lintasdan angkutanjalan (LLAJ)		Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan Kelancaran lalu lintas Perhubungan	%	83,66	89,00	21,240,000,000	90,00	21.500.000.000	90,33	21.750.000.000	91,33	22.000.000.000	91,33	Dinas Perhubungan Kab.Buleleng
						3	Persentase Infrastruktur Pengairan yangMantap	%	78.24	78,56		79,00		79,50		80,00		80,00	
			Program		Program pengelolaan sumber daya air (SDA)		Persentase Infrastruktur Pengairan yangMantap	%	78.24	78,56	800,000,000	79,00	1,000,000,000	79,50	1.000.000.000	80,00	5.000.000.000	80,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
						4	Persentase Capaian Pelayanan AirMinum	%	86,74	87,00		87,50		88,00		88,50		88,50	

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM		SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2023		2024		2025		2026			
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan airminum		Persentase Capaian Pelayanan Air Minum	%	86,74	87,00	7,800,000,000	87,50	7,800,000,000	88,00	7.950.000.000	88,50	8.000.000.000	88,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
						5	Persentase Pelayanan Air Limbah	%	94,00	94.46		94,56		94,66		94,76		94,76	
			Program		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		Persentase Pelayanan Air Limbah	%	94,00	94.46	2,600,000,000	94,56	2,600,000,000	94,66	2.700.000.000	94,76	2.750.000.000	94,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
						6	Persentase panjang saluran drainase Dalam Kondisi Baik	%	47.67	48,27		48,88		49,48		50,09		50,09	
			Program		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		Persentase Panjang Saluran Drainase DalamKondisi Baik	%	47.67	48,27	1,500,000,000	48,88	1,500,000,000	49,48	1.750.000.000	50,09	1.750.000.000	50,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRA M					INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
									2023		2024		2025		2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						7	Persentase pengembangan sistem persampahan	%	37,21	41,86		46,51		51,16		55,81		55,81	
				Program		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase pengembangan sistem persampahan	%	37,21	41,86	8,030,000,000	46,51	8,122,000,000	51,16	8.150.000.000	55,81	3.000.000.000	55,81	Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kab.Buleleng
				Program		Program pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan Persampahan	%	47	47,50	15,700,000,000	47,50	16.000.000.000	50	17.600.000.000	50,50	20.350.000.000	50,50	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
4	Tujuan 4					Meningkatnya penanggulang an kemiskinan dan perlindun gansosial													
	Indikator Tujuan				1	Persentase penduduk miskin			%	6,12	5,15		4,9		4,8		4,6		4,6

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran 1			Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	6,12	5,15		4,9		4,8		4,6		4,6	
			Program	1	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan)	%	65.15	66.50	3,971,000,000	68.00	4.000.000.000	70.00	4.025.000.000	72.00	4.300.000.000	72.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng
				2	Program pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	80	80	1,750,000,000	80	1.300.000.000	80	1.300.000.000	31.18	1.600.000.000	31.18	Dinas Sosial Kab.Buleleng
				3	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Perlindungan danJaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	100	100	346,000,000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	Dinas Sosial Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
									2023		2024		2025		2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET T	Rp	TARGET	Rp			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				4	Program pengembangan perumahan		Persentase penanganan Rumah Korban Bencana alam	%	100	100	2,400,000,000	100	2,400,000,000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Buleleng
				5	Program kawasan permukiman		Presentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	0	20	5,100,000,000	40	5,100,000,000	60	5.250.000.000	80	5.250.000.000	80	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Buleleng
				6	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh		Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	59,27	63,75	2,242,000,000	68,33	2,700,000,000	73,03	3.500.000.000	77,83	5.000.000.000	77,83	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Buleleng
		Sasaran 2			Meningkatnya Penanganan PMKS		Persentase penanganan PMKS	%	3,86	6,86		9,86		12,86		15,86		15,86	Dinas Sosial Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program		Program rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	3,86	6,86	1,210,000,000	9,86	1.250.000.000	12,86	1.500.000.000	15,86	1.500.000.000	15,86	Dinas Sosial Kab.Buleleng
5	Tujuan 5				Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat													
	Indikator Tujuan 1				Persentase Penanganan Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat (Trantibum linmas)		%	100	100		100		100		100		100	
		Sasaran 1			Meningkatnya rasa aman dannyaman masyarakat	1 Persentase Penanganan bencana	%	98,00	98,00		98,00		98,00		98,00		98,00	

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program	1	Program penanggulangan bencana	Cakupan Penanggula ngan Bencana Daerah	%	100	100	2,400,000,000	100	2.600.000.000	100	2.750.000.000	100	2.850.000.000	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Buleleng
				2	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	266,000,000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	Dinas Sosial
				3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan non kebakaran	%	94	94	4,000,000,000	94	4.250.000.000	94	4.400.000.000	94	5.000.000.000	94	Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Buleleng
						2												
						Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman danketertiban umum (Trantibum)	%	100	100		100		100		100		100	

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET T	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	95	95	3,300,000,000	95	3,650,000,000	95	3.675.000.000	95	3.685.000.000	95	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Tujuan 6				Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari													
	Indikator Tujuan 1				Persentase pelesetarian adat budaya		%	14,00	23,08		32,37		41,65		51,10		51,10	
		Sasaran 1			Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	1 Persentase Cagarbudaya yang lestari	%	20	30		40		50		60		60	
			Program		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	%	20	30	300,000,000	40	300.000.000	50	315.000.000	60	350.000.000	60	Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng
						2 Persentase Budaya benda yang lestari	%	16,67	33,33		50,00		66,67		83,83		83,33	

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program		Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina	%	16,67	33,33	1,200,000,000	50,00	1.225.000.000	66,67	1.250.000.000	83,33	1.275.000.000	83,33	Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng
						3 Persentase desa adat yang lestari	%	26,66	32,57		39,67		47,95		57,42		57,42	
			Program		Program pengembangan kebudayaan	Persentase Desa Adat yang lestari	%	26,66	32,57	29,825,000,000	39,67	37.200.000.000	47,95	38.500.000.000	57,42	47.000.000.000	57,42	Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng
7	Tujuan 7					Meningkatnya kualitas lingkungan hidup												
	Indikator Tujuan 1					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Nilai	70,00	70,05	70,11		70,13		70,14		70,14	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bulelen
	1	Sasaran 1			Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Nilai	64,17	59,10		59,10		59,12		59,14		59,14	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bulelen

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	%	60	62	1,700,000,000	64	1.850.000.000	66	1.850.000.000	68	1.850.000.000	68	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
	2	Sasaran 2			Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Nilai	88,52	89,65		89,76		89,79		89,80		89,80	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bulelen
			Program		Program pengelolaan keanekaragaman hayati(kehati)	Luasan RTH yang terpelihara	Ha	73,77	78,77	4,500,000,000	78,78	4.800.000.000	78,78	5.000.000.000	78,78	4.800.000.000	78,78	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
	3	Sasaran 3			Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	Nilai	52,44	52,60		52,66		52,68		52,68		52,68	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bulelen

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program	1	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan danizin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan terhadap kewajiban Izin pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup	%	70	75	165,000,000	78	200.000.000	81	225.000.000	85	250.000.000	85	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
				2	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat yang memperoleh Pendidikan,Pelat ihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	%	25	35	100,000,000	45	100.000.000	55	125.000.000	68	125.000.000	68	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
	4	Sasaran 4			Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang	%	70	75		76		77		78		78	
			Program		Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	60	70	400,000,000	75	600,000,000	80	850.000.000	85	1.500.000.000	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
									2023		2024		2025		2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	Tujuan 8					Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien													
	Indikator Tujuan 1					Indek Reformas iBirokrasi	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerahyang berkualitas	Nilai	60,58	60,58		60,60		60,65		60,66		60,66	Setda kab.buleleng
	1	Sasaran 1			Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Nilai Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,30	3,10		3,20		3,30		3,40		3,40	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Buleleng	
			Program	1	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	93,91	94,66	2,100,000,000	95,41	2.100.000.000	96,16	2.250.000.000	96,91	2.350.000.000	96,91	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Buleleng	

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2	Program Pengelolaan aplikasi dan informatika	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,30	3,10	5,402,000,000	3,20	5.650.000.000	3,30	5.750.000.000	3,40	6.000.000.000	3,40	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Buleleng
	2	Sasaran 2			Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)baik	%	85	90		90		90		95		95	Setda Kab Buleleng
			Program		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Capaian nilai LPPD	Nilai	100	100	8,000,000,000	100	8.200.000.000	100	9.500.000.000	100	10.000.000.000	100	Setda Kab Buleleng
	3	Sasaran 3			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP) Daerah	Nilai	68,85	70		70,01		70,01		70,02		70,02	Setda Kab Buleleng

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRA M					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUA N	KONDIS I AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2023		2024		2025		2026			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangu ndaerah	Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Pambu anDaerah	%	100	100	1,300,000,000	100	1.300.000.000	100	1.800.000.000	100	1.400.000.000	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Buleleng
				2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	100	100	1,500,000,000	100	1.500.000.000	100	1.750.000.000	100	1.750.000.000	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Buleleng
	4	Sasaran 4			Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	0	77		78		79		80		80	
			Program		Program pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	0	77	260,576,500,000	78	260.900.000.000	79	267.000.000.000	80	267.200.000.000	80	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
	5	Sasaran 5			Meningkatk nya kualitas manajemn ASN	Indeks Merit sistem	Nilai	100	150		200		250		300		300	

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM					INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE								KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
									2023		2024		2025		2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Program		Program kepegawaian daerah	Indeks KepuasanASN	Nilai	83.20	83.50	1,500,000,000	83.80	1.500.000.000	84.00	1.900.000.000	84.15	2.000.000.000	84.15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kab. Buleleng	
	6	Sasaran 6			Meningkatnya kualitas pengawasan	1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel	%	100	100	100		100		100		100		
			Program		Program penyelenggaraan pengawasan		Persentase tindaklanjut temuan pengawasan	%	100	100	400,000,000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	Inspektorat Daerah Kab. Buleleng
					Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		Presentas Perangkat Daerah yang m edapatkan pendampingan dan asistensi	%	100	100	1,000,000,000	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	Inspektorat Daerah Kab. Buleleng

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, bab ini memuat daftar program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Program yang dirumuskan dalam bab ini harus memiliki kesesuaian dengan program, rumusan indikator yang tercantum pada masing-masing renstra Perangkat Daerah. Sehingga, proses perumusan program dilakukan secara berkesinambungan dengan muatan renstra Perangkat Daerah.

Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan perangkat daerah secara jelas dapat dilihat melalui keterkaitan antara program perangkat daerah beserta indikator kinerja yang menjadi landasan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan amanah dalam RPD yang direpresentasikan dalam permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran hingga indikator sasaran strategis di RPD. Sehingga, dalam perumusan program perangkat daerah perlu di-drive oleh RPD agar program masing-masing perangkat daerah disusun dengan melihat tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program prioritas ini adalah daftar program perangkat daerah per urusan pemerintahan yang dianggap memiliki hubungan secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan pemenuhan urusan pemerintahan (wajib). Program prioritas ini memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat strategis dan operasional. Program prioritas yang bersifat strategis memiliki pengertian bahwa dalam hal pencapaian indikator kinerjanya, hal tersebut tidak

hanya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah saja, tetapi juga terdapat peran dari Kepala Daerah pada level kebijakan. Hal tersebut dikarenakan program-program strategik tercipta sebagai bentuk respon dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan juga mengakomodir program unggulan.

Sementara itu, program-program prioritas yang bersifat operasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tetap dilakukan agar setiap urusan pemerintahan (wajib) dapat terpenuhi. Sehingga, dalam program prioritas ini tidak hanya dirumuskan program strategik tujuan dan sasaran pembangunan daerah, tetapi juga terdapat program-program operasional untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Setelah terumuskannya program-program prioritas, maka disusunlah pagu indikatif dari masing-masing program tersebut. Tujuannya, untuk melihat ketersediaan dana untuk mendanai program tersebut secara makro. Hal tersebut bersifat makro dan non teknis, artinya tujuannya bukanlah untuk melihat jumlah nominal secara detail antara kondisi fiskal daerah untuk mendanai per program, tetapi tujuannya adalah untuk melihat kerangka pendanaan dari ketersediaan anggaran dan kebutuhan penganggarnya.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Proyeksi belanja daerah periode 2023-2026 dirancang dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. kerangka pendanaan terjasi dalam table berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kab.Buleleng Tahun
2023-2026

URAIAN	KONDISI AWAL		PROYEKSI				Rata-rata Pertumbu han (%)
	2021 (Realisasi anaudited)	2022 (Outlook)	2023	2024	2025	2026	
BELANJA DAERAH	2,004,210,231,574	2,171,376,485,257	2,200,607,000,000	2,248,857,000,000	2,313,590,000,000	2,356,273,000,000	2.07
BELANJA OPERASI	1,585,529,410,642	1,731,587,092,639	1,760,842,000,000	1,767,581,000,000	1,818,451,000,000	1,848,921,000,000	1.66
Belanja pegawai	847,840,859,277	970,174,772,319	1,008,813,000,000	1,012,455,000,000	1,020,613,000,000	1,028,787,000,000	1.49
Belanja Barang Jasa	670,796,301,720	692,499,049,320	694,358,000,000	697,585,500,000	739,217,000,000	744,843,000,000	1.87
Belanja Hibah	60,348,589,645	63,595,771,000	52,353,000,000	52,223,000,000	53,303,000,000	69,973,000,000	3.85
Belanja Bansos	6,543,660,000	5,317,500,000	5,318,000,000	5,317,500,000	5,318,000,000	5,318,000,000	0.00
BELANJA MODAL	176,520,790,673	179,883,770,857	180,293,000,000	219,049,000,000	229,350,000,000	238,352,000,000	5.24
Belanja Modal Tanah	-	200,000,000	2,500,000,000	3,000,000,000	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,967,788,739	84,408,984,535	78,488,000,000	81,012,000,000	87,988,000,000	86,988,000,000	0.92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47,144,796,616	38,555,142,990	41,008,000,000	46,832,000,000	47,345,000,000	45,347,000,000	4.36
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49,313,392,049	35,842,766,799	38,297,000,000	67,405,000,000	73,217,000,000	85,217,000,000	26.97
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,094,813,269	20,876,876,533	20,000,000,000	20,800,000,000	20,800,000,000	20,800,000,000	(0.05)
BELANJA TAK TERDUGA	5,190,431,459	9,276,486,011	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-
Belanja Tak Terduga	5,190,431,459	9,276,486,011	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-
BELANJA TRANSFER	236,969,598,800	250,629,135,750	254,472,000,000	257,227,000,000	260,789,000,000	264,000,000,000	1.31
Belanja Transfer Bagi Hasil	11,594,367,300	20,550,000,000	22,172,000,000	22,993,000,000	24,389,000,000	25,500,000,000	5.56
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	225,375,231,500	230,079,135,750	232,300,000,000	234,234,000,000	236,400,000,000	238,500,000,000	0.90

URAIAN	KONDISI AWAL		PROYEKSI				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021 (Realisasi <i>unaudited</i>)	2022 (<i>Outlook</i>)	2023	2024	2025	2026	
BELANJA TRANSFER	236,969,598,800	250,629,135,750	254,472,000,000	257,227,000,000	260,789,000,000	264,000,000,000	1.31
Belanja TransferBagi Hasil	11,594,367,300	20,550,000,000	22,172,000,000	22,993,000,000	24,389,000,000	25,500,000,000	5.56
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	225,375,231,500	230,079,135,750	232,300,000,000	234,234,000,000	236,400,000,000	238,500,000,000	0.90

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPD

Belanja daerah tahun 2023-2026 dirancang surplus setiap tahun, terlihat dari perbandingan pendapatan daerah dengan belanja daerah sebagai berikut:

TAHUN		2023	2024	2,025	2026	
PENDAPATAN		2,253,707,000,000	2,288,857,000,000	2,328,590,000,000	2,371,273,000,000	
BELANJA		2,200,607,000,000	2,248,857,000,000	2,313,590,000,000	2,356,273,000,000	
(SURPLUS)		53,100,000,000	40,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	

7.2 Program Perangkat Daerah Kab.Buleleng Tahun 2023-2026

Program daerah periode 2023-2026 dirancang dengan memperhatikan proyeksi belanja daerah dengan asumsi memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah,.
terjadi dalam tabel berikut :

Tabel 7.2

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kab.Buleleng Tahun 2023-2026

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR												
1	01				PENDIDIKAN												
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	597.000.000.000	100	599,000,000,000	100	600.000.000.000	100	600.000.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase peningkatan akses dan kualitas pendidikan	%	80	85	196.200.000.000	90	195,000,000,000	95	199.000.000.000	100	210.000.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase kualitas guru dan tenaga kependidikan	%	91,11	91,13	8,500,000,000	91,15	9,000,000,000	91,17	9.200.000.000	91,19	9.250.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	02				KESEHATAN												
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	73,500,000,000	100	74,000,000,000	100	76.000.000.000	100	74.200.000.000	Dinas Kesehatan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKM dan UKP di Kabupaten	%	75	76	191,387,000,000	77	192,000,000,000	79	199.681.000.000	80	205.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan dengan sertifikasi sesuai standar	%	100	100	24,000,000	100	25,000,000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai standar	%	75	76.00	14,000,000	77	15,000,000	79	15.000.000	80	15.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa dengan partisipasi dan Kemandirian bidang kesehatan (desa siaga aktif mandiri)	%	2.7	5.41	75,000,000	8.11	75,000,000	10.81	100.000.000	13.51	125.000.000	Dinas Kesehatan
1	02				RSUD												
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	99	99	187,300,000,000	99	187,300,000,000	99	187.300.000.000	99	187.350.000.000	RSUD
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya upaya dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	%	80,67	83.75	1,300,000,000	84	1,300,000,000	84.25	1.300.000.000	84.5	1.350.000.000	RSUD

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03				PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG												
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	14,400,000,000	100	14,600,000,000	100	14.650.000.000	100	15.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap	%	78.24	78,56	800,000,000	79	1,000,000,000	79,50	1.000.000.000	80	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pelayanan Air Minum	%	86,74	87	7,800,000,000	87,50	7,800,000,000	88	7.950.000.000	88,50	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem persampahan	%	37,21	41,86	8,030,000,000	46,51	8,122,000,000	51,16	8.150.000.000	55,81	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pelayanan Air Limbah	%	94	94.46	2,600,000,000	94,56	2,600,000,000	94,66	2.700.000.000	94,76	2.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	%	47.67	48,27	1,500,000,000	48,88	1,500,000,000	49,48	1.750.000.000	50,09	1.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar	%	60	70	5.000.000.000	75	3,800,000,000	80	3.800.000.000	85	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Perencanaan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	%	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250.000.000	100	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi jalan dan jembatan mantap	%	71,07	72	38,300,000,000	73	67.628.000.000	74	70.312.000.000	75	82.312.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terampil	%	100	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120.000.000	100	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	60	70	400,000,000	75	600,000,000	80	850.000.000	85	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	5,800,000,000	100	5,900,000,000	100	5.950.000.000	100	6.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase penanganan Rumah Korban Bencana alam	%	100	100	2,400,000,000	100	2,400,000,000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	0	20	5,100,000,000	20	5,100,000,000	20	5.250.000.000	20	5.250.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	59,27	63,75	2,242,000,000	68,33	2,700,000,000	73,03	3.500.000.000	77,83	5.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah	%	3,62	1.50	161,000,000	1.53	165,000,000	1.55	165.000.000	1.57	175.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	05				KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	05				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	9,500,000,000	100	9,600,000,000	100	9.650.000.000	100	9.650.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	95	95	3,300,000,000	95	3,650,000,000	95	3.675.000.000	95	3.685.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	02			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Presentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	5,350,000,000	100	5.400.000.000	100	5.500.000.000	100	5.600.000.000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	100	2,400,000,000	100	2.600.000.000	100	2.750.000.000	100	2.850.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			DINAS PEMADAM KEBAKARAN												
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	90	90	5,250,000,000	90	5.250.000.000	90	5.300.000.000	90	5.400.000.000	Pemadam Kebakaran
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan non kebakaran	%	94	94	4,000,000,000	94	4.250.000.000	94	4.400.000.000	94	5.000.000.000	Pemadam Kebakaran
1	06				SOSIAL												

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	5,510,000,000	100	5.710.000.000	100	5.710.000.000	100	5.725.000.000	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	80	80	1.750.000.000	80	1.300.000.000	80	1.300.000.000	80	1.600.000.000	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	39.76	6,86	1.210.000.000	9,86	1.250.000.000	12,86	1.500.000.000	15,86	1.500.000.000	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	100	100	346,000,000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	266,000,000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	Dinas Sosial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	%	93.33	100	1,186,000,000	100	1.186.000.000	100	1.200.000.000	100	1.250.000.000	Dinas Sosial

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07				TENAGA KERJA												
2	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	32.79	100	5,800,000,000	100	6.000.000.000	100	6.100.000.000	100	6.150.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	01	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan penyediaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten	%	85	85	100,000,000	90	50.000.000	95	50.000.000	100	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	01	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	%	4.20	4.40	683.000.000	4.63	850.000.000	4.87	1.150.000.000	5.11	1.450.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	01	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	23.12	23.86	207,000,000	25.00	210.000.000	26.12	250.000.000	27.25	300.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	01	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan kasus Hubungan Industrial	%	14.28	28.57	152,000,000	42.85	155.000.000	57.14	200.000.000	71.42	250.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	08				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	6,400,000,000	100	6.100.000.000	100	6.500.000.000	100	6.150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas	%	70.00	72,97	284,000,000	76,35	284.000.000	79,73	295.000.000	83,11	300.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan	%	100	100	120,000,000	100	120.000.000	100	135.000.000	100	150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	%	80.00	80.00	31,500,000	80.00	35.000.000	82.00	45.000.000	82.00	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase kualitas Data Gender dan Anak pada Instansi Pemerintah	%	80.00	80.00	32,000,000	82.00	35.000.000	84.00	40.000.000	85.00	45.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Nilai	PRATAMA	PRATAMA	32,000,000	PRATAMA	35.000.000	PRATAMA	45.000.000	MADYA	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan	%	100	100	54,000,000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09				PANGAN												
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	9,000,000,000	100	9.100.000.000	100	9.150.000.000	100	9.150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	%	20	40	250.000.000	60	500.000.000	80	650.000.000	100	1.500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	79	79	1,000,000,000	80	1.250.000.000	81	1.350.000.000	82	1.350.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan wilayah rentan rawan pangan	%	20	40	90,000,000	60	90.000.000	80	100.000.000	100	125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Aman	%	80	81	100,000,000	82	100.000.000	83	125.000.000	84	125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	10				PERTANAHAN												
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	80	100	167,000,000	100	170.000.000	100	170.000.000	100	175.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	0	100	70,000,000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	%	90.53	100	60,000,000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	75.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	11				LINGKUNGAN HIDUP												
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	9,400,000,000	100	9.500.000.000	100	9.550.000.000	100	9.550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah pemenuhan Dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	dokumen	2	4	200,000,000	7	200.000.000	9	725.000.000	11	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	%	60	62	1,700,000,000	64	1.850.000.000	66	1.850.000.000	68	1.850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luasan RTH yang terpelihara	Ha	73,77	78,77	4,500,000,000	78,78	4.800.000.000	78,78	5.000.000.000	78,78	4.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pemenuhan komitmen ijin penyimpanan sementara limbah B3	%	80	82	100,000,000	84	100.000.000	87	100.000.000	90	125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan terhadap kewajiban Izin pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup	%	70	75	165,000,000	78	200.000.000	81	225.000.000	85	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	07			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	%	3	6	50,000,000	9	50.000.000	12	50.000.000	15	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase masyarakat/ lembaga masyarakat yang memperoleh Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	%	25	35	100,000,000	45	100.000.000	55	125.000.000	68	125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Piagam/trophy	2	4	100,000,000	4	100.000.000	8	100.000.000	10	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup tertangani	%	75	78	100,000,000	81	100.000.000	84	100.000.000	85	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	%	47	47,50	15,700,000,000	47,50	16.000.000.000	50	17.600.000.000	50,50	20.350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	12				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	98	100	7,138,000,000	100	7.250.000.000	100	7.275.000.000	100	7.275.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	83,44	84,43	1,000,000,000	85,48	1.150.000.000	86,20	1.175.000.000	86,92	1.200.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03			ROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	98,50	99,00	470,000,000	99,50	600.000.000	99,75	625.000.000	99,85	650.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan layanan sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tertib dan tepat waktu	%	77,50	80,00	550,000,000	82,50	600.000.000	85	615.000.000	87,50	635.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan penyediaan data informasi Kependudukan dalam Daerah kabupaten	%	85.00	85.00	42,000,000	85.00	50.000.000	85.00	75.000.000	85.00	85.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	5,470,000,000	100	5.550.000.000	100	5.575.000.000	100	5.575.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa sesuai aturan	%	3.88	11.63	255,000,000	19.38	275.000.000	27.13	285.000.000	34.88	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang dikerjasamakan dengan baik	%	13.17	17.05	230,000,000	20.93	250.000.000	24.81	300.000.000	28.68	350.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan capaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundang - Undangan	%	69.41	72.16	2,795,000,000	74.9	2.850.000.000	77.65	2.900.000.000	80.4	3.400.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan lembaga / organisasi masyarakat yang aktif	%	4	5	2,650,000,000	5	2.650.000.000	5	2.675.000.000	5	2.700.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung Berkualitas (KB) di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	%	22.02	27,98	48,000,000	33,93	50.000.000	39,88	55.000.000	47,62	75.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	per 1.000 jiwa	2.10	2.09	4.500.000.000	2.08	4.700.000.000	2.07	4.725.000.000	2.06	5.000.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan)	%	65.15	66.50	3,971,000,000	68.00	4.000.000.000	70.00	4.025.000.000	72.00	4.300.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	15				PERHUBUNGAN												
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%		100	10,500,000,000	100	10.600.000.000	100	10.750.000.000	100	10.850.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Perhubungan	%	87.22	90	21,240,000,000	91.5	21.500.000.000	93	21.750.000.000	94.5	22.000.000.000	Dinas Perhubungan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pelayaran	%	80	82	60,000,000	84	60.000.000	86	60.000.000	88	60.000.000	Dinas Perhubungan
2	16				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	7,600,000,000	100	7.650.000.000	100	12.750.000.000	100	7.650.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai keterbukaan informasi publik	nilai	93,91	94,66	2,100,000,000	95,41	2.100.000.000	96,16	2.250.000.000	96,91	2.350.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,30	3,10	5,402,000,000	3,20	5.650.000.000	3,30	5.750.000.000	3,40	6.000.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	17				KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	8,434,000,000	100	8.550.000.000	100	8.600.000.000	100	8.650.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase usaha simpan pinjam berizin	%	1	1,9	75,000,000	2,4	75.000.000	2,90	75.000.000	3,4	75.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	12,38	36,76	42,000,000	48,78	45.000.000	60,68	75.000.000	72,46	75.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam sehat	%	3,70	6,10	59,000,000	7,30	60.000.000	8,50	75.000.000	9,60	75.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Sumber Daya Manusia koperasi terlatih	%	100	100	264,000,000	100	264.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif dan sehat	%	12	17	331,000,000	20	135.000.000	23	150.000.000	28	150.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Formal	%	19	20	9,300,000,000	21	9.200.000.000	22	10.000.000.000	23	11.000.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM naik kelas	%	1.5	1.6	70,000,000	1.7	70.000.000	1.8	85.000.000	1.9	250.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18				PENANAMAN MODAL												

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	6,835,000,000	100	6.900.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	100	100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terpenuhinya pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Kab. Buleleng	%	100	100	360,000,000	100	360.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81.35	81.4	900,000,000	81,45	1.000.000.000	81,50	1.100.000.000	81,55	1.250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi	%	57	70	900,000,000	73	1.000.000.000	75	1.200.000.000	76	1.250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi	Dokumen	12	12	155,000,000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	%	88	90	500,000,000	92	500.000.000	94	500.000.000	96	500.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	Atlet	400	425	10,175,000,000	452	10.775.000.000	482	10.975.000.000	515 Atlet	10.975.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah pengembangan kapasitas kepramukaan	Orang	340	430	500,000,000	520	500.000.000	610	500.000.000	700	500.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	20				STATISTIK												
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARANN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemenuhan data sektoral Pemkab Buleleng	%	100	100	100,000,000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	21				PERSANDIAN												
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARANN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keamanan data dan informasi sesuai standar	%	100	100	298,000,000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	22				KEBUDAYAAN												
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	6,500,000,000	100	6.650.000.000	100	6.675.000.000	100	6.675.000.000	Dinas Kebudayaan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Desa Adat yang lestari	%	26,65	32,57	29,825,000,000	39,67	37.200.000.000	47,95	38.500.000.000	57,42	47.000.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina	%	16.67	33.33	1,200,000,000	50.00	1.225.000.000	66.67	1.250.000.000	83.33	1.275.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang Terbina	%	100	100	250,000,000	100	275.000.000	100	285.000.000	100	290.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	%	20	30	300,000,000	40	300.000.000	50	315.000.000	60	350.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	75	80	1,250,000,000	85	1.250.000.000	90	1.265.000.000	100	1.275.000.000	Dinas Kebudayaan
2	23				PERPUSTAKAAN												
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	Nilai	64	67	4,900,000,000	71	4.960.000.000	74	5.050.000.000	78	5.500.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pengelolaan perpustakaan sekolah dan desa sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	%	100	105	485,000,000	105	500.000.000	110	600.000.000	116	650.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang lestari	buah	50	53	30,000,000	55	30.000.000	58	150.000.000	61	200.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	24				KEARSIPAN												
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD yang tertib arsip	SKP D	10	11	128,000,000	12	150.000.000	13	300.000.000	14	350.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	buah	20	21	128,000,000	23	130.000.000	25	300.000.000	28	350.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah perijinan yang dikeluarkan sesuai ketentuan	ijin	1	1	29,000,000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	25				KELAUTAN DAN PERIKANAN												
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	16.672	16.700	1.100,000,000	16.725	900.000.000	16.750	1.200.000.000	16.800	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan Budidaya	Ton	3.543	3.567	1.115,000,000	3.519	1.050.000.000	3.617	1.250.000.000	3.642	1.300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase rekomendasi pembangunan sektor perikanan yang ditindaklanjuti	%	20	40	20,000,000	60	20.000.000	80	35.000.000	100	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan	ton	500	525	75,000,000	550	75.000.000	575	100.000.000	600	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26				PARIWISATA												
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	7,950,000,000	100	7.950.000.000	100	8.100.000.000	100	8.200.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	02			PROGRAM PENINGKATA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah daya tarik destinasi wisata unggulan	Desti nasi	0	3	6,400,000,000	3	6.400.000.000	3	7.000.000.000	3	7.500.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kabupaten Buleleng	%	1	2	1,200,000,000	3	1.200.000.000	4	1.300.000.000	5	1.400.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	Produk	0	10	750.000.000	10	900.000.000	10	1.250.000.000	10	1.421.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	0	2	1.200.000.000	2	1.300.000.000	2	1.600.000.000	2	1.600.000.000	Dinas Pariwisata
3	27				PERTANIAN												
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	19,700,000,000	100	19.750.000.000	100	19.850.000.000	100	19.850.000.000	Dinas Pertanian
3	27																

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Sarana Pertanian yang Unggul	%	48,18	59,01	4.200,000,000	66,30	3.500.000.000	73,30	5.000.000.000	79,53	5.500.000.000	Dinas Pertanian
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Prasarana Pertanian yang Unggul	%	48,18	59,01	900,000,000	66,30	1.400.000.000	73,30	3.500.000.000	79,53	4.000.000.000	Dinas Pertanian
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kelompok tani /ternak yang berbudidaya secara intensif	%	48,18	59,01	950,000,000	66,30	950.000.000	73,30	1,000,000,000	79,53	1,000,000,000	Dinas Pertanian
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan penanganan bencana pertanian	%	100	100	427,000,000	100	450.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	Dinas Pertanian
3	27	06			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis	%	50	50.50	1,673,000,000	60	1.800.000.000	70	1.900.000.000	80	1.950.000.000	Dinas Pertanian
3	30				PERDAGANGAN												
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pemenuhan perizinan perusahaan perdagangan	%	80	82	57,000,000	83	60.000.000	84	60.000.000	85	60.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang berkualitas	%	80	82	108,000,000	83	110.000.000	84	125.000.000	85	125.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100	165,000,000	100	165.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP patuh tera ulang	%	80	82	345,000,000	83	350.000.000	84	450.000.000	85	500.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kemitraan UMKM	%	100	100	155,000,000	100	155.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31				PERINDUSTRIAN												
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	%	78,14	78.14	2,500,000,000	78,59	2.600.000.000	79,09	2.600.000.000	79,64	2.600.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	%	80	82	95,000,000	83	95.000.000	84	100.000.000	85	100.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	32				TRANSMIGRASI												
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan	%	10.00	15.00	58,000,000	20.00	60.000.000	25.00	100.000.000	30.00	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	1				SEKRETARIAT DAERAH												
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian nilai LPPD	%	100	100	8,000,000,000	100	8.200.000.000	100	9.500.000.000	100	10.000.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi kegiatan strategis	%	100	100	3,000,000,000	100	3.000.000.000	100	3.200.000.000	100	3.250.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	43,000,000,000	100	43.300.000.000	100	48.500.000.000	100	48.500.000.000	Sekretariat Daerah
4	2				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH												

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		2	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	90	92	47.800.000.000	94	49.000.000.000	96	50.000.000.000	98	50.000.000.000	Sekretariat DPRD
4		2	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	90	92	31.000.000.000	94	31.000.000.000	96	32.500.000.000	98	32.500.000.000	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	01				PERENCANAAN												
5		01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	8,200,000,000	100	8.200.000.000	100	8.250.000.000	100	8.300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	1,300,000,000	100	1.300.000.000	100	1.800.000.000	100	1.400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	100	100	1,500,000,000	100	1.500.000.000	100	1.750.000.000	100	1.750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02				KEUANGAN												
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	116,43	100	21,200,000,000	100	21.800.000.000	100	23.500.000.000	100	23.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	0	71	260,576,500,000	78	260.900.000.000	79	267.000.000.000	80	267.200.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik	%	100	100	1,500,000,000	100	1.500.000.000	100	1.677.000.000	100	1.680.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kemandirian keuangan daerah	%	20,22	20,89	7,400,000,000	21,56	7.500.000.000	22,23	8.500.000.000	22,90	8.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	03				KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	8,500,000,000	100	8.500.000.000	100	8.650.000.000	100	8.535.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan ASN	Nilai	83.20	83.50	1,500,000,000	83.80	1.500.000.000	84.00	1.900.000.000	84.15	2.000.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	03	03	03		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase penempatan ASN yang sesuai standar kompetensi jabatan	%	65.00	71.71	1,500,000,000	78.91	2.100.000.000	86.11	3.250.000.000	93.31	3.300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	99,03	100	5,200,000,000	100	5.250.000.000	100	5.350.000.000	100	5.400.000.000	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	70	72	1,350,000,000	75	1.550.000.000	78	2.000.000.000	80	2.250.000.000	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01				INSPEKTORAT DAERAH												
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	116,43	100	8,700,000,000	100	9.000.000.000	100	9.500.000.000	100	9.500.000.000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan	%	100	100	400,000,000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Inspektorat Daerah

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentas Perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	100	100	1,000,000,000	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	Inspektorat Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				Kecamatan Gerokgak												
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	3,750,000,000	100	3.800.000.000	100	3.800.000.000	100	3.850.000.000	Kecamatan Gerokgak
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	%	80	80	175,000,000	82	175.000.000	82	180.000.000	85	190.000.000	Kecamatan Gerokgak
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan	%	10	10	272,000,000	15	272.000.000	15	275.000.000	15	290.000.000	Kecamatan Gerokgak
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Trantribum di Kecamatan	%	100	100	350,000,000	100	350.000.000	100	355.000.000	100	360.000.000	Kecamatan Gerokgak
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik	%	85	85	253,000,000	92	253.000.000	92	255.000.000	100	265.000.000	Kecamatan Gerokgak

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	02				KECAMATAN SERIRIT												
7	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	6,485,000,000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.525.000.000	KECAMATAN SERIRIT
7	02	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	%	80	80	155,000,000	82	155.000.000	82	165.000.000	85	175.000.000	KECAMATAN SERIRIT
7	02	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan	%	10	10	1,100,000,000	15	1.100.000.000	15	1.150.000.000	15	1.165.000.000	KECAMATAN SERIRIT
7	02	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	%	100	100	160,000,000	100	160.000.000	100	165.000.000	100	175.000.000	KECAMATAN SERIRIT
7	02	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik	%	90	90	200,000,000	95	200.000.000	95	225.000.000	100	250.000.000	KECAMATAN SERIRIT
7	03				KECAMATAN BUSUNGBIU												
7	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	3,200,000,000	100	3.250.000.000	100	3.250.000.000	100	3.275.000.000	Kecamatan Busungbiu

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	03	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	%	80	80	100,000,000	82	100.000.000	82	115.000.000	85	130.000.000	Kecamatan Busungbiu
7	03	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan	%	10	10	275,000,000	15	275.000.000	15	300.000.000	15	325.000.000	Kecamatan Busungbiu
7	03	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	%	100	100	368,000,000	100	368.000.000	100	380.000.000	100	395.000.000	Kecamatan Busungbiu
7	03	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik	%	86	86	57,000,000	93	65.000.000	93	80.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Busungbiu
7	04				KECAMATAN BANJAR												
7	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	3,250,000,000	100	3.275.000.000	100	3.275.000.000	100	3.300.000.000	Kecamatan Banjar
7	04	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	%	80	80	100,000,000	82	100.000.000	82	125.000.000	85	150.000.000	Kecamatan Banjar
7	04	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan	%	10	10	300,000,000	15	300.000.000	15	320.000.000	15	350.000.000	Kecamatan Banjar

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	04	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	%	100	100	250,000,000	100	250.000.000	100	265.000.000	100	275.000.000	Kecamatan Banjar
7	04	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik	%	88	88	200,000,000	94	200.000.000	94	225.000.000	100	250.000.000	Kecamatan Banjar
7	05				KECAMATAN SUKASADA												
7	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	5,060,000,000	100	5.100.000.000	100	5.600.000.000	100	5.125.000.000	Kecamatan Sukasada
7	05	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	%	80	80	30,000,000	82	30.000.000	82	50.000.000	85	75.000.000	Kecamatan Sukasada
7	05	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentae Peningkaan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan	%	10	10	950,000,000	15	950.000.000	15	975.000.000	15	1.000.000.000	Kecamatan Sukasada
7	05	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Kecamatan Sukasada
7	05	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik	%	85	85	60,000,000	92	60.000.000	92	75.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Sukasada

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	06				KECAMATAN BULELENG												
7	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	19,700,000,000	100	20.700.000.000	100	21.700.000.000	100	20.100.000.000	Kecamatan Buleleng
7	06	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	%	80	80	175,000,000	82	175.000.000	82	180.000.000	85	200.000.000	Kecamatan Buleleng
7	06	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentae Peningkaan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan	%	10	10	12,650,000,000	15	12.700.000.000	15	12.750.000.000	15	12.800.000.000	Kecamatan Buleleng
7	06	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	%	100	100	200,000,000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	260.000.000	Kecamatan Buleleng
7	06	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik	%	83	83	375,000,000	91	375.000.000	91	380.000.000	100	380.000.000	Kecamatan Buleleng
7	07				KECAMATAN SAWAN												

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	3,480,000,000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.550.000.000	kecamatan sawan
7		02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	%	80	80	90,000,000	82	90.000.000	82	100.000.000	85	110,000,000	kecamatan sawan
	07																
7	07	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentae Peningkaan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan	%	10	10	475,000,000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	kecamatan sawan
7		04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	%	100	100	175,000,000	100	175.000.000	100	195.000.000	100	210.000.000	kecamatan sawan
7	07	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik	%	86	86	180,000,000	93	180,000,000	93	200.000.000	100	210.000.000	kecamatan sawan
7	08				KECAMATAN KUBUTAMBAHAN												

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	2,900,000,000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.975.000.000	Kecamatan Kubutambahan
7	08	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	%	80	80	95,000,000	82	95.000.000	82	110.000.000	85	125.000.000	Kecamatan Kubutambahan
7	08	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan	%	10	10	275,000,000	15	275.000.000	15	285.000.000	15	295.000.000	Kecamatan Kubutambahan
7	08	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	%	100	100	205,000,000	100	205.000.000	100	215.000.000	100	225.000.000	Kecamatan Kubutambahan
7	08	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik	%	85	85	325,000,000	92	325.000.000	92	325.000.000	100	345.000.000	Kecamatan Kubutambahan
7	09				KECAMATAN TEJAKULA												
7	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	3,100,000,000	100	3.150.000.000	100	3.150.000.000	100	3.200.000.000	Kecamatan Tejakula
7	09	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	%	95	95	75,000,000	95	75.000.000	95	90.000.000	95	100.000.000	Kecamatan Tejakula

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	09	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentae Peningkaan Swadaya Murni Masyarakat di Kecamatan	%	90	91	300,000,000	92	300.000.000	93	310.000.000	94	320.000.000	Kecamatan Tejakula
7	09	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	%	100	100	200,000,000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	235.000.000	Kecamatan Tejakula
7	09	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik	%	80	80	225,000,000	90	225.000.000	90	235.000.000	100	250.000.000	Kecamatan Tejakula
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	4,570,000,000	100	4.570.000.000	100	4.750.000.000	100	4.750.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	90	90	375.000.000	90	375.000.000	90	400.000.000	90	415.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
									2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi partai politik dalam Pendidikan politik	%	95	95	150.000.000	95	300.000.000	95	400.000.000	95	425.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendukung pembangunan	%	95	95	150.000.000	95	300.000.000	95	400.000.000	95	400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional	%	97	97	130.000.000	97	130.000.000	97	175.000.000	97	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik social yang difasilitasi penyelesaiannya	%	95	95	1.575.000.000	95	300.000.000	95	SOSIAL 350.000.000	95	360.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH										2.200.607.000.000		2.248.857.000.000		2.313.590.000.000,00		2.356.273.000.000,00	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah terdapat tiga aspek yang dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini merupakan indikator di level dampak (impact) yang merupakan akumulasi dari hasil (outcome) multi-aspek penyelenggaraan pembangunan di daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) diambil dari indikator sasaran strategis RPD yang posisinya lebih ke arah dampak final/akhir (final impact) dari pembangunan.

8.1 *Indikator Kinerja Utama Daerah*

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana di bawah ini.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Buleleng

No	Indikator	Satuan	Data Tahun Awal (Baseline 2021)	Target Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
1	Umur harapan hidup	Nilai	71,95	72,34	72,66	72,86	73,05
2	Rata-rata lama sekolah	Nilai	7,25	7,27	7,27	7,31	7,33
3	Rata-rata harapan lama sekolah	Nilai	13,08	13,27	13,29	13,38	13,48
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Nilai	100	100	100	100	100
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	72,89	73,00	73,50	74,00	75,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,3	3,0	2,8	2,4	2,4
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74,86	75,56	76,26	76,76	77,26
8	Pertumbuhan ekonomi daerah	%	-1,22	3,3	3,5	3,96	4,6
9	Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai	60,49	61,50	62,00	63,00	64,50
10	Laju Inflasi	%	2,39	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5
11	Kondisi jalan dan jembatan mantap	%	71,07	72,00	73,00	74,00	75,00
12	Persentase Keamanan, keselamatan, ketertibandan kelancaran lalu lintas Perhubungan	%	83,66	89,00	90,00	90,33	91,33
13	Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap	%	78.24	78,56	79,00	79,50	80,00
14	Cakupan layanan air minum	%	86,74	87,00	87,50	88,00	88,50
15	Persentase pelayanan air limbah	%	94,00	94.46	94,56	94,66	94,76
16	Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	%	47.67	48,27	48,88	49,48	50,09
17	Persentase pengembangan sistem persampahan	%	37,21	41,86	46,51	51,16	55,81
18	Persentase penduduk miskin	%	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6
19	Persentase penanganan PMKS	%	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86
20	Persentase Penanganan bencana	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
21	Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum)	%	100	100	100	100	100
22	Persentase Cagar budaya yanglestari	%	20	30	40	50	60
23	Persentase Budaya tak benda yang lestari	%	16,67	33,33	50,00	66,67	83,83

No	Indikator	Satuan	Data Tahun Awal (Baseline 2021)	Target Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
24	Persentase Desa adat yang lestari	%	26,65	32,57	39,67	47,95	57,42
25	Indeks kualitas air	Nilai	64,17	59,10	59,10	59,12	59,14
26	Indeks kualitas udara	Nilai	88,52	89,65	89,76	89,79	89,80
27	Indeks tutupan lahan	Nilai	52,44	52,60	52,66	52,68	52,68
28	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang	%	70	75	76	77	78
29	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,30	3,10	3,20	3,30	3,40
30	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	%	85	90	90	90	95
31	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	Nilai	68,85	70	70,01	70,01	70,02
32	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	0	77	78	79	80
33	Indeks Merit sistem	Nilai	100	150	200	250	300
34	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel	%	100	100	100	100	100

8.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Desentralisasi merupakan usaha yang dianggap mampu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desentralisasi didesain untuk menciptakan empowering welfare artinya kesejahteraan harus dikaitkan dengan proses pemberdayaan melalui pengembangan kapasitas dan potensi seluruh anggota masyarakat. Menurut UNDP (2001), pengembangan manusia sebagai aktor pembangunan harus didasarkan pada empat elemen kunci yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Dengan model pemberdayaan (empowering welfare), maka peningkatan kesejahteraan dapat diukur melalui pendekatan materi dan non materi yang diterjemahkan dalam 3 (tiga) kelompok indikator antara lain: 1). Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; 2) Kesejahteraan Sosial; 3) seni budaya dan olahraga.

8.2.1 *Penetapan Indikator Kinerja Masyarakat*

Aspek Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur beberapa bidang yang memiliki esensi bagi pengembangan harkat dan martabat manusia sebagai aktor dalam sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya dan keagamaan, sistem sosial dan sistem lingkungan hidup. Dalam pengukuran aspek kesejahteraan masyarakat dapat digunakan indikator seperti pada tabel berikut :

Tabel 8.2
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buleleng

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) (%)	-1,22	3,3	3,5	3,96	4,6	4,6
1.2	Persentase peningkatan nilai investasi	57	70	73	75	76	76
1.3.	Laju inflasi (%)	2,39	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5
1.4.	PDRB Perkapita (Juta)						
1.5.	Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini)	0,2820	0,305	0,302	0,299	0,296	0,296
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,56	73,20	73,55	73,90	74,10	74,10
1.7.	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6
1.8.	Persentase pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan pada PDRB	75,60	78,14	78,59	79,09	79,64	79,64
1.9.	Persentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan dan koperasi pada PDRB	50	50	50,50	51	51,50	51,50
1.10.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,15	7,25	7,27	7,27	7,31	7,33
1.11.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,08	13,27	13,29	13,38	13,48	13,48
1.12.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,95	72,34	72,66	72,86	73,05	73,05
1.13.	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran	8,39	9,00	8,75	8,25	8,00	8,00
1.14.	Persentase Balita Gizi Buruk	1,42	1,30	1,25	1,15	1,00	1,00
1.15.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	5,38	3,3	3,0	2,8	2,4	2,4
1.16.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,86	75,56	76,26	76,76	77,26	77,26
1.17.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,49	61,50	62,00	63,00	64,50	64,50

8.2.2 *Penetapan Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum*

Otonomi daerah memberikan peluang untuk terpenuhinya pelayanan minimal di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah akan mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan aspirasi masyarakat lebih terakomodir sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan umum.

Tabel 8.3

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Buleleng

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
2	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.	Pendidikan						
1.1.	Persentase sekolah yang menyertakan pendidikan karakter dan penggalian potensi	100	100	100	100	100	100
1.2.	APK Pendidikan Usia Dini (%)	53,42	53,74	54,06	54,38	54,70	54,70
1.3.	Angka Partisipasi Sekolah (%)	100	100	100	100	100	100
1.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,87	100	100	100	100	100
1.4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	98,98	99,16	99,43	99,52	99,70	99,70
1.5.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,0026	0	0	0	0	0
1.6.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100
1.7.	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	99,50	99,61	99,72	99,83	99,94	99,94
1.8.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs	102,73	100	100	100	100	100
1.9.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs	87,20	87,68	88,16	88,64	89,12	89,12
1.10.	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,01	0	0	0	0	0

NO	ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1.11.	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	100
1.12.	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	100
1.13.	Rasio ketersediaan sekolah menengah (Sek/10.000 Pddk)	25,84	26,84	27,84	28,84	29,84	29,84
1.14.	Rasio guru terhadap murid (Guru/Murid)	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
1.15.	Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf (%)	93,54	93,59	93,64	93,69	93,74	93,74
1.16.	Persentase lembaga pendidikan non formal yang telah memenuhi SPM	29,03	34,03	39,03	44,03	49,03	49,03
1.17.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	39,87	40,87	41,87	42,87	43,87	43,87
1.18.	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV (%)	93,43	93,63	93,83	94,03	94,23	94,23
2	Kesehatan						
2.1	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Madya	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00
2.2	Rasio Posyandu per Satuan Balita (Bh/10000)	17,99	18,89	19,84	20,83	21,87	21,87
2.3	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk (Bh/10000)	0,155	0,155	0,163	0,171	0,179	0,179
2.4	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (Bh/10000)	0,013	0,013	0,014	0,014	0,015	0,015
2.5	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Bh/10000)	0,73	0,73	0,77	0,81	0,85	0,85
2.6	Rasio Perawat per Satuan Penduduk (Bh/10000)	2,75	2,75	2,89	3,04	3,19	3,19
2.7	Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	94,37	95,00	95,25	95,75	96,00	96,00
2.8	Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	107,33	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan desa kelurahan UCI (%)	94,59	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
2.10	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan(%)	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA(%)	37,58	38,00	38,50	39,00	39,50	39,50
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB(%)	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan kunjungan bayi(%)	109,47	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
2.14	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran idup	8,39	9,00	8,75	8,25	8,00	8,00
2.15	Persentase Balita Gizi Buruk	1,42	1,30	1,25	1,15	1,00	1,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1.	Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap	78.24	78,56	79,00	79,50	80,00	80
3.2.	Persentase Capaian Pelayanan Air Minum	86,74	87,00	87,50	88,00	88,50	88,50
3.3.	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	47.67	48,27	48,88	49,48	50,09	50,09
3.4.	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar	60	70	75	80	85	85
3.5.	Persentase Perencanaan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	100	100	100	100	100	100
3.6.	Persentase Pelayanan Air Limbah	94	94,46	94,56	94,66	94,76	94,76
3.7.	Persentase Kondisi jalan dan jembatan mantap	71,07	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
3.8.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	60	70	75	80	85	85
3.9..	Persentase pengembangan sistem persampahan	37,21	41,86	46,51	51,16	55,81	55,81
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1	Prosentase penanganan Rumah Korban Bencana alam	100	100	100	100	100	100
4.2	Presentase Penanganan Kawasan Kumuh	0	20	20	20	20	20
4.3	Prosentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani	59.27	63,75	68,33	73,03	77,83	77,83
4.4	Persentase PSU Perumahan yang diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah	3,62	1,50	1,53	1,55	1,57	1,57
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1.	Persentase Penegakan PERDA	90	90	90	90	90	90
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	95	95	95	95	95	95

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
5.3.	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	100	100	100	100
5.4.	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan non kebakaran	94	94	94	94	94	94
6	Sosial						
6.1.	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100	100	100	100	100	100
6.2.	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86
6.3.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80	80	80	80	80	80
6.4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100
6.5.	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	93.33	100	100	100	100	100
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	Tenaga Kerja						
1.1	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	4.20	4.40	4.63	4.87	5.11	5.11
1.2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	23.12	23.86	25	26.12	27.25	27.25
1.3	Persentase Penurunan kasus Hubungan Industrial	14.28	28.57	42.85	57.14	71.42	71.42
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Persentase Peningkatan Peran Perempuan dalam Ekonomi Politik (%)	80.00	70.00	72.00	75.00	75.00	75.00
2.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan Pemkab/Kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	-	5 Media	6 Media	7 Media	8 Media	8 Media
2.3	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
2.4	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.5	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapat pelatihan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
2.6	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/Kota (APBD Kab/Kota)	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
2.7	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi
2.8	Jumlah Kader Perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	-0	1 Kader	1 Kader	1 Kader	1 Kader	1 Kader
2.9	Jumlah Lembaga layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat pelatihan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
2.10	Jumlah Lembaga layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
2.11	Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program
2.12	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Hak Perempuan yang telah terstandarisasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
2.13	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang terlayani (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.14	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
2.15	Persentase Program/Kegiatan PUG pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi melalui Analisis Gender di tingkat Kabupaten/Kota (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.	Ketahanan Pangan						
3.1	Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	79	79	80	81	82	82
3.2.	Persentase penanganan wilayah rentan rawan pangan	20	40	60	80	100	100
3.3.	Prosentase Pangan Aman	80	81	82	83	84	84
4	Pertanahan						
4.1.	Persentase Penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	0	100	100	100	100	100
5.	Lingkungan Hidup						
5.1	Persentase pengelolaan	10	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
	Persampahan						
5.2.	Indeks kualitas air	64,17	59,10	59,10	59,12	59,14	59,14
5.3.	Indeks kualitas udara	88,52	89,65	89,76	89,79	89,80	89,80
5.4.	Indeks tutupan lahan	52,44	52,60	52,66	52,68	52,68	52,68
5.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	84	85	85	86	86	86
5.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	90	91	92	93	94	94
5.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (buah/1000 pddk)	70 unit	72 unit	75 unit	77 unit	79 unit	79 unit
5.8.	Penegakan hukum lingkungan (%)	87	50	52	53	54	54
5.9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,00	70,05	70,11	70,13	70,14	70,14
6	Kependudukan dan Catatan Sipil						
6.1	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	100	100	100	100	100
6.2	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	98,02	98,15	98,25	98,35	98,45	98,55
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	33,58	34,65	36,85	37,95	38,05	38,05
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
7.1	Persentase penataan desa sesuai aturan (%)	3,88	11,63	19,38	27,13	34,88	34,88
7.2	Persentase peningkatan lembaga atau organisasi masyarakat yang aktif (%)	4	5	5	5	5	24
7.3	Persentase desa dengan capaian kinerja sesuai ketentuan (%)	69,41	72,16	74,90	77,65	80,10	80,10
7.4	Persentase desa yang dikerjasamakan dengan baik (%)	13,17	17,05	20,93	24,81	28,68	28,68
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1	Persentase Prevalensi Stunting	8.9%	8.00	7.00	6.00	5.00	5.00
8.2	Persentase Penduduk Miskin Mendapat Bantuan Sosial	0	0.38	0.54	0.69	0.69	0.69

NO	ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
8.3	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	-	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.
8.4	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
8.5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	31,45	31,45	31.00	30.55	30.10	30.10
8.6	<i>Persentase</i> Masyarakat yang tepapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	197.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8.7	<i>Jumlah Stakeholder</i> /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK.	1.267 Orang	1.267 Orang	1.300 Orang	1.350 Orang	1.400 Orang	1.400 Orang
8.8	<i>Persentase</i> Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8.9	<i>Persentase</i> Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	83.08	38.84	39.00	40.00	41.00	41.00
8.10	Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	601 Kelompok	608 Kelompok	610 Kelompok	620 Kelompok	630 Kelompok	630 Kelompok
8.11	<i>Persentase</i> Pelayanan KB Pasca Persalinan	29.07	29.07	30.00	32.00	35.00	35.00
8.12	<i>Persentase</i> Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan rendah	25.70	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
8.13	<i>Persentase</i> Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	34.23	34.23	35.00	36.00	37.00	37.00
9	Perhubungan						
9.1.	Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Perhubungan	83,66	89,00	90,00	90,33	91,33	91,33
9.2.	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	85	87	90	91	92	92
9.3.	Persentase pengelolaan sarana prasarana transportasi	90	90	90	90	90	90
9.4.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	90	90	90	90	92	92
10	Informasi dan Komunikasi						
10.1	Nilai hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi.	93,91	94,66	95,41	96,16	96,91	96,91
10.2	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,30	3,10	3,20	3,30	3,40	3,40

NO	ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.1	Persentase koperasi aktif	12	17	20	23	28	28
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah yang meningkat statusnya (%)	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9
12	Penanaman Modal						
12.1	Persentase realisasi investasi (%)	57	70	73	75	76	76
12.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	81,65	81,70	81,75	81,80	81,80
13	Kepemudaan dan Olahraga						
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	78,00	82,00	86,00	90,00	94,00	94,00
13.2	Persentase wirausaha muda	15,50	5,70	5,90	6,10	6,30	6,30
13.3.	Cakupan pembinaan atlet muda	55	60	65	70	75	75
13.4.	Cakupan pelatih yang bersertifikat	82	87	92	97	102	102
13.5.	Cakupan pembinaan olahraga	48	53	58	63	68	68
13.6.	Jumlah atleh berprestasi	18	400	405	410	415	415
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	8	13	15	17	19	19
14	Statistik						
14.1	Persentase peningkatan layanandata sektoral sesuai standar	100	100	100	100	100	100
15	Persandian						
15.1	Persentase pengamanan informasi sesuai standar	100	100	100	100	100	100
16	Kebudayaan						
16.1.	Persentase sejarah lokal yang terbina	100	100	100	100	100	100
16.2.	Persentase cagar budaya yang lestari	20	30	40	50	60	60
16.3.	Persentase Desa adat yang lestari	26,65	32,57	39,67	47,95	57,42	57,42
16.4.	Persentase budaya tak benda yang lestari	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	83,33

NO	ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
17	Perpustakaan						
17.1	Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan (orang)	25	30	35	40	45	45
18	Kearsipan						
18.1	Lembaga/SKPD yang mengelola arsip sesuai standar	10	11	12	13	14	14
LAYANAN URUSAN PILIHAN							
1.	Kelautan dan Perikanan						
1.1.	Produksi perikanan (ton)	20.718	20.792	20.867	20.942	21.042	21.042
1.2.	Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan	500	525	550	575	600	600
2.	Pariwisata						
2.1.	Jumlah daya tarik destinasi wisata unggulan	0	3	3	3	3	3
2.2.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kabupaten Buleleng	1	2	3	4	5	5
2.3.	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	0	10	10	10	10	10
2.4.	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	0	2	2	2	2	2
3.	Pertanian						
3.1.	Luas lahan pertanian yang menerapkan sistem organik (ha)	684	393	394	395	396	396
3.2.	Produksi padi (ton)	106.660,50	109.960,98	109.977,64	109.988,31	109.998,97	109.998,97
3.3.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21,01	21,02	21,03	21,04	21,05	21,05
3.4.	Jumlah petani/poktan/gapoktan dengan skor kemampuan kelas Madya	50	55	60	65	70	70
4	Kehutanan						
4.1.	Luas lahan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.	0	0	0	0	0	0
5	Energi dan Sumber Daya Mineral						

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
5.1.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.	0	0	0	0	0	0
6	Perdagangan						
6.1.	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB	49,00	50,00	50,50	51,00	51,50	51,50
7	Perindustrian						
7.1.	Persentase Pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB (%)	78,14	78,14	78,59	79,09	79,64	79,64
8	Transmigrasi						
8.1.	Persentase Transmigran yang ditempatkan (%)	0	10	20	30	40	40
PENUNJANG URUSAN							
1	Perencanaan						
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD(%)	100	100	100	100	100	100
1.5.	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan						
2.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73	77	78	79	80	80
2.2	Persentase kemandirian keuangan daerah	20,22	20,89	21,57	22,23	22,90	23,90
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
3.1.	Indeks Merit sistem	100	150	200	250	300	300
3.2.	Indeks Kepuasan ASN	83,20	83,50	83,80	84,00	84,15	84,15

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
3.3.	Indeks Profesionalitas ASN	50,69	50,70	51,00	51,40	51,80	51,80
4	Penelitian dan pengembangan						
4.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	65	72	75	78	80	80
4.2.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	30	30	30	30	30	30
Unsur Pengawasan							
1.1.	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	40	40	40	40	40	40
1.2.	Persentase OPD dengan maturitas SPIP minimal level 3 9terdefinisikan)	25	25	50	75	100	100
1.3	Level kapabilitas APIP level 3 (integrated)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Unsur Pendukung							
1. Sekretariat Dewan							
1.1.	Persentase Ranperda yang disahkan menjadi Perda (%)	90	90	92	94	96	98
1.2.	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	90	90,00	92,00	94,00	96,00	96,00
2. Sekretariat Daerah							
1.1	Persentase capaian kinerja pembangunan (%)	98,65	97,25	98,45	99,15	99,50	99,50
Unsur Kewilayahan							
1.1	Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan Masyarakat, transntibum.	100	100	100	100	100	100
Unsur Pemerintahan Umum							
1	Kesatuan Bangsa dan Politik						
1.1.	Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kel (orang)	1.439	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
1.2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam demokrasi	80	80	80	80	80	80

NO	ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1.3.	Persentase konflik sosial yang difasilitasi penyelesaiannya	95	95	95	95	95	95
1.4.	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	90	90	90	90	90

8.3 Penetapan Indikator Kinerja Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah berkaitan dengan urusan pilihan pemerintah daerah. Secara umum, Daya Saing Daerah dapat diukur antara lain dari tingkat daya saing industri, sumber daya alam, sumber daya manusia, produk unggulan, efisiensi pelayanan birokrasi, efisiensi perdagangan, ketersediaan infrastruktur, keamanan, potensi pasar, kepastian hukum, dan sebagainya. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aspek Daya
Saing Daerah di Kabupaten Buleleng

NO	ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2023	2024	2025	2026	
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	21,01	21,01	21,03	21,04	21,05	21,05
1.2.	Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan	60,49	61,50	62,00	63,00	64,50	64,50
1.3.	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,30	3,10	3,20	3,30	3,40	3,40
1.4.	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	85	90	90	90	95	95
1.5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	68,85	70	70,01	70,01	70,02	70,02
1.6.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0	77	78	79	80	80

BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah buat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, memuat rencana strategis daerah dalam jangka waktu 4 (empat tahun) kedepan. Penyusunan RPD ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005–2025 (tahapan keempat tahun 2022–2025), serta mengacu RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013–2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, analisis kondisi dan isu-isu strategis daerah, serta program prioritas yang bersifat strategis dan teknis operasional.

RPD ini merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng, sebagai rencana tahunan pemerintah daerah.

Dalam upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada sasaran pokok, arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng, RPJMD Provinsi Bali, dan RPJMN. Penyusunan RKPD tahun 2023 juga wajib mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017–2022 dan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2022, serta isu-isu strategis yang berkembang pada tahun berkenaan.

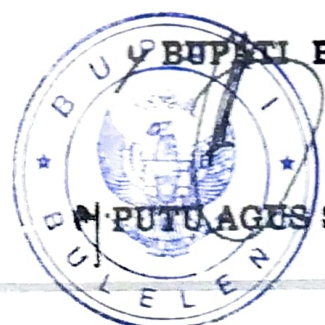
9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pembangunan yang telah disepakati dengan aktualisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran pemerintahan daerah, termasuk DPRD, masyarakat, dan

dunia usaha di Kabupaten Buleleng wajib mendukung program RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 ini dengan sebaik-baiknya.

2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan menjaga konsistensi antara RPD dengan dokumen rencana Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen rencana pembangunan tetap terjaga.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai tahun 2023-2026 dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah wajib mengevaluasi pencapaian target kinerja program yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada Bupati Buleleng.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 sebagai dasar penyusunan revisi RPD dan sebagai bahan penyusunan rancangan teknokratis RPJMD periode berikutnya.
7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terjadi perkembangan kondisi dan isu-isu strategis daerah yang tidak sesuai atau belum terakomodasi dalam program dan target kinerja RPD ini, maka RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026 dapat dilakukan direvisi dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

**BUPATI BULELENG,**
PUTU AGUS SURADNYANA